

Laporan Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025



*Badan Pusat Statistik
Kota Palembang*





BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG

**Ekonomi Kita,
Dolak Jantung Bangsa**

Laporan Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025



*Badan Pusat Statistik
Kota Palembang*



Laporan Kinerja

Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2025

No.Publikasi : 16710.2301

Katalog : 1202059.1671

Ukuran Buku : 21x29.7 cm

Jumlah Halaman : vii+290 Halaman/Pages

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS - Statistics Indonesia

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

Secara substansi, laporan ini memuat Capaian Kinerja dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi, Capaian Kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, serta respons terhadap Isu Strategis Nasional Tahun 2025. Selain itu, disajikan pula informasi mengenai prestasi dan inovasi BPS Kota Palembang, serta realisasi dan tingkat efisiensi anggaran sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai BPS Kota Palembang atas dedikasi dan kerja kerasnya, serta kepada seluruh mitra kerja dan responden yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan kegiatan statistik dapat berjalan dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BPS Kota Palembang selama tahun 2025 serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 19 Januari 2026
Badan Pusat Statistik
Kota Palembang
Kepala,



Edi Subeno

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iv	
Daftar Gambar	vi	
Daftar Grafik	viii	
Daftar Lampiran	ix	
Ringkasan Eksekutif	x	
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang	2
1.3	Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran	5
1.4	Potensi dan Permasalahan	9
1.5	Sistematika Penyajian Laporan	13
BAB II	Perencanaan Kinerja	
2.1	Visi dan Misi BPS	15
2.2	Target Kinerja BPS Kota Palembang 2025-2029	20
2.3	Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2025	23
2.4	Dukungan BPS Terhadap Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	24
2.5	Rencana Kerja dan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2025	30
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2025	39
3.2	Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra	156
3.3	Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	204
3.4	Prestasi dan Inovasi	237
3.5	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	257
BAB IV	Penutup	
4.1	Tinjauan Umum	269
4.2	Tindak Lanjut	270
Lampiran-lampiran		
1	Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025	
2	Reviu Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025	
3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	
4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	
5	Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2025	
6	Daftar OPD yang menjadi target Pembinaan Statistik Sektorale tahun 2025	
7	Daftar K/L/Instansi/OPD Pengguna Data BPS untuk Perencanaan,	

- Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (Hasil SKD 2025)
- 8 Daftar Prestasi/Penghargaan BPS Kota Palembang Tahun 2025
 - 9 Daftar Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2025
 - 10 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang TA 2025
 - 11 Perubahan SP DIPA- 054.01.2.428211/2025 BPS Kota Palembang 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2024	ix
Tabel 2	: Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang	6
Tabel 3	: Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 4	: Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2025	7
Tabel 5	: Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang	7
Tabel 6	: Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS 2025-2029	21
Tabel 7	: Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2025	23
Tabel 8	: Rencana Kerja dan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2026	32
Tabel 9	: Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang	36
Tabel 10	: Hasil Implementasi Sakip BPS Kota Palembang Tahun 2025	43
Tabel 11	: Penilaian Kinerja Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2025	43
Tabel 12	: Predikat PKO	44
Tabel 13	: Interpretasi Predikat PKO	44
Tabel 14	: Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025	48
Tabel 15	: Capaian Kinerja Tujuan Kesatu BPS Kota Palembang Tahun 2025	52
Tabel 16	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	54
Tabel 17	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	61
Tabel 18	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	69
Tabel 19	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	76
Tabel 20	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	81
Tabel 21	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	86
Tabel 22	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	92
Tabel 23	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas	97
Tabel 24	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	104
Tabel 25	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	109

Tabel 26	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	116
Tabel 27	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	122
Tabel 28	: Capaian Kinerja Tujuan Kedua	126
Tabel 29	: Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar	128
Tabel 30	: Dasar Hitung dan Basis Data Target IKU Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri Triwulan I – IV 2025	143
Tabel 31	: Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	143
Tabel 32	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2025	149
Tabel 33	: Capaian Kinerja Nilai SAKIP oleh Inspektorat per Triwulan	150
Tabel 34	: Capaian Kinerja Indeks Implementasi BerAKHLAK per Triwulan	154
Tabel 35	: Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Terhadap Target Renstra	157
Tabel 36	: Jumlah sampel UDPE Lanjutan tahun 2025	231
Tabel 37	: Permasalahan Kegiatan UDPE Lanjutan Tahun 2025	233
Tabel 38	: Sumber Data Pemuktahiran	235
Tabel 39	: Tabel Efisiensi Per Sasaran Tahun 2025	263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Susunan Organisasi BPS Kota Palembang	4
Gambar 2	:	Pernyataan Visi dan Misi BPS 2025-2029	16
Gambar 3	:	Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	55
Gambar 4	:	Pengawasan Pendataan Lapangan Sakernas	59
Gambar 5	:	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	62
Gambar 6	:	Screen shoot Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang di website	63
Gambar 7	:	Supervisi Pendataan Lapangan Susenas Maret 2025 oleh Kepala dan Tim Statistik Kesra BPSKotaPalembang	67
Gambar 8	:	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	69
Gambar 9	:	Screen Shoot Statistik Potensi Desa Kota Palembang Tahun 2025 di website BPS Kota Palembang	70
Gambar 10	:	Pengawasan Pendataan Potensi Desa Tahun 2025	72
Gambar 11	:	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	76
Gambar 12	:	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	82
Gambar 13	:	Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	87
Gambar 14	:	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	92
Gambar 15	:	Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas	97
Gambar 16	:	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	103
Gambar 17	:	Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	109
Gambar 18	:	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	115
Gambar 19	:	Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	121
Gambar 20	:	Koordinasi Awal Pembinaan Statistik Sektoral di RSUD dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang	129
Gambar 21	:	Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral	130
Gambar 22	:	Pemberitahuan Capaian Kinerja Pembinaan Statistik Sektoral TW I 2025	131
Gambar 23	:	Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Aksi SDI	135
Gambar 24	:	Bimtek Evaluasi Statistik Sektoral Daerah Kota Palembang 2025	138
Gambar 25	:	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar BPS Kota Palembang Tahun 2025	140

Gambar 26	: Aplikasi SATU (Sistem Adiministrasi Terpadu)	153
Gambar 27	: Screenshot Berita Resmi Statistik di Website	211
Gambar 28	: Verifikasi data DTSEN	213
Gambar 29	: Koordinasi dengan Koordinator PKH	215
Gambar 30	: Tangkapan layar aplikasi SIKS-NG pertanyaan alasan Tidak Layak BLTS	216
Gambar 31	: Tangkapan layar aplikasi SIKS-NG pertanyaan Alasan Layak BLTS	217
Gambar 32	: Pendampingan Verifikasi Terhadap Keluarga Edi Saputra	218
Gambar 33	: Pendataan KSA Padi	220
Gambar 34	: Pendataan Lapangan Ubinan	224
Gambar 35	: Pengawasan pendataan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025	230
Gambar 36	: Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Mitra KPPN Palembang semester II Tahun 2025	238
Gambar 37	: Penghargaan dari Pengurus Bersama Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (PB IKA LKS)	239
Gambar 38	: Penghargaan dari Walikota	240
Gambar 39	: Penghargaan mengoperasikan aplikasi BOS	241
Gambar 40	: Penghargaan Kolaborasi Eksternal Terbaik	241
Gambar 41	: Penghargaan Kinerja Terbaik dalam kegiatan tim statistik harga tahun 2025	242
Gambar 42	: Penghargaan Kinerja Terbaik 2 Dalam Kegiatan Tim Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata (KTIP) Tahun Anggaran 2025	242
Gambar 43	: Penghargaan Kinerja Terbaik 1 dalam Kegiatan Pertambangan, Energi dan Konstruksi (PEK) Provinsi Sumsel Tahun 2025	243
Gambar 44	: Pengguna Terbaik Aplikasi Back Office Selindo (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	243
Gambar 45	: Aplikasi SATU (Sistem Admintrasi Terpadu)	246
Gambar 46	: Instagram Pojok Statistik Universitas Bina Dharma Palembang	247
Gambar 47	: Pojok Statistik di Bina Dharma Palembang	247
Gambar 48	: Screen Shoot Aplikasi WA BOT	250
Gambar 49	: Screenshot PAL-INSTA di Facebook	251
Gambar 50	: Dokumentasi dan Sertifikat Sempurna	252
Gambar 51	: Kegiatan Kolaborasi BPS Kota Palembang	253
Gambar 52	: Screenshot One-Fo di Website	254
Gambar 53	: Dokumentasi Kopi Manis BPS Kota Palembang	255
Gambar 54	: Dokumentasi Rapih Kantorku	254
Gambar 55	: Dokumentasi ASN Pro	257

Gambar 56	: Dokumentasi Jus Manggis	258
Gambar 57	: Dokumentasi Muter Pagi	259

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	5
Grafik 2	: Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2025	9
Grafik 3	: Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2025	38
Grafik 4	: Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2023 - 2025	40
Grafik 5	: Benchmarking Capaian Kinerja BPS Kota Palembang terhadap Rata-Rata Capaian Kinerja se Sumatera Selatan Tahun 2025	47
Grafik 6	: Persentase Response Rate	232
Grafik 7	: Target dan Realisasi Penyelesaian Profiling Mandiri	235

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025	273
Lampiran 2	: Reviu Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025	277
Lampiran 3	: Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	281
Lampiran 4	: Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	281
Lampiran 5	: Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2025	281
Lampiran 6	: Daftar OPD yang menjadi target Pembinaan Tahun 2025	282
Lampiran 7	: Daftar K/L/Instansi/OPD Pengguna Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (Hasil SKD 2025)	282
Lampiran 8	: Daftar Prestasi/Penghargaan BPS Kota Palembang Tahun 2025	283
Lampiran 9	: Daftar Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2025	284
Lampiran 10	: Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang TA 2025	287
Lampiran 11	: Perubahan SP DIPA- 054.01.2.428211/2025 BPS Kota Palembang 2025	289



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional, Badan Pusat Statistik terus memperkuat sistem penyediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan tepat waktu. Penguatan ini menjadi fondasi utama dalam mendukung terwujudnya Indonesia Maju melalui visi BPS sebagai *“Lembaga Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mewujudkan Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas.”*

Di tingkat daerah, BPS Kota Palembang memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya data statistik yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di Palembang. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPS menjalankan misi yang berfokus pada:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Untuk mengarahkan implementasi misi tersebut, BPS Kota Palembang menetapkan tujuan strategis yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, yaitu:

1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan insight yang relevan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
3. Mewujudkan tata kelola BPS yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien dalam menyelenggarakan statistik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, dukungan anggaran menjadi faktor yang sangat penting.

BPS Kota Palembang mencatat penyerapan anggaran sebesar Rp11.170.357.544,- dengan tingkat realisasi mencapai 99,11 persen. Angka ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efektif dan efisien. Dari sisi kinerja, capaian program dan kegiatan mencapai 103,23 persen, yang berarti

melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, Pencapaian Nilai Kualitas Output (PKO) sebesar 91,72 menunjukkan bahwa output yang dihasilkan tidak hanya tercapai secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara efektivitas penggunaan anggaran dan mutu hasil kerja.

Tabel 1. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 2. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 3. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 4. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 5. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas						
Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 6. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas						
Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 7. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 8. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 9. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 10. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 11. Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah						
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar	Persen	80	98,53	94,58	118,23	95,99
Sasaran 12. Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS						
Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Poin	3,33	4,53	4,26	120	94,04
Sasaran 13. Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota						
Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Poin	74,16	74,20	74,60	100,59	100,54
Indeks Implementasi BerAKHLAK	Poin	64,84	68,84	73,20	112,89	106,33

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang Tahun 2025, terdapat 4 indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi 100 persen, yaitu:

1. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar
2. Indeks Pelayanan Publik (Penilaian Mandiri)
3. Nilai SAKIP oleh Inspektorat
4. Indeks Implementasi BerAKHLAK

Capaian ini menunjukkan bahwa BPS Kota Palembang tidak hanya berhasil memenuhi target tahunan, tetapi juga melampaui standar kinerja yang telah direncanakan, khususnya dalam aspek tata kelola, pelayanan publik, dan implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029, BPS Kota Palembang telah melampaui 100 persen pada 2 indikator kinerja, yaitu:

- Nilai SAKIP oleh Inspektorat
- Indeks Implementasi BerAKHLAK

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja dan budaya kerja organisasi telah berada di jalur yang sangat baik, bahkan lebih cepat dari target jangka menengah yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025 mencerminkan komitmen kuat BPS Kota Palembang dalam mengelola sumber daya secara profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tingginya tingkat penyerapan anggaran, capaian kinerja yang melampaui target, serta kualitas output yang baik menjadi bukti bahwa strategi dan program yang dijalankan telah efektif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data di Kota Palembang. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai fondasi menuju terwujudnya tata kelola statistik yang semakin unggul, inovatif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah serta kontribusi nyata menuju Indonesia Emas.



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja BPS Kota Palembang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kota Palembang dalam penyelenggaraan statistik di Kota Palembang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sebagai instansi vertikal BPS di daerah, BPS Kota Palembang memiliki peran strategis dalam menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, dan berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Ketersediaan data dan insight statistik yang relevan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data statistik lintas sektor di tingkat daerah, BPS Kota Palembang berupaya menghasilkan berbagai publikasi dan laporan statistik di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, pertanian, industri, distribusi, harga, keuangan, teknologi informasi, pariwisata, serta statistik lintas sektor. Seluruh kegiatan statistik tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip statistik resmi, menjunjung tinggi profesionalisme, serta menjaga kualitas dan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi Kota Palembang secara komprehensif.

Selain sebagai sarana penyediaan data statistik, Laporan Kinerja tahunan merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap kementerian/lembaga sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas capaian kinerja yang dihasilkan berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPS Kota Palembang dituangkan secara transparan dalam Laporan Kinerja tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan kinerja dan

anggaran.

Lebih lanjut, penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas BPS Kota Palembang sebagai penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi kinerja yang penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Laporan Kinerja BPS Kota Palembang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja serta kontribusi BPS Kota Palembang dalam mendukung pembangunan daerah dan prioritas nasional secara berkelanjutan.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konsitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. BPS sedang berada dalam masa transisi, mendukung kebijakan pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi, mengurangi tingkat eselon untuk kemudian dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional secara bertahap. Menggunakan dasar hukum Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, pada masa transisi ini. Mengingat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 telah ditetapkan pada 16 Mei 2023.

1.2.1. Kedudukan

Kedudukan BPS Kota Palembang adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi.

1.2.2. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, pasal 3 disebutkan bahwa BPS Kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

1.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Palembang.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Palembang.
3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Palembang.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara. Perlengkapan dan rumah tangga BPS Kota Palembang

1.2.4. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Palembang, yaitu:

1.2.4.1. Kepala

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang mempunyai tugas memimpin BPS Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.

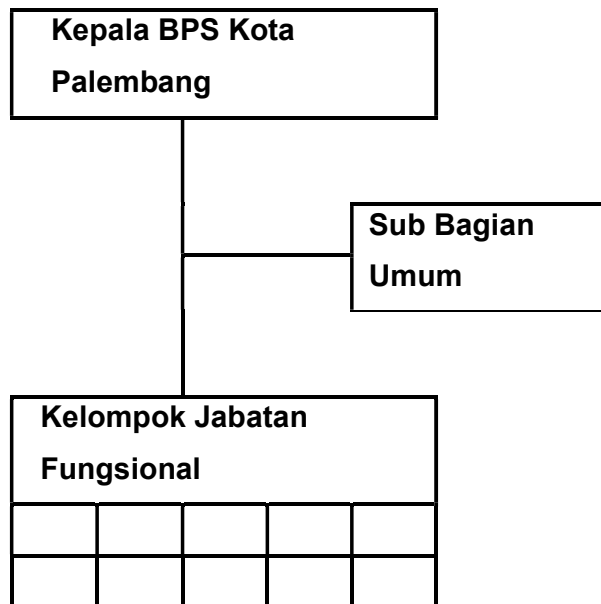
1.2.4.2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

1.2.4.3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kota Palembang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1. Susunan Organisasi BPS Kota Palembang:



1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

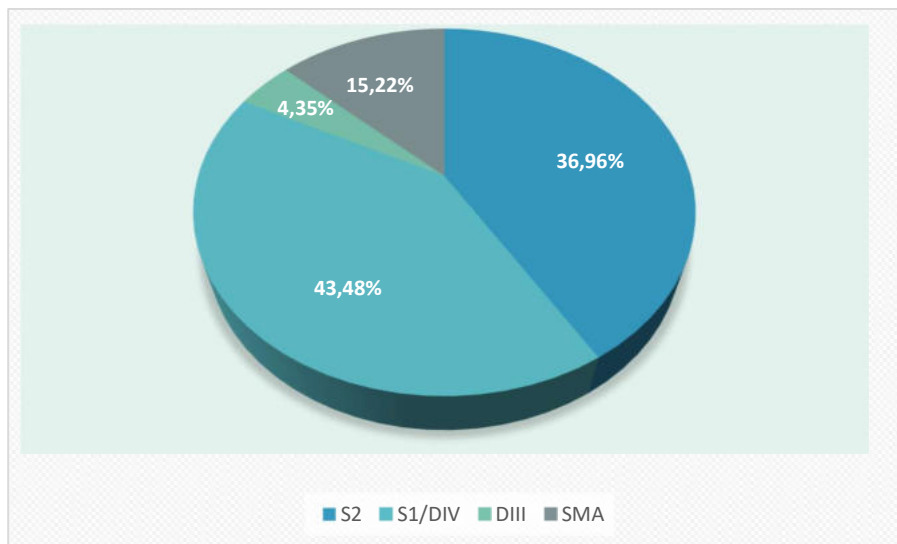
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting dalam suatu organisasi yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPS Kota Palembang tercatat sebanyak 46 orang. Komposisi pendidikan ASN di BPS Kota Palembang terdiri dari:

- 20 orang dengan pendidikan S2 (43,48%)
- 17 orang dengan pendidikan S1/D-IV (36,96%)
- 2 orang dengan pendidikan D-3 (4,35%)
- 7 orang dengan pendidikan SMA (15,22%)

Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas ASN di BPS Kota Palembang memiliki pendidikan tinggi, dengan lulusan S2 mendominasi jumlah pegawai, diikuti oleh lulusan S1/D-IV. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kota Palembang memiliki SDM yang relatif berkualitas dan terdidik dengan baik.

Kuantitas dan kualitas SDM sangat mempengaruhi kinerja suatu instansi. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang tinggi dari para pegawai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas statistik yang kompleks dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

Grafik 1. SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, terdapat perubahan susunan organisasi di BPS Kota Palembang menjadi 2 pejabat struktural yang terdiri dari Eselon III (Kepala) dan Eselon IV (Kasubbag Umum), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Komposisi pegawai BPS Kota Palembang menurut jabatan sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang

Jabatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
1. Pejabat Struktural	2	2	4,34	0	0,00
2. Pejabat Fungsional Tertentu	32	14	30,43	18	39,13
3. Pejabat Fungsional Umum	12	6	13,04	6	13,04
Jumlah	46	22	47,83	24	52,17

Pada Tahun 2025 terdapat 2 pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu yaitu Fungsional Statistisi ahli madya dan Fungsional Statistisi ahli pertama. Selain itu, terjadi mutasi pegawai, dengan 2 pegawai yang masuk ke BPS Kota Palembang dan 1 pegawai yang pindah ke BPS Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga pada Tahun 2025 pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 32 orang atau 69,56 persen dari seluruh pegawai yang terdiri dari 1 orang Statistisi Madya, 13 orang Statistisi Ahli Muda, 2 orang Pranata Komputer Ahli Muda, 9 orang Statistisi Ahli Pertama, 2 orang pranata komputer ahli pertama, 1 orang Penyelia, dan 1 orang Statistisi Pelaksana Lanjutan/Mahir, 1 Pranata Keuangan APBN Mahir, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil dan 1 Pranata SDM Mahir

Tabel 3 . Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	6	13,05
III	34	73,91
II	1	2,17
PPPK		
IX	2	4,31
V	3	5,17
Jumlah	46	100,00

Tabel 4. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2025

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
>50	7	15,21
41-50	17	36,96
31-40	17	36,96
≤ 30	5	10,87
Jumlah	46	100,00

Sampai dengan kondisi Desember 2025, sebanyak 2 orang pegawai sedang menjalani tugas belajar dan 1 orang telah selesai menjalani tugas belajar pada Universitas Terbuka pada jenjang pendidikan S1 dan 1 pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Guna mendukung kelancaran seluruh kegiatan teknis maupun non-teknis di lingkungan BPS Kota Palembang, pelaksanaan program difasilitasi oleh Dukungan Anggaran sesuai dengan SP DIPA-054.01.2.428227/2025 tertanggal 2 Desember 2024. Alokasi anggaran yang semula memiliki Pagu Awal sebesar Rp.12.595.364.000,- mengalami penyesuaian melalui revisi pagu pada bulan Desember 2025 menjadi Rp. 11.515.620.000,-,

Tabel 5. Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang

Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Tanpa Blokir) (Rp)	Pagu Akhir (dengan Blokir) (Rp)
(1)	(2)		(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	7.558.773.000	3.727.411.000	3.974.019.00
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	5.036.591.000	7.541.601.000	7.541.601.000
Total	12.595.364.000	11.269.012.000	11.515.620.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kota Palembang, yang terdiri dari rincian output sebagai berikut:

1. Layanan BMN
2. Layanan Umum
3. Layanan Perkantoran
4. Layanan Sarana Internal
5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
6. Layanan Manajemen Keuangan

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Palembang secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 adalah penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang rincian outputnya sebagai berikut:

1. Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik
2. Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik
3. Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral
4. Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran
5. Publikasi/Laporan Neraca Produksi
6. Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik
7. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Publikasi/Laporan Statistik Distribusi
9. Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi
10. Publikasi/Laporan Statistik Harga
11. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi
12. Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi
13. Publikasi/Laporan Sakernas
14. Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus

15. Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat
16. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial
17. Publikasi/Laporan Pendataan Podes
18. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata
19. Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce
20. Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan
21. Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan
22. Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan

Grafik 2. Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2025



1.4. Potensi dan Permasalahan

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan garda terdepan dalam penyediaan data berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional sesuai mandat UU No. 16 Tahun 1997. Keberadaan data statistik yang valid menjadi kunci utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, hingga evaluasi program pembangunan baik di level pusat maupun daerah.

Menyadari pentingnya aksesibilitas data di era digital, BPS terus bertransformasi dalam mendistribusikan informasi kepada publik. Melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST), BPS hadir sebagai solusi satu pintu yang dirancang untuk mempermudah berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam memperoleh akses data statistik yang relevan, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini.

Adapun potensi yang dimiliki BPS Kota Palembang yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional

Pegawai BPS Kota Palembang memiliki 46 jiwa yang diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi, dengan ini pegawai telah memiliki keahlian teknis dalam pengolahan dan analisis data statistik.

2. Infrastruktur yang Modern

Dengan adanya transformasi layanan digital kepercayaan publik yang tinggi terhadap objektivitas data BPS, yang dipadukan dengan optimalisasi infrastruktur teknologi informasi melalui platform Pelayanan Statistik Terpadu (PST). BPS Kota Palembang tidak hanya mampu menyajikan data yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi layanan statistik yang lebih adaptif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Ketersediaan anggaran pemeliharaan aset kantor dimanfaatkan secara efektif guna mendukung keberlanjutan operasional dan kenyamanan lingkungan kerja. Pemeliharaan sarana yang optimal dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi menjamin kelancaran operasional dan kerja yang profesional bagi para pegawai. Hal ini diharapkan mampu memicu peningkatan produktivitas kerja sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal di fasilitas yang representatif dan memadai.

4. Kemampuan Beradaptasi dengan Perkembangan Teknologi

Kemampuan dalam menyelaraskan operasional dengan tren teknologi terbaru merupakan keunggulan kompetitif BPS Kota Palembang.

Implementasi solusi berbasis TIK yang inovatif memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih sistematis dan cepat. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas kerja pegawai serta memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses layanan data yang lebih modern, cepat, dan akuntabel.

5. Jaringan Kerjasama yang inklusif

Salah satu kekuatan BPS Kota Palembang dalam memperkuat kedudukan data sebagai aset pembangunan. Melalui kolaborasi aktif yang erat dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan masyarakat umum, BPS mampu melakukan pengayaan metodologi dan data yang lebih komprehensif. Kemitraan ini tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga merupakan upaya kolektif untuk meningkatkan mutu layanan statistik agar lebih presisi, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pengambilan kebijakan pemerintah.

Dengan berbekal seluruh potensi tersebut, BPS Kota Palembang kini menempati posisi krusial sebagai pilar penyedia data dalam menopang siklus perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Optimalisasi potensi ini bukan sekadar target manajerial, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, akurat, dan berdampak bagi seluruh pemangku kepentingan

Sebagai pilar data yang tepercaya, BPS Kota Palembang berkomitmen penuh dalam menjawab tantangan penyediaan data yang berkualitas dan relevan bagi publik. Dalam upaya tersebut, terdapat beberapa tantangan perubahan krusial yang kini menjadi fokus utama kami, yaitu:

1. Meningkatnya permintaan terhadap keragaman dan kualitas data statistik dari sektor publik, dunia usaha, hingga pemerintah pusat menuntut BPS Kota Palembang untuk senantiasa adaptif. Dalam hal ini dituntut memastikan bahwa setiap data yang dirilis tidak hanya akurat, tetapi juga tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang
2. Pelaksanaan berbagai survei tahunan yang kerap berhimpitan dalam satu lini masa menjadi tantangan dalam manajemen sumber daya.

Diperlukan koordinasi jadwal yang lebih sinkron untuk menghindari penumpukan beban kerja bagi SDM dan petugas lapangan, guna menjaga konsistensi kualitas output statistik.

3. Adanya kesenjangan antara ketersediaan data dengan kebutuhan data mikro di tingkat wilayah terkecil (kelurahan/kecamatan). Hal ini menjadi prioritas tantangan guna mendukung kebijakan pemerintah kota yang lebih presisi, spesifik, dan tepat sasaran.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi BPS memengaruhi tingkat penerimaan di lapangan. Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih persuasif dan edukatif untuk membangun kesadaran bahwa BPS adalah institusi penyedia rujukan data nasional, bukan sekadar pengumpul informasi.
5. Adanya kendala akses dan penolakan responden, khususnya pada masyarakat di kawasan elit, menjadi hambatan dalam memperoleh sampel yang representatif. Tantangan ini memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih personal dan formal untuk meyakinkan pentingnya partisipasi warga dalam pembangunan.
6. Rendahnya kejujuran dan kesadaran responden dalam memberikan informasi yang akurat berdampak langsung pada *response rate* dan validitas data. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa keakuratan jawaban responden adalah kunci utama kualitas kebijakan publik.
7. Sinergi dan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah (OPD) masih perlu dioptimalkan. Sebagai pembina statistik sektoral, BPS Kota Palembang berkomitmen untuk mempererat kolaborasi lintas instansi demi mewujudkan Satu Data Indonesia yang terintegrasi di tingkat daerah.

Melalui komitmen penuh dalam memitigasi berbagai tantangan strategis tersebut, BPS Kota Palembang bertekad memperkuat posisinya sebagai penyedia

data statistik yang akurat, relevan, dan terpercaya. Transformasi ini menjadi langkah krusial dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima serta memberikan nilai tambah nyata bagi seluruh pemangku kepentingan

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang selama tahun anggaran 2025. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai tolok ukur keberhasilan BPS Kota Palembang. Melalui analisis ini, BPS Kota Palembang dapat mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) guna merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan di masa depan. Adapun sistematika penyajian laporan ini telah disusun selaras dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan kinerja BPS Kota Palembang tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang ; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran di BPS Kota Palembang; potensi dan permasalahan yang dihadapi; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPS Kota Palembang yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang; Rencana Strategis (Renstra) BPS 2025-2029, Perjanjian Kinerja (PK) 2025 dan Perjanjian Kinerja Suplemen BPS Kota Palembang

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang terdiri dari Realisasi Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2025; Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra, Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan

Isu Strategis Nasional Tahun 2025, Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2025 dan Realisasi dan Efisiensi Anggaran.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2025 dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA





BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik

Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan kinerja yang tinggi, akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini, sistem pengukuran kinerja yang efektif menjadi sangat penting, karena mampu mengintegrasikan seluruh tahapan peningkatan kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pencapaian. Sistem ini juga berperan dalam menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi program serta kegiatan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Perencanaan strategis (*Renstra*) BPS Kota Palembang periode 2025–2029 disusun sebagai rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, integral, efisien, dan koordinatif. Dalam penyusunannya, BPS Kota Palembang mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan tantangan yang mungkin muncul selama lima tahun ke depan. Penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi dasar utama dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil pembangunan, karena kualitas data secara langsung memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.

Perumusan Visi dan Misi BPS Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan berbagai isu strategis kelembagaan yang memengaruhi peran dan posisi BPS dalam menyediakan statistik resmi berkualitas. Isu strategis tersebut antara lain mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” beserta 8 Misi Asta Cita dan 17

Program Prioritas. Selain itu, penunjukan BPS sebagai Koordinator Bidang Statistik dan Data dalam percepatan keanggotaan Indonesia pada OECD mengharuskan BPS menerapkan standar internasional secara konsisten, tidak hanya pada statistik yang dihasilkan sendiri, tetapi juga pada statistik yang disediakan oleh kementerian/lembaga lain. Dinamika global, perkembangan teknologi informasi, arus data yang pesat, dirupsi Revolusi Industri 4.0, serta perubahan fokus program pembangunan menuntut BPS untuk menyediakan data yang akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan mampu memberikan insight bagi pengambil keputusan.

Independensi BPS menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga objektivitas dan netralitas statistik. Dengan posisi yang independen, BPS mampu menghasilkan indikator yang mencerminkan kondisi riil masyarakat dan pembangunan, tanpa intervensi kepentingan politik. Hal ini penting agar data dan informasi statistik dapat dijadikan dasar yang sah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Visi BPS 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPS merumuskan **misi** yang akan menjadi pedoman dalam merencanakan program, kegiatan, dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi BPS.

Gambar 2. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2025-2029

VISI BPS 2025-2029	<i>Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mewujudkan Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045</i>	MISI BPS KOTA PALEMBANG 2025 –2029
		1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
		2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi tersebut BPS Kota Palembang merumuskan tiga misi utama yang saling terintegrasi yaitu :

Misi 1 : Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Misi ini menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, lengkap, konsisten, dan tepat waktu, serta pengolahan informasi menjadi insight yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dengan data yang andal, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi hasil. Selain itu, misi ini menegaskan independensi dan integritas BPS, karena data dihasilkan melalui metodologi ilmiah yang objektif dan bebas dari intervensi kepentingan politik atau pihak lain. Dengan demikian, Misi 1 menjadi landasan utama dalam mewujudkan BPS sebagai lembaga yang terpercaya dan berkontribusi aktif pada pembangunan nasional.

Misi 2 : Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Misi ini menegaskan peran BPS sebagai koordinator dan pemimpin statistik nasional, yang memastikan seluruh data dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah memenuhi standar yang seragam, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Selain itu, sebagai Koordinator Bidang Statistik dan Data dalam percepatan keanggotaan Indonesia di OECD, BPS harus menjamin penerapan standar internasional dalam seluruh statistik nasional. Dengan kepemimpinan yang kuat, BPS dapat menghasilkan data yang transparan, terstandar, dan berkualitas tinggi, sehingga mendukung perumusan kebijakan berbasis data yang efektif dan meningkatkan efektivitas pembangunan nasional.

Misi 3 : Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Statistik yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan Misi 1 dan 2 sangat bergantung pada kekuatan

kelembagaan internal BPS. Misi ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, peningkatan tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi modern untuk mempercepat pengolahan data dan penyampaian informasi yang akurat. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, BPS dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas layanan statistik dan mempertahankan independensi lembaga dalam setiap kegiatan. Keterpaduan ketiga misi ini memastikan BPS mampu menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan strategis, sehingga mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Maju dan Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS Kota Palembang berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, visi BPS sebagai Lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Visi, misi dan tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi, BPS menetapkan tujuan yang menjadi arah perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan merupakan keadaan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi, dan analisis strategis, sedangkan sasaran adalah target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan tersebut. BPS menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya yaitu :

Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan

Tujuan ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi besar BPS sebagai lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan berbasis data. Melalui penyediaan statistik yang berkualitas tinggi, akurat, konsisten, dan tepat waktu, serta pemanfaatan data untuk menghasilkan insight yang relevan dan bernilai tambah, BPS secara nyata mendukung penyusunan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy). Kebijakan yang dirumuskan berdasarkan data yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kredibilitas dan profesionalisme BPS sebagai institusi penyedia data resmi.

Keberadaan data yang tepat dan berkualitas menjadi instrumen yang sangat vital dalam menjawab tantangan pembangunan serta dinamika sosial dan ekonomi di daerah. Dalam konteks tersebut, BPS tidak hanya berperan sebagai penyaji data statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Statistik yang berkualitas merupakan prasyarat utama untuk menjaga independensi dan objektivitas lembaga, mencegah potensi bias dalam perumusan kebijakan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pencapaian tujuan ini diharapkan mampu memperkuat peran BPS dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Tujuan 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang Andal, Efektif, dan Efisien.

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tinggi sangat bergantung pada peran strategis Sistem Statistik Nasional (SISNAS) yang andal, efektif, dan efisien. SISNAS menjadi fondasi dalam menjamin integrasi, konsistensi, dan akurasi data melalui sinergi antarinstansi, standarisasi metodologi, serta penguatan koordinasi pengumpulan dan penyajian statistik. Melalui sistem ini, BPS Kota Palembang tidak hanya berperan sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai pengelola sistem statistik yang memastikan keterpaduan informasi lintas sektor. Penguatan SISNAS secara langsung mendukung terwujudnya BPS sebagai lembaga yang terpercaya, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pusat dan daerah. Selain memperkuat efisiensi internal, SISNAS juga menegaskan peran strategis BPS sebagai pilar utama dalam penyediaan informasi publik yang objektif, kredibel, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan

Tujuan 3 : Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik

Tata kelola yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BPS, termasuk penyediaan data berkualitas dan penguatan Sistem Statistik Nasional. Tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan memastikan seluruh proses berjalan profesional serta memperkuat independensi kelembagaan. Melalui pengelolaan organisasi yang efektif, BPS mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin akuntabilitas kinerja. Tata kelola yang baik juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPS sebagai lembaga statistik yang profesional, kredibel, dan bebas dari intervensi.

Visi, misi, dan tujuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja BPS Kota Palembang saat ini masih mengacu pada visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistik secara nasional. Penetapan visi, misi, dan tujuan BPS Kota Palembang secara definitif belum dapat dilakukan dan masih menunggu penetapan resmi dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). Oleh karena itu, seluruh perencanaan dan pelaporan kinerja BPS Kota Palembang disusun dengan tetap selaras dan konsisten terhadap arah kebijakan strategis BPS RI.

2.2. Target Kinerja BPS Kota Palembang 2025-2029

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahunan, BPS Kota Palembang telah menyusun target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam notulen penetapan target Renstra. Penetapan target Renstra ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang memiliki arah, sasaran, dan capaian kinerja yang jelas serta terukur.

Melalui penetapan target Renstra tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPS Kota Palembang dapat berjalan secara lebih terarah, sistematis, dan selaras dengan kebijakan strategis Badan Pusat Statistik secara nasional. Target Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja,

sehingga setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, keberadaan target Renstra memungkinkan BPS Kota Palembang untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan statistik kepada masyarakat selama periode perencanaan.

Tabel 6. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan							
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Duknaker
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Kesra
	Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Ketahanan Sosial
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Pertanian
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Pertanian
	Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Industri

	Berkualitas							
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Distribusi
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Harga
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Statistik Niaga dan Jasa
	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Neraca Produksi
		Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Neraca Pengeluaran
		Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	100	100	100	100	100	Tim Analisis dan Pengembangan Statistik
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang Andal, Efektif, dan Efisien							
	Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas	Persentase Kumulatif Desa Yang Berpredikat Desa Cinta Statistik	-	7,48	8,41	9,35	10,28	Tim Desa Cantik
	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral K/L/Pemda	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar	80	84,63	89,09	93,62	98,53	Tim DLS
	Terwujudnya Kemudahan Akses Data Bps	Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	3,33	3,63	3,93	4,23	4,53	Tim DLS
3.	Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik							
	Terwujudnya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	74,16	74,17	74,18	74,19	74,20	Tim Sakip
		Indeks Implementasi BerAKHLAK	64,84	65,84	66,84	67,84	68,84	Tim CA

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2025

Pada awal tahun 2025 telah ditetapkan target kinerja yang harus dipenuhi oleh BPS Kota Palembang sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintahan. Reviu Perjanjian Kinerja ini merupakan tanggung jawab Kepala BPS Kota Palembang dan disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik mengenai Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029. Target yang telah ditetapkan tersebut menjadi dasar penilaian indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun 2025.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan			
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas	Persen	100

Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	100
Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/ Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100
	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	100
	Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	100
2. Meningkatnya kolaborasi, Integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral K/L/Pemda	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar	Persen	80
Terwujudnya Kemudahan Akses Data Bps	Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Poin	3,33
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Penyelenggaraan Statistik			
Terwujudnya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Poin	74,16
	Indeks Implementasi BerAKHLAK	Persen	64,84

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mendukung pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan penanganan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 melalui penyediaan data statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

2.4.1. Prioritas Nasional

2.4.1.1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi

yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

BPS Kota Palembang memiliki peran strategis sebagai pelaksana pembinaan statistik sektoral di Kota Palembang, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan penyelenggaraan statistik sektoral, fasilitasi penerapan standar statistik, penguatan koordinasi antarprodusen data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data. Melalui peran ini, BPS Kota Palembang berkontribusi dalam mewujudkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

2.4.1.2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, BPS Kota Palembang telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya tersebut diawali dengan perencanaan anggaran serta penyiapan instrumen pendataan dan penyiapan petugas, guna memastikan terselenggaranya kegiatan statistik harga yang mampu menghasilkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi dan andil inflasi yang akurat, konsisten

dan terpercaya. Pelaksanaan pendataan dilakukan setiap bulan melalui Survei Harga Konsumen di Kota Palembang dengan cakupan periode mingguan, dwi mingguan dan bulanan, sehingga dinamika perubahan harga dapat tercatat secara komprehensif.

Selanjutnya, proses penghitungan IHK, inflasi dan andil inflasi pada tingkat kota Palembang dilaksanakan melalui mekanisme harmonisasi dan rekonsiliasi antar level harga untuk menjaga konsistensi, integritas dan validitas output yang dihasilkan. Di samping itu, penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi. Penjaminan kualitas dilaksanakan secara konsisten melalui evaluasi internal berupa rapat evaluasi dan penerapan Quality Gate serta evaluasi eksternal melalui mekanisme SIQAF sehingga proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

2.4.2. Prioritas Presiden

2.4.2.1. Inpres 4 2025 : DTSEN

Implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menempatkan BPS sebagai poros utama dalam penyediaan data berkualitas untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. BPS Kota Palembang berkomitmen menjalankan peran tersebut melalui penguatan validasi data lapangan, penyediaan analisis kewilayahan yang tajam, serta pendampingan teknis bagi pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang diambil berbasis pada data yang akurat (data-driven policy), demi terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan

2.4.2.2. Inpres 6 2025 , Survei KSA Padi dan survePelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data

berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres ini BPS Kota Palembang melakukan penguatan manajemen lapangan dan pengawasan kualitas secara intensif guna memastikan akurasi data produksi gabah dan beras di salah satu lumbung pangan nasional ini. BPS Kota Palembang melakukan supervisi berlapis terhadap pelaksanaan Survei KSA dan Ubinan di seluruh kabupaten/kota penghasil padi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan nonsampling serta memastikan bahwa setiap titik amatan dan sampel plot ubinan diambil sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).

Selain itu, BPS Kota Palembang secara aktif melakukan rekonsiliasi data hasil survei dengan pemangku kepentingan terkait di level daerah, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk memberikan gambaran ketersediaan cadangan beras pemerintah yang faktual. Pemanfaatan teknologi berbasis geospasial dan pelaporan real-time terus dioptimalkan agar data produktivitas yang dihasilkan dapat segera digunakan oleh pemerintah sebagai basis pengambilan kebijakan pengadaan gabah serta penyaluran cadangan beras yang tepat sasaran di wilayah Kota Palembang.

2.4.2.3 Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan

bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG. BPS Kota Palembang dalam hal ini berperan melaksanakan kegiatan pendataan dan pengumpulan data terkait Program Makan Bergizi Gratis.

Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

2.4.3. Isu Strategis Nasional

2.4.3.1. Perpres 12 2025 : Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan.

Dalam penyelenggaraan survei tersebut, BPS Kota Palembang berperan sebagai pelaksana kegiatan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) di wilayah Kota Palembang, yang meliputi koordinasi pelaksanaan lapangan, penugasan dan pembinaan petugas, pengumpulan data, serta pengawasan dan pemeriksaan hasil pendataan agar sesuai dengan standar metodologi yang telah ditetapkan.

2.4.3.2. UU Nomor 16 Tahun 1997 : Sensus Ekonomi

Dalam sistem perstatistikan nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menempatkan Sensus Ekonomi (SE) sebagai salah satu instrumen strategis negara untuk memotret struktur ekonomi secara komprehensif. Sebagai pilar hukum utama, regulasi ini memberikan mandat khusus kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan sensus sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam. Penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala ini bertujuan untuk menangkap dinamika perubahan struktur ekonomi serta pergeseran pola usaha dalam jangka panjang, sehingga pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam memetakan daya saing bisnis dari skala mikro hingga besar.

Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur hubungan timbal balik yang kuat antara negara dan pelaku usaha melalui prinsip kewajiban dan jaminan keamanan. Di satu sisi, setiap responden atau pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada petugas di lapangan. Di sisi lain, BPS memberikan jaminan kerahasiaan yang mutlak atas data individu atau unit usaha sesuai amanat Pasal 21. Data yang dikumpulkan

tidak akan dipublikasikan secara personal, melainkan diolah dalam bentuk agregat untuk melindungi privasi perusahaan dari pihak ketiga maupun kompetitor.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi yang berlandaskan UU No. 16 Tahun 1997 berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Dengan cakupan yang luas terhadap seluruh sektor ekonomi di luar pertanian, hasil sensus ini menjadi sumber data tunggal yang paling andal untuk memotret kondisi UMKM dan industri nasional. Melalui gambaran data makro yang dihasilkan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pemberian insentif usaha hingga pengembangan infrastruktur bisnis yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

2.4.3.3. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Gula,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Dalam penyediaan data komoditas tersebut, BPS Kota Palembang berperan melaksanakan survei terkait seperti Pengumpulan Data Luas Panen Tanaman Pangan, Survei Ubinan Tanaman Pangan, Pendataan Laporan Pematangan Ternak Bulanan (LPTB), dan Pendataan Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI).

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mencakup program kerja utama, jadwal pelaksanaan, serta estimasi kebutuhan anggaran yang

disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan pendanaan. Rencana kerja Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kinerja, penguatan tata kelola, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Program kerja dirancang secara sistematis agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah dan terukur.

Tabel 8. Rencana Kerja dan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2025

No	Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Output	Rencana Realisasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik					
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas	344.420.000	1. Laporan Kegiatan Sakernas Tahun 2025 2. Laporan Kegiatan Supas 2025 3. Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2024	1.20 Desember 2025 2.1 Oktober 2025 3.24 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Duknaker
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas	519.518.000	1. BRS Profil Kemiskinan di Kota Palembang Maret 2025 2. Laporan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang Tahun 2025 3. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2025	1.30 Desember 2025 2.30 Desember 2025 3. 28 November 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Kesejahteraan Rakyat Tim SPBE
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas	46.867.000	1. Laporan Kegiatan Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 2. Laporan Kegiatan Pendataan Podes Tahun 2025	1.20 Desember 2025 2.20 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Ketahanan Sosial
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	120.580.000	1. Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan 2025 2. Laporan Statistik Tanaman Pangan 2025	1.24 Desember 2025 2.31 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Pertanian

No	Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Output	Rencana Realisasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Berkualitas	35.782.000	1. Laporan Kegiatan Statistik Peternakan, Perikanan dan kehutanan Tahun 2025	1. 19 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Pertanian
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri Yang Berkualitas	233.540.000	1. Laporan Kegiatan Statistik Industri Tahun 2025 2. Laporan Statistik Pertambangan dan Penggalan, Energi dan Konstruksi Tahun 2025	1. 19 Desember 2025 2. 30 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Industri Tim PEK
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Distribusi Yang Berkualitas	1.555.432.000	1. Laporan Kegiatan Statistik Distribusi Tahun 2025 3. Laporan Sensus Ekonomi	1. 22 Desember 2025 2. 31 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Distribusi/ Niaga dan Jasa
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Harga Yang Berkualitas	336.058.000	1. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Desember 2025 2. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Januari 2026 3. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Februari 2025 4. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Maret 2025 5. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang April 2025	1. 2 Januari 2025 2. 3 Februari 2025 3. 3 Maret 2025 4. 8 April 2025 5. 2 Mei 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Statistik Harga Tim

No	Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Output	Rencana Realisasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
			6. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Mei 2025 7. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Juni 2025 8. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Juli 2025 9. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Agustus 2025 10. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang September 2025 11. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang Oktober 2025 12. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Palembang November 2025 13. Laporan Kegiatan Statistik Harga Tahun 2025 14. Laporan Inflasi Kota Palembang Januari-Desember 2025	6. 2 Juni 2025 7. 1 Juli 2025 8. 1 Agustus 2025 9. 1 September 2025 10.1 Oktober 2025 11.3 November 2025 12.1 Desember 2025 13.31 Desember 2025 14.31 Desember 2025		
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata Yang Berkualitas	437.690.000	1. Laporan Kegiatan Statistik Keuangan Tahun 2025 2. Laporan Kegiatan Statistik Pariwisata Tahun 2025 3. Laporan Kegiatan Statistik E-Commerce Tahun 2025	1. 30 Sep 2025 2. 22 Des 2025 3. 22 Des 2025	Januari s.d Desember 2026	Tim Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

No	Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Output	Rencana Realisasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
	Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Lintas Sektor Yang Berkualitas	66.879.000	1.Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 7.Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Pengeluaran 2020-2025 8.Laporan Kegiatan Neraca Pengeluaran Tahun 2025 9.Laporan Kegiatan Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPT) Tahun 2025 10.Statistik Daerah Kota Palembang 2025 11.Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2025 12.Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang Tahun 2025	1.11 April 2025 2.31 Desember 2025 3.25 Maret 2025 4.16 Juni 2025 5.08 September 2026 6. 05 Desember 2025 7.30 April 2025 8.29 Desember 2025 9.31 Desember 2025 10.15 September 2025 11.28 November 2025 12.31 Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Neraca Produksi Tim Neraca Pengeluaran Tim Analisis dan Pengembangan Statistik
	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah	15.625.000	Tingkat hasil pembinaan statistik sektoral sesuai standar	Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim DLS
	Terwujudnya Kemudahan Akses Data Bps	15.020.000	Hasil PEKPPP 2025 dan SKD	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim DLS

No	Program/Sasaran Kegiatan	Pagu	Output	Rencana Realisasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
2	Program Dukungan Manajemen					
	Terwujudnya Dukungan Manajemen Pada Bps Provinsi Dan Bps Kabupaten/Kota	7.541.601.000	Nilai Implementasi Sakip oleh Inspektoral Hasil SBO	Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Tim Sakip
Total		11.269.012.000				

Pada awal tahun sesuai DIPA-054.01.1.428227/2024, BPS Kota Palembang menerima pagu sekitar Rp. 12.595.364.000 dalam rupiah murni. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 2 program. Pagu paling besar dialokasikan untuk program program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 7.541.601.000,- atau 65,49 persen dari total anggaran BPS Kota Palembang. Selanjutnya program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp. 3.974.019.000,- (34,51%).

Pada tahun 2025, BPS Kota Palembang melakukan revisi DIPA sebanyak 11 kali. Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir yang ditetapkan untuk BPS Kota Palembang adalah sebesar Rp 11.515.620.000,- (dengan blokir), yang mengalami penurunan sebesar Rp 1.079.744.000,- dibandingkan dengan pagu anggaran sebelumnya. Pagu anggaran yang dapat digunakan oleh BPS Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 11.269.012.000,- (tanpa blokir)

Tabel 9. Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang

Program	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Tanpa Blokir (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	3.974.019.000	246.608.000	3.727.411.000
Program Dukungan Manajemen	7.541.601.000	0	7.541.601.000
Jumlah	11.515.620.000	246.608.000	11.269.012.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kota Palembang, yang terdiri dari rincian output sebagai berikut:

1. Layanan BMN
2. Layanan Umum
3. Layanan Perkantoran
4. Layanan Sarana Internal

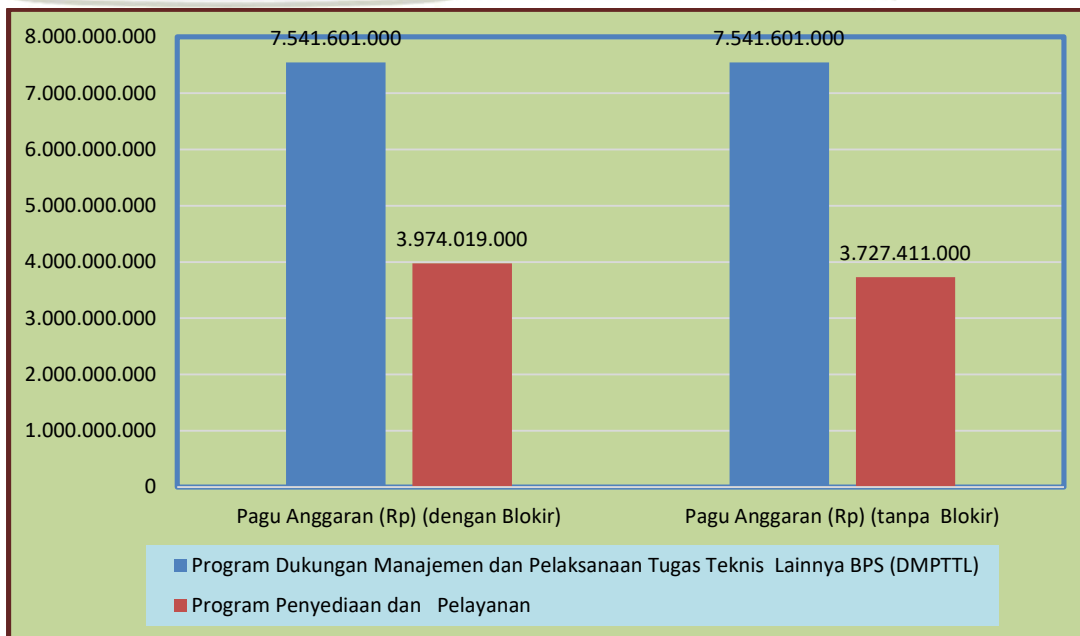
5. Layanan Manajemen Keuangan

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Palembang secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 adalah penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang rincian outputnya sebagai berikut:

1. Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik
2. Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral
3. Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik
4. Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran
5. Publikasi/Laporan Neraca Produksi
6. Dokumen/Laporan Pengembangan, Metodologi Kegiatan Statistik
7. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Publikasi/Laporan Statistik Distribusi
9. Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026
10. Publikasi/Laporan Statistik Harga
11. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi
12. Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi
13. Publikasi/Laporan Sakernas
14. Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus
15. Publikasi/Laporan Susenas
16. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial
17. Publikasi/Laporan Pendataan Podes
18. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi, dan Pariwisata
19. Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce
20. Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan

- Yang Terbit Tepat Waktu
- 21. Publikasi/Laporan Tanaman Pangan
 - 22. Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan
 - 23. Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan

Grafik 3. Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2025





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

SAKIP berperan penting dalam memastikan terselenggaranya mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah dapat melakukan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring capaian kinerja memungkinkan identifikasi secara dini terhadap berbagai permasalahan atau hambatan, sehingga langkah-langkah korektif dapat segera dilakukan secara tepat.

Selain itu, penerapan SAKIP mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana instansi pemerintah, khususnya BPS Kota Palembang, telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

BPS Kota Palembang berkomitmen untuk menerapkan SAKIP secara konsisten sebagai wujud tanggung jawab dalam pengelolaan kinerja. Dengan penerapan SAKIP yang efektif, BPS Kota Palembang tidak hanya berfokus pada pencapaian target kinerja, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2025

3.1.1. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2023-2025

Realisasi capaian kinerja BPS Kota Palembang merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian kinerja ini disusun berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengacu pada prinsip pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sepanjang periode pelaporan, BPS Kota Palembang telah melaksanakan

berbagai kegiatan statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data kepada pengguna. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar metodologi statistik nasional serta memperhatikan ketepatan waktu dan kualitas hasil.

Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Melalui proses monitoring tersebut, BPS Kota Palembang dapat mengidentifikasi capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya.

Selain berfokus pada pencapaian target kinerja, BPS Kota Palembang juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna data. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas data, penyajian informasi statistik yang mudah dipahami, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kota Palembang.

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja BPS Kota Palembang selama tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar berikut



Capaian kinerja BPS Kota Palembang selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian kinerja sebesar 107,84 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga berhasil melampauinya. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh koordinasi dan pengelolaan sumber daya yang optimal.

Pada tahun 2024, capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 109,79 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaan program serta kegiatan, baik dari sisi kualitas output maupun ketepatan waktu penyelesaian. Capaian tersebut juga mencerminkan keberhasilan BPS Kota Palembang dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat diantisipasi dan ditangani secara tepat.

Sementara itu, pada tahun 2025 capaian kinerja BPS Kota Palembang sebesar 103,23 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kota Palembang mampu menjaga konsistensi kinerja di tengah berbagai tantangan dan dinamika pelaksanaan kegiatan, termasuk penyesuaian kebijakan dan peningkatan kompleksitas kegiatan statistik.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, pengukuran kinerja masih mengacu pada Renstra 2020–2024, sehingga terdapat penyesuaian indikator dan target pada tahun 2025 seiring dengan diberlakukannya periode perencanaan yang baru. Perbedaan IKU tersebut turut memengaruhi mekanisme pengukuran dan capaian kinerja, sehingga hasil tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan kerangka perencanaan yang digunakan.

Sama seperti tahun 2023 dan 2024, pada tahun 2025 juga terdapat empat indikator kinerja yang melebihi dari 100 persen. Untuk tahun 2025, indikator kinerja yang lebih dari 100 persen yaitu :

1. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial sesuai Standar
2. Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri,
3. Nilai SAKIP oleh Inspektorat
4. Indeks Implementasi BerAKHLAK.

Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan BPS Kota Palembang dalam memperkuat tata kelola akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja aparatur.

Secara khusus, hasil penilaian implementasi SAKIP menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2024, indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,6 poin, yang menjadi sinyal perlunya evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan, monitoring, serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Penurunan tersebut menjadi perhatian penting bagi BPS Kota Palembang untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang muncul, baik dari sisi prosedur, koordinasi internal, maupun efektivitas pelaksanaan program.

Berbagai tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki capaian indikator tersebut. Hasilnya, pada tahun 2025, indikator yang sama berhasil mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perbaikan tersebut tercermin dari meningkatnya nilai pada beberapa komponen utama, khususnya pada aspek pelaporan kinerja yang mengalami kenaikan sebesar 1,25 poin serta pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang meningkat sebesar 0,75 poin. Peningkatan pada kedua aspek ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan laporan kinerja serta mekanisme evaluasi internal telah berjalan dengan lebih baik dan sistematis dibandingkan periode sebelumnya.

Namun demikian, tidak seluruh komponen SAKIP menunjukkan tren peningkatan. Pada aspek perencanaan kinerja, nilai yang diperoleh tidak mengalami perubahan, yang menunjukkan bahwa kualitas perencanaan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar selaras dengan target dan indikator kinerja yang ditetapkan. Selain itu, aspek pengukuran kinerja justru mengalami penurunan sebesar 1,2 poin. Penurunan ini mengindikasikan adanya kelemahan

dalam penetapan indikator, metode pengukuran, atau konsistensi pelaksanaan pengukuran kinerja, sehingga perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa implementasi SAKIP telah menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek penting, namun masih memerlukan penguatan terutama pada perencanaan dan pengukuran kinerja agar peningkatan akuntabilitas kinerja dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel. 10. Hasil Implementasi Sakip BPS Kota Palembang Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.60	20.40
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.25	12.15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	19.25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.15	74.60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

3.1.2. Nilai Penilaian Kinerja Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2025

Tabel 11. Penilaian Kinerja Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2025

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)		
Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK = (1)x(100%-(2))
	Total Capaian PK	1467.533981
	NKO Rata-rata Capaian PK PKO	91.72087379
	Predikat PKO	BAIK

Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 mengatur bagaimana kinerja organisasi pemerintah diukur dan diklasifikasikan berdasarkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang tahun. Salah

satu hasil utama dari penilaian ini adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan rata-rata capaian PK dari seluruh indikator kinerja organisasi. NKO mencerminkan seberapa efektif organisasi dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK.

Dalam Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024, setelah NKO dihitung maka diberi predikat PKO (Predikat Kinerja Organisasi) yang dikelompokkan dalam beberapa tingkatan berdasarkan rentang skor tertentu. Berikut klasifikasi predikat tersebut menurut aturan penilaian yang tercantum dalam Permenpan RB 22/2024:

Tabel 12. Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Tabel 13. Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Dengan NKO rata-rata capaian PK PKO sebesar 91,72 persen, nilai ini berada di atas rentang 90 yang menurut Permenpan RB dikelompokkan dalam predikat “Baik”. Ini berarti organisasi yang dinilai telah mencapai tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi selama periode evaluasi. Secara praktik, capaian di atas 90 menunjukkan bahwa:

1. Sebagian besar target PK direalisasikan dengan sangat baik, bahkan ada indikator yang terlampaui, menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Manajemen kinerja organisasi berjalan secara konsisten dan berorientasi hasil, termasuk pengukuran, pelaporan, dan tindak lanjut evaluasi yang mendukung ketercapaian target.
3. Hasil capaian ini mencerminkan implementasi manajemen kinerja yang unggul atau “*best practice*”, sehingga dapat menjadi contoh bagi unit organisasi lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) digunakan sebagai gambaran tingkat keberhasilan organisasi dalam mengelola dan merealisasikan kinerja yang telah diperjanjikan. NKO rata-rata capaian PK PKO sebesar 91,72 persen dengan predikat Baik menunjukkan bahwa organisasi telah mampu melaksanakan manajemen kinerja secara efektif, terukur, dan berorientasi hasil.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja sebagaimana ditekankan dalam Permenpan RB 22/2024. Selain itu, nilai yang tinggi ini juga menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja dalam mendorong pencapaian kinerja yang optimal serta penerapan prinsip akuntabilitas kinerja yang baik.

Secara kelembagaan, capaian NKO dengan predikat Baik memberikan implikasi positif terhadap kredibilitas organisasi, baik dalam konteks internal

pemerintahan maupun dalam memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Meskipun PKO telah mencapai predikat Baik, Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam manajemen kinerja. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan ke depan antara lain:

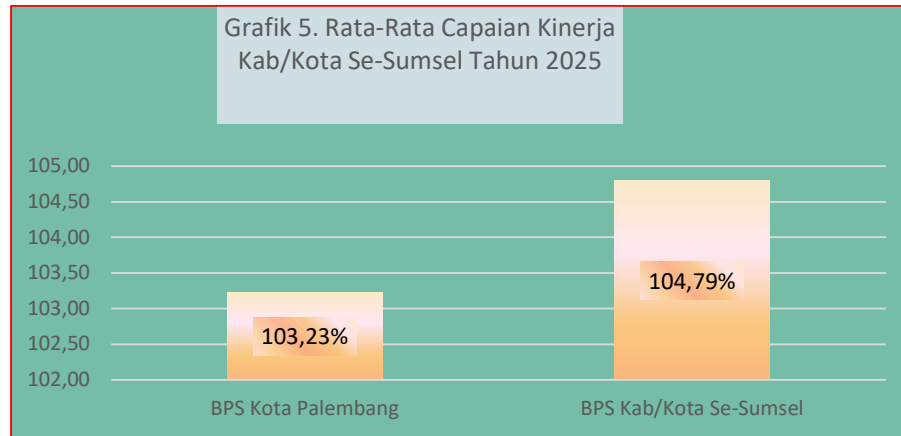
1. Penguatan kualitas indikator kinerja, khususnya indikator outcome dan impact, agar capaian kinerja tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan.
2. Peningkatan konsistensi pengukuran kinerja, melalui penyempurnaan metodologi pengukuran dan validitas data kinerja, sehingga hasil pengukuran lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, baik hasil evaluasi internal maupun eksternal, sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.
4. Penguatan peran pimpinan dalam pengendalian kinerja, termasuk monitoring berkala terhadap capaian PK, agar potensi deviasi kinerja dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan capaian PKO pada periode selanjutnya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya sehingga selaras dengan tujuan utama Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024, yaitu terwujudnya kinerja organisasi pemerintah yang berorientasi hasil, akuntabel, dan berdampak.

3.1.3. Benchmarking Capaian Kinerja BPS Kota Palembang terhadap Rata-Rata Capaian Kinerja se Sumatera Selatan Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja BPS Kota Palembang pada Tahun 2025 yaitu sebesar 103,23 persen, sedangkan rata-rata capaian kinerja Kab/Kota se

Sumatera Selatan mencapai 104,79 persen. Dengan demikian, capaian BPS Kota Palembang berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sekitar 1,56 poin persentase.



Meskipun berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, capaian kinerja 103,23 persen tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan (di atas 100 persen). Hal ini berarti sebagian besar indikator kinerja yang direncanakan telah terealisasi secara optimal, bahkan melebihi sasaran yang ditentukan. Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti variasi bobot indikator, kompleksitas kegiatan statistik di masing-masing daerah, serta adanya beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki capaian sangat tinggi sehingga mendorong rata-rata provinsi meningkat.

Sebagai ibu kota provinsi, beban kerja dan dinamika kegiatan statistik di Kota Palembang juga memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi koordinasi sektoral, kebutuhan data yang lebih kompleks, maupun intensitas pelayanan publik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, selisih capaian yang relatif kecil tersebut tidak mencerminkan kinerja yang kurang baik, melainkan menunjukkan adanya ruang peningkatan agar capaian kinerja BPS Kota Palembang dapat sejajar atau bahkan melampaui rata-rata provinsi di masa mendatang.

Upaya peningkatan capaian kinerja dapat dilakukan melalui penguatan kualitas, kuantitas, dan diseminasi produk statistik secara terencana dan berkelanjutan. Dari sisi kualitas, perlu dilakukan peningkatan ketepatan waktu rilis, konsistensi metodologi, serta penyajian analisis yang lebih mendalam dan

kontekstual sehingga data yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengambil kebijakan. Dari sisi kuantitas, dapat dilakukan penambahan jumlah publikasi dan laporan tematik yang relevan, termasuk ragam Berita Resmi Statistik (BRS) agar cakupan indikator yang dirilis semakin luas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna data. Sementara itu, dari sisi diseminasi, perlu dikembangkan infografis yang lebih menarik, ringkas, dan mudah dipahami, serta dioptimalkan pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan publikasi. Dengan langkah yang terstruktur tersebut, produk statistik akan semakin bermanfaat, mudah diakses, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

3.1.4. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran pada tahun 2023–2025 belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan indikator kinerja yang digunakan pada masing-masing tahun. Pada periode tahun 2020–2024, pengukuran kinerja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, sedangkan pada tahun 2025 pengukuran kinerja telah menggunakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Perubahan Renstra tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan sasaran dan indikator kinerja, sehingga tidak seluruh indikator dapat dibandingkan secara langsung antarperiode.

Tabel 14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)		100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100
Sasaran 2. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas										

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 3. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 4. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 5. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas										
Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 6. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas										
Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 7. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 8. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 9. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Sasaran 10. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas										
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100		N/A (Belum dijadikan indikator)	100	

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100
Sasaran 11. Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah										
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		80	N/A (Belum dijadikan indikator)		94,58	N/A (Belum dijadikan indikator)		118,23
Sasaran 12. Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS										
Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)		3,33	N/A (Belum dijadikan indikator)		4.26	N/A (Belum dijadikan indikator)		120
Sasaran 13. Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota										
Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Poin	71	75	74,16	74,75	74,15	74,60	105,28	98,87	100,59
Indeks Implementasi BerAKHLAK	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)		68,84	N/A (Belum dijadikan indikator)		73,2	N/A (Belum dijadikan indikator)		112,89

*)Target 2025 diambil dari target PK terakhir

Dari seluruh indikator kinerja yang ada, hanya indikator Nilai SAKIP oleh Inspektorat yang memiliki kesesuaian dan konsistensi indikator pada periode 2023–2025, sehingga indikator tersebut dapat dijadikan dasar perbandingan kinerja antar-tahun.

Pada tahun 2023, capaian kinerja Nilai SAKIP mencapai 105,28 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi kinerja tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar 98,87 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian kinerja mengalami penurunan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori baik karena realisasi kinerja hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, capaian kinerja Nilai SAKIP mencapai 100,59 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja menunjukkan peningkatan dan telah kembali memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Nilai SAKIP selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada pada tingkat kinerja yang baik, dengan capaian yang pada umumnya telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan

3.1.5. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama, yaitu menyediakan data Statistik berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, diarahkan untuk memastikan tersedianya data statistik yang akurat, mutakhir, relevan, dan dapat dipercaya, serta dilengkapi dengan insight yang bernilai tambah. Tujuan ini didukung oleh 10 sasaran strategis yang mencakup :

1. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas
2. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas
3. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas
4. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas
5. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Berkualitas
6. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri Yang Berkualitas
7. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Distribusi Yang Berkualitas
8. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Harga Yang Berkualitas
9. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata Yang Berkualitas
10. Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Lintas Sektor Yang Berkualitas

Tabel 15. Capaian Kinerja Tujuan Kesatu BPS Kota Palembang Tahun 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
T. 1.	Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan				
1.1.1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.1.1.1.	Persentase Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas				
1.1.3.	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.1.3.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas				
1.1.5.	Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.1.5.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas				
1.2.1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.2.1.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas				
1.2.2.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.2.2.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas				
1.2.3.	Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.2.3.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas				
1.3.1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.3.1.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas				
1.3.3.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.3.3.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas				
1.3.5.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.3.5.1.	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas				
1.4.1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.4.1.1.	Persentase Publikasi/ Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas				
1.4.1.2.	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	100	100	100
1.4.1.3.	Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	100	100	100

**Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik
Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas**
**Indikator Kinerja : Persentase Persentase Publikasi/Laporan Statistik
Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas**

Publikasi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 (berkategori minimal Baik) berdasarkan hasil penilaian dengan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan berkualitas adalah laporan yang di dalamnya memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Dasar Hitung :

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang dihasilkan

Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Persentase Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas dimaknai sebagai upaya berkelanjutan dalam menghasilkan data serta analisis statistik di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan insight yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada penyajian angka, tetapi juga mencakup analisis yang komprehensif, interpretasi yang tepat, serta penyajian informasi yang mudah dipahami oleh pengguna data. Melalui penyediaan statistik yang berkualitas, diharapkan kebutuhan data bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dalam rangka mendukung perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, evaluasi program, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Sasaran strategis ini juga menekankan pentingnya penerapan standar metodologi statistik, ketepatan waktu publikasi, serta peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan data, sehingga statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang dihasilkan mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan

Terdapat tiga publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, yaitu :

1. Laporan Kegiatan SUPAS 2025 BPS Kota Palembang
2. Laporan Kegiatan Sakernas Tahun 2025

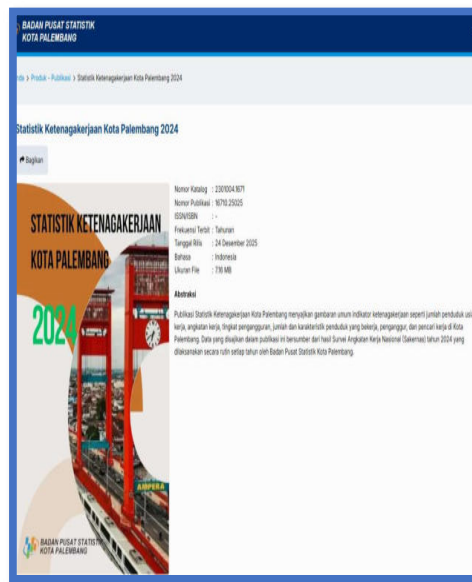
3. Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2025

Ketiga publikasi/laporan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, meliputi ketepatan penerapan metodologi, kelengkapan serta konsistensi data, dan kejelasan dalam analisis maupun penyajian informasi. Dengan demikian, publikasi yang dihasilkan mampu mendukung ketersediaan data dan insight statistik di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan secara optimal.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh laporan yang disusun sepanjang tahun berjalan telah memenuhi prinsip akurasi, validitas, dan ketepatan waktu sebagaimana diatur dalam kerangka penjaminan kualitas. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan prosedur operasional standar yang dilaksanakan secara disiplin, mulai dari tahapan pengumpulan data di lapangan hingga proses pengolahan dan diseminasi. Hal ini menjadi bukti komitmen BPS Kota Palembang dalam menghadirkan data yang kredibel dan dapat diandalkan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 berhasil mencapai 100 persen dengan nilai akhir capaian PK sebesar 90 persen.

Gambar 3. Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas





Proses penyusunan publikasi dan laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, rekrutmen dan pelatihan petugas, updating dan pendataan lapangan, pengolahan dan validasi data, hingga penyusunan serta diseminasi publikasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menghadapi beberapa kendala yang memerlukan upaya penanganan dan tindak lanjut secara berkelanjutan.

Kendala :

1. Terjadi kelangkaan petugas berpengalaman karena berbenturan dengan jadwal survei lain (Wilkerstat, IMK, SMBG). Akibatnya, rekrutmen banyak menysasar petugas baru dari web SOBAT BPS yang belum familiar dengan lapangan.
2. Ketidakkonsistenan penggunaan email petugas (berbeda dengan yang terdaftar di mitra.bps.go.id) menghambat proses sinkronisasi sistem.
3. Dominasi pelatihan daring (Zoom) dan durasi yang singkat (campuran online/offline) dinilai kurang maksimal.
4. Instruktur Daerah (Inda) kesulitan memantau tingkat pemahaman petugas baru secara langsung, yang berdampak pada penguasaan materi lapangan yang tidak utuh

5. Sering terjadi *error* dan perbaikan aplikasi yang menghambat alokasi petugas serta proses pemutakhiran
6. Petugas cenderung menunda pengiriman data (*submit*) dan memilih menumpuk draf terlebih dahulu, yang berisiko pada pelaporan progres secara *real-time*.
7. Banyaknya rumah tangga yang pindah setelah *updating/listing* serta adanya penolakan dari responden (*non-respon*) tanpa adanya penggantian sampel.
8. Ditemukan SLS dengan muatan berlebih (>240 KK), sehingga memerlukan prosedur tambahan untuk pembentukan Sub-SLS baru
9. Terdeteksi banyaknya anomali pada hasil pendataan lapangan, baik pada survei SUPAS 2025 maupun Sakernas (Agustus & November)
10. Pada akhir tahun (TW IV), ketiadaan pelatihan formal (hanya *briefing* singkat) berkontribusi pada masih ditemukannya data yang anomali.

Solusi :

1. Melakukan penilaian petugas melalui manajemen-mitra.bps.go.id untuk menilai hasil kerja dan mendapatkan petugas lapangan yang berkualitas.
2. Melakukan Monitoring perbaikan anomali data hasil pendataan lapangan
3. Proaktif mengurus perizinan resmi (Surat Izin Masuk) ke instansi terkait (seperti KODIM) untuk akses pendataan di kompleks militer.
4. Mewajibkan petugas melakukan *backup* aplikasi secara rutin dan Instruksi tegas kepada PPL untuk mengirimkan data segera setelah menyelesaikan satu rumah tangga (tidak menumpuk data).
5. Sinkronisasi administrasi email petugas agar sesuai dengan data pada mitra.bps.go.id
6. Melaksanakan monitoring progres secara mingguan untuk mendeteksi kendala lapangan lebih dini.
7. Penertiban administrasi lapangan melalui pembuatan Berita Acara (BA) bagi responden yang berstatus *non-respon* (pindah setelah *listing*)
8. Melakukan seleksi awal melalui tahap wawancara untuk mengukur kesiapan, dedikasi, dan kemauan kuat calon petugas Sakernas Agustus, guna meminimalisir petugas yang kurang berkomitmen.

9. Memaksimalkan metode *role playing* (simulasi pendataan) saat pelatihan agar petugas lebih siap menghadapi situasi nyata.
10. Mengoptimalkan peran OML (Organisatoris/Instruktur) dalam membimbing PPL yang baru pertama kali bergabung agar cepat beradaptasi dengan alur kerja BPS.
11. Memaksimalkan koordinasi antara PPL dan PML untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki data yang terdeteksi anomali, baik pada hasil SUPAS 2025 maupun Sakernas (Agustus & November).
12. Melakukan penyegaran (*refreshing*) dan *briefing* yang difokuskan pada pembahasan permasalahan atau kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya agar tidak terulang kembali di akhir tahun.
13. Melanjutkan penertiban administrasi dengan pembuatan Berita Acara (BA) bagi rumah tangga yang menolak didata maupun yang pindah, guna memastikan status sampel tercatat secara akurat

Tindak lanjut yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kualitas dan cakupan pendataan melalui penguatan koordinasi, pengawasan, serta pengendalian mutu lapangan. Peningkatan *response rate* dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif antara petugas dengan Ketua SLS dan tokoh masyarakat setempat, serta pemberian perhatian khusus terhadap penduduk yang tinggal di kontrakan atau bedeng untuk meminimalkan potensi nonrespon. Untuk mendukung kelancaran proses pendataan, dilakukan penguatan pemahaman penggunaan aplikasi FASIH, penegasan penggunaan email resmi dalam pendataan biodata petugas, serta kewajiban melakukan *backup* data secara berkala guna mencegah kehilangan data.

Dalam menghadapi perubahan kondisi lapangan, dilakukan penyesuaian wilayah kerja melalui pembentukan Sub SLS baru yang telah dilaporkan kepada BPS Provinsi dan BPS RI. Peran PML dan Ketua Tim dioptimalkan melalui pengawasan, pendampingan, serta monitoring progres pendataan secara mingguan, termasuk penerapan sistem 35 sebagai alat kendali capaian lapangan. Selain itu, penguatan pemahaman konsep oleh PPL terus dilakukan agar pelaksanaan pendataan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Untuk mengatasi temuan data anomali pada kegiatan seperti SUPAS 2025 dan Sakernas Agustus 2025, dilakukan monitoring dan perbaikan data secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran PPL dan PML. Proses rekrutmen petugas diperketat melalui seleksi awal berbasis wawancara guna memastikan kesiapan dan komitmen, serta pelatihan diperkuat melalui metode *role playing* dan pendampingan langsung di lapangan. Terhadap rumah tangga nonrespon karena pindah atau menolak, disusun Berita Acara sebagai bentuk dokumentasi administrasi. Seluruh rangkaian tindak lanjut tersebut disertai evaluasi kinerja petugas secara berkala guna memastikan peningkatan kualitas data dan kinerja kegiatan statistik secara keseluruhan.

Gambar 4. Pengawasan Pendataan Lapangan Sakernas



Rekomendasi yang dilakukan untuk tahun 2026 yaitu :

1. Penilaian Petugas
Melakukan penilaian kinerja petugas lapangan dan petugas pengolah melalui aplikasi *manajemen-mitra.bps.go.id* untuk menilai hasil kerja dan memastikan tersedianya petugas lapangan yang berkualitas.
2. Monitoring Perbaikan Data
Melaksanakan monitoring secara berkelanjutan terhadap perbaikan anomali data hasil pendataan lapangan guna menjamin konsistensi dan akurasi data.

Melalui tahapan tersebut, seluruh proses penyusunan publikasi dan laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Publikasi dan laporan yang dihasilkan telah melalui tahapan

pengolahan, validasi, dan analisis data sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas

Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menghasilkan publikasi dan/atau laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana output statistik yang dihasilkan telah memenuhi aspek kualitas data, relevansi, serta pemanfaatannya oleh pengguna data.

Dasar Hitung :

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas

Y = Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data hasil kegiatan statistik di bidang kesejahteraan rakyat dan telah memenuhi standar kualitas data, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Domain Kualitas Data dan Indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal sebesar 2,6 atau berada pada kategori Baik, berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Sementara itu, laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas merupakan laporan yang memuat gambaran pelaksanaan

kegiatan statistik kesejahteraan rakyat, mencakup tahapan kegiatan, kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilaksanakan, serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Penyusunan Publikasi atau Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pola konsumsi rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Palembang menerapkan standar penjaminan mutu yang ketat pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses pengumpulan data melalui survei rumah tangga hingga tahapan pengolahan dan analisis secara komprehensif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya sahih secara statistik, tetapi juga relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan manusia yang tepat sasaran di Kota Palembang.

Capaian kinerja indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menerapkan prinsip kualitas statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian dan diseminasi data. Dengan tercapainya persentase publikasi dan laporan yang berkualitas, diharapkan informasi statistik kesejahteraan rakyat yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Tabel 17. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Target indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas sebesar 100 persen diletakkan pada Triwulan IV 2025 dan bernilai nol pada Triwulan I s.d III 2025 dikarenakan belum

adanya kepastian terkait jadwal pelaksanaan Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) 2025. Pada bulan Oktober 2025 telah terbit Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai rujukan dalam penghitungan realisasi kinerja Triwulan III dan IV Tahun 2025.

Target publikasi dan laporan yang termasuk indikator ini adalah:

1. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2025
2. Laporan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang
3. BRS Profil Kemiskinan di Kota Palembang 2025

Gambar 5. Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas



Ketiga publikasi dan laporan tersebut telah berhasil diterbitkan pada bulan November dan Desember 2025. Dengan demikian, realisasi ini telah memenuhi

FRA yang ditetapkan pada Triwulan IV 2025, dengan capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100 persen serta nilai akhir capaian PK sebesar 90 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh publikasi, termasuk hasil survei sosial ekonomi yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kondisi perumahan, telah disusun melalui proses pengendalian mutu yang terstandar, sistematis, dan komprehensif.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan proses validasi data serta analisis yang konsisten dan mendalam, sehingga informasi yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara objektif. BPS Kota Palembang memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi standar metadata dan klasifikasi statistik yang berlaku. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata dalam menyediakan data yang andal sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Palembang.

Gambar 6. Screen shoot Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang di website



Proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis serta diseminasi dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadapi sejumlah kendala dan memerlukan upaya penanganan serta tindak lanjut secara berkelanjutan.

Kendala :

1. Terjadi kendala dalam rekrutmen karena petugas berpengalaman tidak terdaftar dalam Kepka Mitra 2025 atau sudah terikat kegiatan lain (Sakernas/Podes). Hal ini memaksa keterlibatan banyak petugas baru di hampir setiap triwulan.
2. Pelatihan lebih banyak dilakukan secara daring (Zoom) atau hanya dalam bentuk rapat persiapan singkat (1 hari), padahal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan seperti penggabungan modul kuesioner pada TW III.
3. Sepanjang tahun (TW I - TW IV), tidak ada pelatihan khusus bagi petugas pengolah, yang berdampak langsung pada kelancaran proses validasi data.
4. Pendataan terhambat oleh banjir dan wilayah pinggir sungai yang mengharuskan penggunaan transportasi air (perahu).
5. Terjadi kejenuhan pada responden karena adanya sampel panel.
6. Tingginya angka non-respon karena responden sulit ditemui (bepergian), pindah alamat, atau menolak didata.
7. Ketiadaan tahap pemutakhiran (updating) pada TW II, III, dan IV menyebabkan banyak sampel yang sudah pindah tetap terpilih namun tidak ditemukan.
8. Penerimaan dokumen dari lapangan ke pengolahan sering terlambat, terutama di awal jadwal atau bahkan menumpuk di akhir jadwal pengolahan. Hal ini sering disebabkan oleh proses pemeriksaan yang lambat atau menunggu sampel yang sulit ditemui.
9. Secara konsisten dari TW I hingga TW IV, masih ditemukan dokumen dengan isian yang tidak lengkap (inkonsisten) serta kualitas isian yang kurang baik, yang mengindikasikan lemahnya kontrol kualitas di tingkat lapangan.

Solusi :

1. Rekrutmen dilakukan melalui SiMitra dengan mengutamakan pengalaman dan rekomendasi PJ Kecamatan. Pada akhir tahun (TW IV), diprioritaskan PPL yang telah mengikuti kegiatan pada triwulan sebelumnya untuk menjaga kesinambungan pemahaman.
2. Memaksimalkan diskusi, tanya jawab, dan simulasi (*role playing*) untuk membahas kasus-kasus batas (*boundary cases*).
3. Mengatasi ketiadaan pelatihan pengolah formal dengan memberikan sesi *briefing* khusus bagi petugas pengolah di setiap triwulan.
4. Mengoptimalkan peran PML, Ketua Tim, dan Instruktur untuk memastikan pemahaman konsep PPL serta pelaksanaan sistem pendataan 212 di lapangan.
5. Melibatkan peran Ketua SLS dan pihak BPS Kota untuk meningkatkan *response rate*.
6. Menyediakan 3 sampel cadangan dengan prosedur penggunaan yang ketat jika sampel utama benar-benar tidak dapat didata.
7. Administrasi tertib melalui pembuatan Berita Acara Non-Respon bagi sampel yang gagal didata hingga batas akhir.
8. Mengoptimalkan alokasi anggaran daerah sulit untuk membantu petugas yang menghadapi kendala geografis (seperti wilayah perairan/sungai).
9. Melakukan koordinasi rutin antara tim lapangan dan penanggung jawab pengolahan untuk memastikan dokumen masuk tepat waktu dan menghindari penumpukan di akhir jadwal.
10. Menerapkan sistem pengembalian dokumen ke lapangan jika ditemukan isian yang tidak wajar atau tidak konsisten.
11. Melakukan entri ulang pada variabel tertentu jika terjadi perbaikan data setelah proses entri pertama selesai.
12. Melakukan pengawasan ketat mulai dari Ketua Tim hingga PML untuk memastikan kualitas isian dokumen sebelum diserahkan ke tim pengolah.

Tindak lanjut yang dilakukan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pengendalian pelaksanaan pendataan. Penilaian

petugas lapangan dan petugas pengolah dilakukan secara berkala melalui laman manajemen-mitra.bps.go.id guna memastikan kinerja yang optimal serta memperoleh mitra kerja yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, peran PML ditingkatkan dalam memperkuat pemahaman PPL melalui pelaksanaan pertemuan tim sebelum dan selama kegiatan lapangan, sehingga setiap permasalahan teknis maupun konseptual dapat segera diantisipasi dan diselesaikan.

Upaya peningkatan *response rate* juga terus dilakukan melalui koordinasi yang baik antara petugas dengan Ketua SLS serta tokoh masyarakat setempat guna mendorong partisipasi responden dan meminimalkan nonrespon. Di sisi lain, monitoring berjenjang terhadap pelaksanaan sistem 212 diterapkan secara konsisten selama pendataan lapangan sebagai bentuk pengendalian mutu dan evaluasi progres kerja. Seluruh langkah tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan semakin baik serta mendukung peningkatan capaian kinerja kegiatan statistik secara menyeluruh.

Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Melakukan penilaian kinerja petugas lapangan dan petugas pengolah secara berkelanjutan melalui aplikasi *manajemen-mitra.bps.go.id* guna memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu dilakukan peningkatan peran Pengawas Lapangan (PML) dalam memberikan pembekalan yang komprehensif kepada Petugas Pendataan Lapangan (PPL) agar pemahaman konsep dan prosedur pendataan semakin optimal.
3. Memperkuat koordinasi dengan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dan/atau tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan tingkat respons responden (*response rate*), sehingga kualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan dapat terus ditingkatkan.
4. Melaksanakan penilaian kinerja petugas pengolah data melalui **manajemen.mitra.bps.go.id** sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pengolahan data.

Gambar 7. Supervisi Pendataan Lapangan Susenas Maret 2025 oleh Kepala dan Tim Statistik Kesra BPS Kota Palembang



Dengan rangkaian solusi dan tindak lanjut yang konsisten di setiap triwulan, seluruh proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik, meskipun menghadapi kendala operasional dan administratif di lapangan, sehingga menghasilkan publikasi dan laporan yang memenuhi standar kualitas BPS.

Sasaran Strategis : Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menghasilkan Publikasi dan/atau Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana output statistik yang dihasilkan telah memenuhi aspek kualitas data, relevansi, serta tingkat pemanfaatannya oleh pengguna data, sehingga dapat mendukung kebutuhan perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.

Dasar Hitung :

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang dihasilkan

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data yang bersumber dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial serta memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data dan Indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal sebesar 2,6 atau berada pada kategori Baik, berdasarkan hasil penilaian menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS). Adapun laporan Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas adalah laporan yang memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Statistik Ketahanan Sosial, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, solusi yang telah dilakukan, serta rekomendasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Penyediaan statistik ketahanan sosial memiliki peran strategis dalam menggambarkan kondisi modal sosial, tingkat kerentanan, serta kohesi sosial di masyarakat. Sepanjang tahun 2025, BPS Kota Palembang secara konsisten menjaga kualitas dan integritas data agar tetap sesuai dengan kerangka penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan difokuskan pada ketepatan dan keandalan setiap indikator, sehingga mampu merefleksikan dinamika sosial secara objektif. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan yang kredibel dalam penyusunan kebijakan mitigasi risiko sosial serta penguatan ketahanan nasional di tingkat daerah.

Capaian kinerja indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menerapkan prinsip kualitas statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian dan diseminasi data. Dengan tercapainya persentase publikasi dan laporan yang berkualitas, diharapkan informasi statistik Ketahanan Sosial yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Tabel 18. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Target indikator kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen dan diletakkan pada Triwulan IV 2025. Pada Triwulan I sampai III 2025, nilai indikator ini adalah nol, karena belum terdapat kepastian jadwal pelaksanaan Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) 2025. Hasil Penilaian Statistik Berkualitas tersebut baru diterbitkan pada bulan September 2025, sehingga penghitungan capaian kinerja indikator dapat dilakukan pada Triwulan IV 2025.

Target publikasi dan laporan yang termasuk indikator ini adalah:

1. Laporan Statistik Ketahanan Sosial
2. Laporan Pendataan Podes

Gambar 8. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas





Kedua publikasi dan laporan tersebut berhasil diterbitkan pada bulan Desember 2025. Capaian ini sesuai dengan target FRA yang ditetapkan pada Triwulan IV 2025. Pada tahun 2025, BPS Kota Palembang menyusun 1 Laporan kegiatan pendataan Potensi Desa 2025 dan juga publikasi statistik Potensi Desa Kota Palembang. Capaian indikator kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas pada tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen dengan Nilai Akhir Capaian PK sebesar 90 persen. Dengan demikian, seluruh target publikasi dan laporan Statistik ketahanan sosial pada tahun 2025 telah berhasil dicapai sesuai dengan standar kualitas yang berlaku.

Gambar 9. Screen Shoot Statistik Potensi Desa Kota Palembang Tahun 2025 di website BPS Kota Palembang



Proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta diseminasi dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadapi sejumlah kendala yang bervariasi, sehingga diperlukan upaya penanganan dan rencana tindak lanjut yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kendala :

1. Terhambatnya suplai data dari instansi kunci seperti Polrestabes dan DPRD pada awal tahun.
2. Ditemukan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *raw data* pada beberapa tabel di tingkat daerah dengan angka yang dirilis oleh tingkat Provinsi pada akhir tahun.
3. Pengisian kuesioner Rukun Tetangga (RT) tidak lengkap karena keterlambatan laporan data dari pengurus RT setempat.
4. Pada tahap awal, banyak *output* Desa Cantik Tambahan (2021-2024) yang belum memiliki SK Agen Statistik dan infografis sebagai bukti fisik kegiatan.
5. Proses pembuatan website kelurahan mengalami kendala birokrasi (menunggu respons Kominfo) serta kesiapan konten yang masih harus disusun oleh agen statistik.
6. Hingga TW III, masih ditemukan kelurahan yang belum menyelesaikan Buku Publikasi "Kelurahan Dalam Angka 2025", serta konten website yang belum memuat informasi lengkap mengenai kegiatan Kelurahan Cantik pada akhir tahun.
7. Petugas lapangan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tugas mereka.
8. Komunikasi kurang optimal karena pelatihan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui Zoom, sehingga pemahaman teknis tidak tersampaikan secara maksimal.
9. Pada tahap akhir, penggunaan sistem CAWI mengalami kendala teknis berupa *error* dan koneksi lambat, yang memaksa petugas melakukan pengunggahan data secara berulang.

Solusi :

1. Melakukan jemput bola melalui kunjungan ulang dan reminder intensif via WhatsApp kepada PIC penerima.
2. Membuka ruang diskusi teknis dengan Korkot PKH untuk membedah kendala konsep dan definisi GC DTSEN.
3. Koordinasi aktif dengan Kelurahan Cantik untuk memastikan seluruh dokumen pendukung administrasi terlengkapi.
4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk akuisisi data fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Melakukan follow-up dan teknik probing mendalam pada pengisian kuesioner Rumah Tangga (RT) untuk menjamin validitas
6. Inisiasi penyusunan konten website kelurahan melalui koordinasi teknis dengan tim Kominfo.
7. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi strategis yang melibatkan Bappeda, Kominfo, dan Tapem Kota Palembang guna mengoptimalkan penyusunan publikasi "Kelurahan Dalam Angka".
8. Melakukan unggah ulang (re-upload) dokumen evaluasi CAWI Kelurahan Cantik untuk memastikan integritas data.
9. Melengkapi konten website Kelurahan Cantik dengan galeri kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan rekaman jejak digital.
10. Menjaga jalur komunikasi dan koordinasi pelaporan dengan BPS Provinsi melalui grup koordinasi digital (WAG).

Gambar 10. Pengawasan Pendataan Potensi Desa Tahun 2025





Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu :

1. Membuat dan menerapkan inovasi Motor Podes yang berisi mengenai monitoring kegiatan Podes mulai dari alokasi petugas, monitoring pendataan dan pemeriksaan lapangan dan anomali data Podes. Agar pendataan podes dapat berjalan dengan sesuai dengan SOP dan tepat waktu, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian petugas.
2. Follow up pendataan Statistik Polkam 2025
3. Mengikuti Pelatihan Calon Pembina Desa Cantik Tahun 2025
4. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Statistik kepada aparat kelurahan
5. Melakukan identifikasi kondisi dan potensi desa/kelurahan
6. Melakukan pemeriksaan hasil data podes 2025 terkait nilai IKG Kota Palembang
7. Melakukan rapat koordinasi hasil IKG Kota Palembang dengan pemerintah Kota Palembang
8. Menyusun tabel dan publikasi kelurahan cantik
9. Melakukan rapat koordinasi dengan kominfo membahas evaluasi dan progres output pembinaan kelurahan cantik
10. Melakukan Pengisian LKE Tindak Lanjut Desa Cantik Tahun 2022-2024
11. Melakukan Monev Penyusunan Output Kelurahan Cantik Tahun 2022-2024

Adapun rekomendasi untuk tahun 2026 adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan kominfo terkait penentuan Desa Cantik yang akan dibina pada tahun 2026
2. Melakukan penancangan dan sosialisasi Desa Cantik tahun 2026
3. Persiapan pelaksanaan kegiatan Survei Polkam tahun 2026

4. Persiapan pelaksanaan kegiatan PODES 2026

Melalui penerapan berbagai solusi serta pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan pada setiap triwulan, proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. Meskipun terdapat sejumlah kendala operasional dan administratif di lapangan, seluruh tahapan kegiatan tetap dapat diselesaikan dengan baik, sehingga publikasi dan laporan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Sasaran Strategis : Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas

Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menghasilkan Publikasi dan/atau Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana output statistik yang dihasilkan telah memenuhi aspek kualitas data, relevansi, serta tingkat pemanfaatannya oleh pengguna data dalam mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan

- Z = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas
- X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan yang berkualitas

- Y = Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dihasilkan

Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data yang bersumber dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan serta memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data dan Indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 atau berada pada kategori Baik, berdasarkan hasil penilaian menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS). Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas adalah laporan yang memuat gambaran pelaksanaan kegiatan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, upaya penyelesaian yang dilakukan, serta rekomendasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Capaian kinerja indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menerapkan prinsip kualitas statistik pada penyelenggaraan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian dan diseminasi data. Dengan tercapainya persentase publikasi dan laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas, diharapkan informasi statistik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang akan disusun pada tahun 2025 yaitu :

1. Laporan Kegiatan Statistik Hortikultura dan Perkebunan
2. Laporan Kegiatan Statistik Tanaman Pangan

Gambar 11. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas



Tabel 19. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Kedua laporan tersebut telah disusun oleh BPS Kota Palembang pada bulan Desember 2025 dan telah sesuai dengan FRA , sehingga capaian kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas sebesar 100 persen dengan Nilai Akhir Capaian PK sebesar 90 persen. Dengan demikian, seluruh target publikasi dan laporan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai sesuai dengan standar kualitas yang berlaku.

Proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis, serta diseminasi dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik guna

menghasilkan output statistik yang akurat, relevan, dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Dalam pelaksanaannya sepanjang tahun 2025, kegiatan ini menghadapi sejumlah kendala yang bervariasi, baik yang bersifat teknis lapangan maupun administratif, sehingga diperlukan upaya penanganan serta rencana tindak lanjut yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kualitas output statistik yang dihasilkan.

Kendala :

1. Curah hujan yang tinggi pada TW I dan TW IV (Desember) menjadi penghambat utama. Hal ini menyebabkan beberapa titik amatan KSA Padi tidak dapat diamati karena area pengamatan terendam banjir.
2. Adanya penambahan segmen baru di lokasi yang sulit dijangkau, seperti pulau di tengah sungai, yang meningkatkan risiko dan kesulitan transportasi bagi petugas.
3. Ditemukan subsegmen KSA Padi dengan kode 12 (Tidak dapat diakses) pada TW III, yang menghambat kelengkapan data amatan.
4. Penggunaan teknologi *Combine Harvester* oleh petani menyebabkan proses panen berlangsung sangat cepat, sehingga petugas seringkali terlewat momen untuk mendata sampel utama SKGB Pengeringan.
5. Banyak sampel utama SKGB Penggilingan yang tidak beroperasi (tutup) atau sedang tidak melakukan aktivitas penggilingan saat didatangi, sehingga data tidak dapat diambil secara optimal.
6. Tidak tercapainya target sampel petani sawit pada Blok Sensus (BS) listing terpilih pada TW II.
7. Penyerahan dokumen dari Dinas terkait (khususnya dokumen SPH) secara konsisten mengalami keterlambatan pada TW II dan TW III, yang berdampak pada *timeline* pengolahan data.
8. Responden Komoditas Strategis (Komstrat) sering berada di luar kota, sehingga jadwal pendataan sering tertunda dan melampaui batas waktu.
9. Ditemukan masalah kualitas pada data SP, di mana sering terjadi ketidaksesuaian data yang dikirim antar bulan pada TW I.

Solusi :

1. Mengatasi kendala geografis dengan menyewa perahu untuk mencapai lokasi serta menyusun Berita Acara yang dilengkapi bukti foto pendukung.
2. Melakukan verifikasi hasil pengolahan data secara langsung kepada dinas terkait.
3. Mengajukan permohonan penggantian sampel kepada BPS Pusat melalui BPS Provinsi untuk memastikan keterwakilan data.
4. Menerapkan sistem pengawasan ketat untuk menjamin perolehan data dari responden yang sulit ditemui.
5. Mengambil kebijakan menjadikan seluruh hasil *listing* sebagai sampel pada komoditas dengan populasi terbatas (petani sawit).
6. Mempercepat pengiriman dokumen SP (Palawija dan Hortikultura) melalui koordinasi intensif dengan pihak dinas via WhatsApp.
7. Melakukan *editing* kode amatan 12 (wilayah tidak dapat diakses) pada web monitoring KSA Padi disertai penyusunan Berita Acara resmi.
8. Melakukan *assignment* seluruh sampel cadangan pada survei SKGB (Pengeringan dan Penggilingan) kepada petugas guna memastikan target *response rate* terpenuhi maksimal.
9. Melanjutkan koordinasi dengan dinas terkait untuk pemenuhan dokumen SPH secara berkala.
10. Memberikan instruksi penggunaan Kode 12 bagi petugas pada titik amatan KSA Padi yang terdampak banjir (kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pengamatan fisik).

Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan sekaligus pengawasan lapangan dalam rangka penjaminan kualitas, khususnya di segmen baru hasil penggantian, karena di segmen baru ini juga terdapat pergantian petugas yg baru
2. Melakukan pengajuan penggantian beberapa segmen yang hasil amatannya kode 12 (tidak dapat diakses)

3. Melakukan koordinasi dan follow up kembali setiap bulannya agar pengumpulan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke BPS tepat waktu
4. Mengirimkan hasil evaluasi pengolahan ke PIC Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa: beberapa isian/kolom yang masih kosong, konsistensi dengan data periode sebelumnya serta kewajaran produktivitas tanaman hortikultura
5. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap responden yang sulit ditemui pada survei Komstrat yaitu :
 - a. Identifikasi Responden Sulit Ditemui oleh Petugas.
 - b. Pendampingan oleh Koordinator Lapangan. Responden yang masuk kategori "sulit" kemudian menjadi fokus pemantauan oleh koordinator lapangan, yang akan mendampingi kunjungan berikutnya serta memberikan strategi komunikasi alternatif.
6. Melakukan monitoring pendataan Survei Ubinan Padi dan Palawija Subround III Tahun 2025

Adapun rekomendasi bagi pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di BPS Kota Palembang, sebagai bahan pembelajaran dan gambaran untuk pelaksanaan kegiatan survei pada periode berikutnya, adalah sebagai berikut :

1. Menekankan kepada petugas agar memaksimalkan pengamatan KSA , kecuali daerah tersebut berbahaya bagi keselamatan
2. Hasil amatan KSA di lapangan oleh petugas sebaiknya langsung diperiksa oleh pengawas sehingga jika ada kesalahan langsung bisa dikoreksi
3. Ketersediaan alat pengukur kadar air sejumlah petugas atau bahkan lebih akan lebih membantu efektivitas pelaksanaan SKGB di lapangan.
4. Pengolah data dari Tim statistik pertanian BPS Kota Palembang langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang untuk melakukan sinkronisasi data yang akan diinput.

Melalui penerapan berbagai solusi serta pelaksanaan rencana tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan pada setiap triwulan, proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai kendala operasional dan administratif di lapangan, seluruh tahapan kegiatan tetap dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga publikasi dan laporan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas statistik dan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di sektor pertanian.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas

Capaian kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menghasilkan publikasi dan laporan statistik yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang dihasilkan yang dihasilkan

Publikasi Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan serta memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data dan Indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 atau berkategori minimal baik berdasarkan hasil penilaian menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS). Adapun laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas adalah laporan yang memuat gambaran pelaksanaan kegiatan statistik, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, serta rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Capaian kinerja indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menerapkan prinsip kualitas statistik pada penyelenggaraan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga penyajian dan diseminasi data. Dengan tercapainya persentase publikasi dan laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas, diharapkan informasi statistik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas yang akan disusun oleh BPS Kota Palembang selama tahun 2025 yaitu :

1. Laporan Kegiatan Statistik Peternakan, Perikanan, Kehutanan 2025

Tabel 20. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Laporan tersebut telah disusun oleh BPS Kota Palembang pada bulan Desember 2025 dan telah sesuai dengan target FRA. Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas mencapai 100 persen dengan Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target publikasi dan laporan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai sesuai dengan standar kualitas yang berlaku.

Gambar 12. Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas



Proses penyusunan publikasi dan laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang berkualitas pada tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis, serta diseminasi dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik guna menghasilkan output statistik yang akurat, relevan, dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sepanjang tahun 2025 masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang bervariasi, baik yang bersifat teknis lapangan maupun administratif.

Kendala :

1. Pada awal tahun, penyedia data tidak mengumpulkan data secara rinci hingga ke level harga per komoditas ikan, sehingga menyulitkan analisis harga satuan.
2. Terjadi kendala persisten pada TW II dan TW III, di mana perusahaan sektor kehutanan kurang kooperatif atau lambat dalam memberikan respon terhadap pengisian survei yang dikirimkan
3. Ditemukan adanya anomali pada hasil pencacahan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025 di TW III yang memerlukan proses verifikasi ulang.
4. Pada akhir tahun, petugas mengalami hambatan teknis saat melakukan pengisian geotag pada aplikasi FASIH, yang mengganggu kelancaran input data di lapangan.
5. Khusus untuk Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB), data dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk bulan Desember baru tersedia di saat-saat terakhir periode pencacahan. Sempitnya waktu ini menyebabkan tekanan tinggi pada proses pelaporan dan sinkronisasi data.

Solusi :

1. Mengimplementasikan Kepmen KP No. 29 Tahun 2024 sebagai acuan tunggal harga ikan untuk menjamin standarisasi dan validitas data nilai produksi perikanan.
2. Meningkatkan frekuensi koordinasi dan kunjungan ke perusahaan-perusahaan kehutanan guna meminimalkan hambatan pengisian daftar survei dan memastikan ketepatan waktu pelaporan.
3. Melanjutkan upaya koordinasi intensif ke perusahaan kehutanan untuk mempertahankan *response rate* yang tinggi.
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap data anomali hasil pencacahan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025 guna menjamin kualitas data sebelum tahap finalisasi.
5. Melaksanakan pemutakhiran data spasial melalui proses *geotagging* pada lokasi Kantor BPS Kota Palembang untuk keperluan pemetaan aset dan koordinasi wilayah.

Tindak Lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan Laporan PP TPI Triwulan 1 Tahun 2025 ke Satuan PSDKP Palembang
2. Melakukan follow up kembali setiap bulannya terkait ketersediaan data pemotongan hewan ternak agar dapat dilakukan pencacahan tepat waktu (tgl 1-7 setiap bulannya)
3. Melakukan Pendekatan Ke Dinas Kehutanan Propinsi bersama sama dengan ketua TIM yang membidangi Survey Kehutanan di BPS Propinsi
4. Melakukan Revisit ke Perusahaan bersama sama dengan ketua Tim yang membidangi Statistik Kehutanan di BPS Provinsi Sumatera Selatan
5. Melakukan monitoring perbaikan data Anomali hasil pencacahan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025

Adapun rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) Tahun 2025 di BPS Kota Palembang sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan survei pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan follow up kembali setiap bulannya terkait ketersediaan data pemotongan hewan ternak agar dapat dilakukan pencacahan tepat waktu (tgl 1-7 setiap bulannya).

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Sasaran Strategis : Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas**Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas**

Capaian kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas menunjukkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menghasilkan publikasi dan laporan statistik yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Industri yang dihasilkan

Publikasi Statistik Industri yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Statistik Industri dan memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data serta Indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal sebesar 2,6 atau berkategori minimal *Baik*, berdasarkan hasil penilaian menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Adapun Laporan Statistik Industri yang berkualitas adalah laporan yang memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Statistik Industri, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, serta rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan pada masa mendatang.

Capaian kinerja indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menerapkan prinsip kualitas statistik pada penyelenggaraan Statistik Industri, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga penyajian dan diseminasi data. Dengan tercapainya persentase publikasi dan laporan Statistik Industri yang berkualitas, diharapkan informasi statistik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor industri.

Adapun Laporan Statistik Industri yang Berkualitas yang akan disusun oleh BPS Kota Palembang selama tahun 2025 meliputi:

1. Laporan Statistik Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi Tahun 2025.
2. Laporan Kegiatan Statistik Industri.

Target Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas ditetapkan sebesar 100 persen pada Triwulan IV Tahun 2025. Sementara itu, pada Triwulan I hingga Triwulan III Tahun 2025 target indikator tersebut ditetapkan sebesar 0 persen. Penetapan ini didasarkan pada belum adanya kepastian jadwal pelaksanaan Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III. Mengingat hasil Penilaian Statistik Berkualitas baru diterbitkan pada bulan September 2025.

Tabel 21. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Kedua laporan tersebut telah diterbitkan oleh BPS Kota Palembang pada bulan Desember 2025 dan telah sesuai dengan FRA yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas mencapai 100 persen, dengan nilai akhir capaian PK sebesar 90 persen.

Gambar 13. Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas



Pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Industri yang berkualitas pada tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, serta diseminasi dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik, sehingga output statistik yang dihasilkan memenuhi aspek akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan keterbandingan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas pada tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Statistik Industri tahun 2025, BPS Kota Palembang menghadapi sejumlah permasalahan yaitu :

1. Secara konsisten dari TW I hingga TW III, perusahaan (terutama pada survei Industri Bulanan/IBS) tidak bersedia memberikan informasi detail mengenai harga satuan komoditas.
2. Perusahaan mulai menolak didata dengan alasan telah mengisi banyak survei lain dari BPS (seperti Survei Tahunan), sehingga mereka meminta penundaan waktu atau menolak menjadi responden STPIM.

3. Ditemukan banyak kasus perusahaan pada survei SKTR dan SKTH yang alamatnya tidak ditemukan (pindah lokasi) atau data alamat belum diperbarui.
4. Ditemukan kesalahan berulang pada TW I dan TW III di mana petugas salah dalam mengisi KBLI 2 digit pada saat proses listing IMK Tahunan.
5. Terdeteksi adanya data anomali pada hasil pencacahan Survei IMK Tahunan 2025 di TW III yang memerlukan validasi ulang.
6. Banyaknya sampel perusahaan (baik konstruksi maupun industri) yang ditemukan sudah tutup atau tidak beroperasi lagi, baik secara permanen maupun sementara.
7. Pada TW II, pelaksanaan survei IMK Tahunan terhambat karena tidak tersedianya anggaran khusus untuk melakukan *briefing* petugas, yang berisiko pada penurunan kualitas pemahaman petugas di lapangan

Solusi :

1. Menggunakan pendekatan harga (*proxy*) dari produk dengan spesifikasi serupa di perusahaan lain untuk mengatasi kendala ketidakterseediaan data harga spesifik.
2. Melakukan verifikasi status perusahaan (tutup/pindah) dan mengajukan penggantian sampel sesuai mekanisme resmi untuk menjaga validitas target survei.
3. Menerapkan kebijakan *reject* data yang tidak sesuai untuk segera diperbaiki oleh petugas lapangan guna menjaga integritas data awal.
4. Berkoordinasi aktif dengan PPK untuk menemukan solusi alternatif agar pembekalan petugas tetap berjalan efektif di tengah kendala yang ada.
5. Mengatasi perusahaan yang enggan memberikan harga satuan dengan mengambil referensi harga dari perusahaan kompetitor yang memproduksi barang sejenis.
6. Mengajukan usulan penggantian sampel secara resmi bagi perusahaan yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk menjamin akurasi survei.
7. Melakukan pengawasan intensif terhadap data *listing* IMK Tahunan melalui *FASIH Dashboard* sebelum tahap penarikan sampel untuk memastikan kelengkapan populasi.

8. Mengidentifikasi dan memperbaiki hasil pencacahan Survei IMK Tahunan 2025 yang terdeteksi anomali.
9. Melaksanakan kunjungan ulang (*revisit*) secara berjenjang kepada perusahaan yang sulit ditemui guna meningkatkan *response rate*.
10. Memberikan pendampingan langsung kepada petugas di lapangan untuk melakukan pendekatan khusus kepada perusahaan yang diidentifikasi menolak atau tetap berstatus *non-response*.

Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu :

1. Melakukan evaluasi hasil pendataan IMK Triwulan 1 2025
2. Assignment FASIH DPA dan Petugas segera melakukan pendataan DPA
3. Alokasi sampel STPIM dan petugas segera melakukan pendataan STPIM
4. Melakukan penggantian sampel responden yang non respon dengan menggunakan daftar sampel pengganti yang sudah disiapkan
5. Bila sampel tidak tersedia dapat dilakukan dengan mencari sampel purposive dan diajukan ke KCI melalui BPS Provinsi Sumsel
6. Berkoordinasi dengan PPK Supaya Untuk Kedepannya dapat diusulkan mendapatkan anggaran khusus Briefing IMK Baik Tahunan maupun Triwulanan
7. Sebagai tindak lanjut atas ditemukannya perusahaan yang tidak dapat disurvei karena tutup atau tidak ditemukan alamatnya dalam kegiatan Survei SKTR Triwulanan dan SKTH, BPS Kota Palembang telah melakukan langkah Penginputan dan Pelaporan melalui FASIH. Daftar perusahaan bermasalah tersebut telah dilaporkan dan diajukan pengantiannya melalui admin FASIH, sesuai prosedur yang ditetapkan. Admin telah mengunggah data tersebut ke sistem untuk proses verifikasi.
8. Melakukan monitoring perbaikan data Anomali hasil pencacahan Survei IMK Tahunan 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan publikasi dan laporan Statistik Industri pada tahun 2026, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan dinas terkait (DPMPTSP) untuk memudahkan dalam pelaksanaan lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Industri yang berkualitas pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan telah ditangani melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Statistik Industri pada tahun 2026. Dengan peningkatan koordinasi, penguatan pengendalian kualitas data, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pendukung, diharapkan kualitas publikasi dan laporan Statistik Industri yang dihasilkan semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengguna data.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas

Indikator Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja dalam memenuhi standar kualitas publikasi dan/atau laporan Statistik Distribusi.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang dihasilkan

Publikasi Statistik Distribusi yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Statistik Distribusi yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 (berkategori minimal Baik) berdasarkan hasil penilaian dengan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS). Laporan Statistik Distribusi berkualitas adalah laporan yang di dalamnya memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Statistik Distribusi, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun target penyusunan laporan statistik berkualitas di BPS Kota Palembang Tahun 2025 mencakup dua laporan yaitu:

1. Laporan Kegiatan Statistik Distribusi Tahun 2025, yang memuat data dan analisis terkait perdagangan, transportasi, pariwisata, serta berbagai layanan lainnya. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika arus barang, pergerakan harga di pasar, dan perkembangan sektor jasa yang menjadi penunjang utama pertumbuhan ekonomi kota Palembang.
2. Laporan Hasil Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi Lanjutan dan Pemutakhiran SBR Tahun 2025, yang menyajikan pembaruan informasi mengenai profil usaha, jumlah perusahaan, serta aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah kota. Laporan ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, pengambilan kebijakan, dan evaluasi perkembangan sektor usaha di tingkat lokal.

Kedua laporan tersebut telah disusun oleh tim Statistik Distribusi pada bulan Desember 2025 dan telah sesuai FRA Tahun 2025. Sehingga capaian kinerja indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas sebesar 100 persen dengan nilai akhir capaian PK sebesar 90 persen.

Gambar 14. Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas



Tabel 22. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik distribusi yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik distribusi yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Distribusi yang berkualitas pada tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Seluruh tahapan dilakukan secara terintegrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik, sehingga output yang dihasilkan memenuhi aspek akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan keterbandingan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam proses pencapaiannya terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan tindak

lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Kendala

1. Adanya perubahan format pelaporan data secara internal oleh PT Pelindo menyebabkan ketidaksesuaian jadwal penyerahan data dengan *timeline* BPS.
2. Pendataan melalui aplikasi SIMOPEL mengalami kendala serius. Petugas harus menunggu proses konsolidasi dan revisi data *traffic* dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan keterlambatan (data telat) hingga akhir tahun.
3. Masalah krusial muncul secara berulang pada TW II, di mana tidak tersedianya anggaran khusus untuk melakukan kegiatan *briefing* petugas. Hal ini berisiko menurunkan pemahaman petugas terhadap kuesioner dan standar operasional prosedur di lapangan.
4. Masih ditemukan kendala pada TW II terkait ketidakjelasan alamat keberadaan responden, yang mengakibatkan petugas sulit melakukan pelacakan dan pendataan tepat waktu
5. Kegiatan Profiling Mandiri pada TW I tercatat belum mencapai target kuantitas yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau instansi pusat

Solusi

1. Melaporkan perkembangan serta menjalin komunikasi langsung dengan pimpinan PT Pelindo dan BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk kelancaran pendataan.
2. Berkoordinasi aktif dengan tingkat provinsi guna penyelesaian masalah otentikasi (akun yang tidak bisa *login*).
3. Menyusun Matriks Alokasi Beban Kerja yang didistribusikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan pemutakhiran (*updating*) direktori secara mandiri dan kolektif.
4. Melakukan verifikasi lapangan yang ketat dan memproses penggantian sampel sesuai mekanisme resmi untuk menjaga validitas data.

5. Melakukan koordinasi strategis dengan KPA, PPK, dan Kasubbag Umum untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran kegiatan briefing petugas
6. Melaporkan kendala lapangan ke BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan sampel pengganti dan melakukan penyesuaian sampel secara *purposive* agar target tetap terpenuhi.
7. Melakukan koordinasi intensif dengan otoritas pelabuhan guna mendapatkan akses dan ekstraksi Data Simopel (Sistem Informasi Monitor Pelabuhan) sebagai bahan penguatan data statistik.
8. Menjaga konsistensi koordinasi dengan pihak pelabuhan untuk memastikan ketersediaan data Simopel secara berkelanjutan hingga akhir periode pelaporan

Tindak Lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Mengunjungi langsung bersama petugas ke Pimpinan pihak PT Pelindo - Melakukan briefing kesemua pegawai menjelaskan tata cara updating direktori perusahaan (Profiling mandiri) sensus ekonomi 2025
2. Melakukan monitoring evaluasi secara berkala dan mengakomodir daftar sampel *purposive* untuk penggantian sampel yang non respon
3. Membuat link form untuk pengajuan pergantian sampel
4. Koordinasi yang dilakukan secara intensif dan terarah membuahkan hasil positif, di mana pihak pelabuhan memberikan respon yang baik sehingga data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan dengan tepat waktu.

Rekomendasi yang akan dilakukan pada tahun 2026 :

Koordinasi secara berkala dengan pihak pelabuhan terkait progres revisi dan konsolidasi data traffic SIMOPEL.

Dengan diterapkannya solusi dan tindak lanjut tersebut, BPS Kota Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan Statistik Distribusi. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memastikan data yang dihasilkan akurat, relevan, dan tepat waktu.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas**Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas**

Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menghasilkan publikasi dan/atau laporan Statistik Harga yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana output statistik yang dihasilkan telah memenuhi aspek kualitas data, relevansi, serta tingkat pemanfaatannya oleh pengguna data dalam mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika harga.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Harga yang dihasilkan

Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas merupakan perbandingan antara jumlah publikasi dan/atau laporan Statistik Harga yang memenuhi kriteria kualitas dengan seluruh publikasi dan/atau laporan Statistik Harga yang dihasilkan oleh satuan kerja dalam periode pelaporan. Publikasi merupakan produk BPS yang memuat data hasil kegiatan statistik, baik dalam bentuk buku maupun nonbuku, sedangkan laporan adalah penyampaian informasi secara tertulis yang bertujuan memberikan gambaran, evaluasi, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan statistik. Dalam hal estimasi data Statistik Harga

tidak dapat disajikan hingga level satuan kerja (BPS Provinsi dan/atau BPS Kabupaten/Kota), maka output yang dihasilkan berupa laporan. Publikasi Statistik Harga yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Statistik Harga dan memiliki nilai Indeks Domain Kualitas Data serta Indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 atau berkategori minimal baik berdasarkan hasil penilaian menggunakan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS). Adapun laporan Statistik Harga yang berkualitas adalah laporan yang memuat gambaran pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan Statistik Harga pada periode selanjutnya.

Adapun target publikasi/laporan statistik harga yang berkualitas BPS Kota Palembang Tahun 2025 terdiri dari :

1. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2024
2. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2025
3. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2025
4. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Maret 2025
5. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen April 2025
6. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Mei 2025
7. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Juni 2025
8. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Juli 2025
9. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Agustus 2025
10. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen September 2025
11. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Oktober 2025
12. BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen November 2025
13. Laporan Statistik Harga 2025
14. Laporan Inflasi Kota Palembang Januari – Desember 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang telah secara rutin mengunggah Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi setiap awal bulan, mulai Desember 2024 hingga November 2025. Namun demikian, hingga Triwulan II 2025 data BRS tersebut belum dapat dimasukkan dalam realisasi FRA karena belum diterbitkannya keputusan terkait Penilaian Statistik Berkualitas (PSB). Pada bulan Oktober 2025 telah terbit Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-

600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai rujukan dalam penghitungan realisasi kinerja Triwulan III dan IV Tahun 2025. Dengan telah diterbitkannya hasil PSB tersebut, BRS Inflasi dapat dimasukkan sebagai bagian dari realisasi FRA Triwulan IV Tahun 2025, dan didukung dengan telah diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Statistik Harga serta Laporan Inflasi Kota Palembang Januari–Desember 2025, sehingga realisasi IKU Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas pada Tahun 2025 dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian kinerja 100 persen dan nilai akhir capaian PK sebesar 90 persen.

Tabel 23. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik harga yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	64,29	100	0	0	64,29	100

Gambar 15. Publikasi/Laporan Statistik harga yang Berkualitas





Pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Harga pada tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta diseminasi dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik, sehingga output statistik yang dihasilkan memenuhi aspek akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan keterbandingan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas pada tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan

tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Kendala

1. Perubahan metode dari PAPI (kertas) ke CAPI (digital) pada survei SVPEB (TW I) dan SVK (TW III) memerlukan penyesuaian teknis bagi petugas lapangan.
2. Penyebaran data inflasi melalui unduhan file BRS di website dirasa kurang efektif karena ukuran file yang besar (TW I). Terdapat kebutuhan mendesak dari *stakeholder* akan informasi angka inflasi yang lebih cepat, ringkas, dan mudah diakses (TW IV).
3. Masih ditemukan kurangnya pemahaman petugas mengenai konsep dan definisi (Kondef) yang memengaruhi kualitas input data awal.
4. Mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Cinde menyebabkan berkurangnya pedagang aktif, sehingga lokasi tersebut tidak lagi representatif atau memungkinkan untuk dijadikan tempat pencacahan (TW I).
5. Tingginya angka non-respon pada sampel utama perusahaan di DSPU (TW I).
6. Pedagang pada survei SHK mulai menolak untuk didata secara periodik (TW II).
7. Beberapa responden SHPB tidak dapat memberikan data karena komoditas terpilih sudah tidak lagi mereka perdagangkan (TW II & TW III).
8. Ditemukan ketidaksesuaian hasil pencacahan SHKK dengan spesifikasi teknis yang ditentukan (TW II). Selain itu, komoditas pada SHMP harus memenuhi standar *International Comparison Program* (ICP).
9. Diperlukan upaya ekstra melalui rekonsiliasi data harga secara periodik (HK, HP, HPB) pada TW III untuk menjaga kualitas data
10. Masih ditemukan kesalahan pencantuman KBLI pada daftar sampel awal.
11. Terjadi penumpukan pemasukan dokumen di akhir batas waktu pencacahan, khususnya pada Survei HPS (TW II) dan Survei Harga Produsen (TW III)

Solusi

1. Mengikuti internalisasi SVPEB-2025 dan merencanakan *briefing* intensif bersama petugas lapangan untuk penyamaan persepsi.
2. Mengatur jadwal pencacahan pada siang hari untuk menghindari kepadatan pasar di pagi hari, serta melakukan koordinasi aktif dengan pedagang yang berpindah lokasi.
3. Mendorong penyebaran data statistik harga (inflasi) secara cepat melalui kanal media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.
4. Melakukan verifikasi, konfirmasi data kepada responden melalui petugas, serta melaksanakan prosedur penggantian sampel sesuai mekanisme resmi.
5. Memilih perusahaan sampel SHMP dengan mempertimbangkan pemenuhan komoditas ICP serta melakukan penggantian sampel secara *purposive* untuk menjamin keterwakilan data.
6. Melakukan klarifikasi spesifikasi teknis di lapangan sebagai data pendukung utama dalam pelaksanaan Rekon SHKK
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pemasukan dokumen secara rutin untuk memastikan ketepatan waktu (*timeliness*).
8. Mengikuti internalisasi SVK-2025 dan aktif dalam kegiatan rekonsiliasi data harga yang diselenggarakan oleh BPS RI guna meminimalisir disparitas data.
9. Melanjutkan pemantauan dokumen secara berkala dan melakukan penggantian sampel dengan tetap menjaga konsistensi komoditas yang setara.
10. Mengembangkan dan meluncurkan platform PAL-INSTA di Instagram BPS Kota Palembang. Inovasi ini menyajikan indikator strategis terkini, terutama angka inflasi, dalam format visual yang ringkas dan informatif bagi masyarakat Kota Palembang

Tindak Lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 :

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan solusi tersebut, pada Triwulan I dilakukan *briefing* lanjutan kepada petugas SVPEB-2025, pengembangan dan penyebarluasan inovasi PAL-INSTA, serta pengajuan penggantian sampel pasar SHK dari Pasar Cinde ke Pasar Perumnas. Selain itu, dilakukan penggantian

responden nonrespon menggunakan daftar sampel pengganti maupun secara purposive sesuai ketentuan, perbaikan KBLI pada daftar sampel, serta penguatan pemahaman konsep dan definisi melalui briefing Survei Harga Produsen.

Pada Triwulan II, tindak lanjut difokuskan pada penyusunan daftar sampel SHMP, peningkatan monitoring dan evaluasi hasil pencacahan, pelaporan penggantian sampel kepada Subject Matter, penyesuaian sampel komoditas SHKK sesuai standar, serta rotasi petugas lapangan guna menjaga kualitas hubungan dengan responden. Selanjutnya, pada Triwulan III, dilakukan internalisasi lanjutan kegiatan SVK-2025 kepada petugas lapangan, pelaksanaan rekonsiliasi data harga Kota Palembang, pelaporan penggantian sampel kepada Subject Matter, serta penguatan monitoring dan evaluasi hasil pencacahan untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan publikasi dan laporan Statistik Harga pada tahun 2026, direkomendasikan:

Penyajian informasi inflasi melalui PAL-INSTA dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal. Konten PAL-INSTA yang disajikan melalui akun media sosial Instagram BPS Kota Palembang direkomendasikan untuk dirilis tepat pada hari yang sama dengan jadwal rilis resmi inflasi BPS Kota Palembang, tanpa adanya keterlambatan hari (without time lag).

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Harga yang berkualitas pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan telah ditangani melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi dan rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Statistik Harga tahun 2026. Dengan peningkatan koordinasi, penguatan pengendalian kualitas data, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pendukung, kualitas publikasi dan laporan Statistik Harga diharapkan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengguna data.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas

Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menghasilkan publikasi dan/atau laporan yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Data yang berkualitas ini menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika ekonomi, keuangan, teknologi informasi, dan sektor pariwisata.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{x}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang dihasilkan

Publikasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 (berkategori minimal Baik) berdasarkan hasil penilaian dengan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata berkualitas adalah laporan yang di dalamnya memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, kendala yang dihadapi,

solusi yang dilakukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun target penyusunan laporan statistik berkualitas di BPS Kota Palembang Tahun 2025 mencakup tiga laporan yaitu :

1. Laporan statistik Keuangan , Laporan pelaksanaan survei statistik Lembaga keuangan yang terdiri dari koperasi simpan pinjam, valuta asing dan BUMD
2. Laporan Statistik Pariwisata, yang terdiri dari survei jasa akomodasi, Survei Penyedia Makanan dan Minuman (VREST), Survei Daya Tarik Wisata (VDTW)
3. Laporan Statistik E-Commerce, yang memuat data dan analisis terkait perdagangan elektronik di wilayah kota.

Seluruh target penyusunan laporan statistik tersebut telah diselesaikan oleh Tim Statistik Keuangan dan Tim Statistik Pariwisata BPS Kota Palembang pada bulan Desember 2025 dan telah sesuai dengan FRA BPS Kota Palembang. Dengan tersusunnya ketiga laporan tersebut, capaian kinerja indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas berhasil mencapai 100 persen, dengan Nilai Akhir Capaian Penilaian Kinerja (PK) sebesar 90 persen. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah.

Gambar 16. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas



Tabel 24. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100

Pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2025 dilakukan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, serta evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik, sehingga output statistik yang dihasilkan memenuhi aspek akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan keterbandingan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas pada tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam proses pencapaiannya masih ditemui beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Kendala

1. Terjadi efisiensi anggaran yang memaksa dilakukannya penyesuaian pada beberapa kegiatan.
2. Di tengah efisiensi anggaran, beban kerja justru meningkat karena adanya penambahan jumlah sampel responden pariwisata untuk kebutuhan Berita Resmi Statistik (BRS), dari semula 174 responden menjadi 238 responden
3. Ditemukan tingginya angka non-respon dari kelompok responden strategis seperti Koperasi, tempat penukaran Valuta Asing (Valas), dan BUMD.
4. Salah satu responden kunci BUMD (PD. Prodexim) tidak dapat didata (non-respon), yang dapat memengaruhi kelengkapan data sektor publik daerah.

5. Responden mulai menunjukkan gejala kejenuhan karena terus-menerus dijadikan sampel survei. Dampaknya, penyampaian data menjadi terlambat dan kualitas isian menurun sehingga memerlukan banyak perbaikan.
6. Petugas mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan usaha/perusahaan karena informasi alamat pada daftar sampel yang tidak jelas atau tidak akurat (TW II).
7. Pada kegiatan Updating Direktori Pariwisata (TW III), ditemukan banyak sampel pada *prelist* yang sudah tidak aktif, tutup, pindah lokasi, atau berganti jenis usaha yang sudah di luar cakupan survei.

Solusi

1. Mengingat pariwisata merupakan data strategis bulanan, dilakukan penambahan jumlah petugas lapangan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata.
2. Pengalokasian beban kerja yang lebih proporsional memastikan kualitas data tetap terjaga dan hubungan kerja sama dengan penyedia data (mitra) tetap harmonis.
3. Mengaktifkan penggunaan Daftar Sampel Pengganti (DSP) untuk mengganti responden yang tidak ditemukan atau tidak lagi memenuhi kriteria.
4. Melaporkan kendala lapangan ke BPS Provinsi guna mendapatkan persetujuan penggantian sampel secara *purposive* agar keterwakilan data tetap akurat.
5. Melakukan kunjungan ulang ke perusahaan yang bermasalah dan melakukan konfirmasi status perusahaan kepada Seksi Pengawasan BUMD di Setda Provinsi Sumatera Selatan.
6. Berkoordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan Daftar Sampel Pengganti Purposive (DSPP) guna mengganti atau menambah sampel yang hilang di lapangan
7. Melakukan kunjungan kolaboratif antara Pengawas (PML) dan Petugas (PPL) untuk memberikan edukasi dan penjelasan mendalam kepada responden yang sulit atau menolak didata.

8. Melakukan identifikasi dan perbaikan segera terhadap data yang terdeteksi anomali untuk memastikan hasil akhir survei akurat dan logis.

Tindak Lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu :

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan ke depan, beberapa tindak lanjut telah direncanakan. Pada Triwulan I, dilakukan briefing kepada petugas untuk pendalaman konsep dan definisi, khususnya bagi mitra baru, serta percepatan pelaksanaan pendataan. Pada Triwulan II, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar kegiatan berjalan tepat waktu, disertai pembuatan link form pengajuan sampel purposive. Pada Triwulan III, dilakukan koordinasi dengan bagian terkait di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pelaksanaan survei BUMD di tahun berikutnya, serta pertemuan dengan PPL dan PML untuk membahas dan mengakomodir kendala lapangan, terutama terkait sampel usaha atau perusahaan yang sudah tidak aktif atau berubah status usaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan publikasi dan laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata pada tahun 2026, direkomendasikan:

1. Melakukan briefing dan evaluasi menyeluruh kepada seluruh PML dan PPL terkait pelaksanaan kegiatan VHTS.
2. Melakukan penggantian responden dengan menggunakan daftar sampel pengganti melaporkan ke BPS Provinsi guna melakukan penggantian sampel purposive
3. PML dan PPL bersama mengunjungi ulang koresponden tersebut dan memberikan penjelasan koresponden. Untuk perbaikan data anomali melakukan perbaikan data

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyusunan publikasi dan laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Tahun 2025 berjalan dengan baik dan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kendala yang muncul telah ditangani melalui koordinasi, penyesuaian strategi,

serta perbaikan berkelanjutan. Ke depan, melalui tindak lanjut yang telah direncanakan, BPS Kota Palembang diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas data dan laporan statistik yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal bagi perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas

Sasaran strategis *Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas* diarahkan untuk memastikan tersedianya data statistik yang akurat, konsisten, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan standar kualitas terhadap publikasi atau laporan Neraca Produksi yang dihasilkan, baik dari aspek metodologi, kelengkapan dan konsistensi data, ketepatan waktu penyajian, maupun kejelasan informasi yang disampaikan kepada pengguna data.

Dasar Hitung

$$Z = \frac{x}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang dihasilkan

Publikasi Neraca Produksi yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Neraca Produksi yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6

(berkategori minimal Baik) berdasarkan hasil penilaian dengan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Laporan Neraca Produksi berkualitas adalah laporan yang di dalamnya memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Neraca Produksi, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Neraca Produksi telah dilakukan dengan mengacu pada standar statistik yang berlaku serta melalui proses pengolahan dan validasi data secara berjenjang. Koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait terus ditingkatkan guna menjamin keterpaduan dan konsistensi data yang digunakan. Hasilnya, sebagian besar publikasi Neraca Produksi yang diterbitkan telah memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan, sehingga mampu memberikan gambaran yang andal mengenai kondisi produksi lintas sektor dan mendukung kebutuhan analisis statistik.

Target indikator Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas ditetapkan melalui tersusunnya publikasi *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024* yang memenuhi standar kualitas statistik. Publikasi PDRB tersebut menjadi output utama Neraca Produksi karena menyajikan gambaran komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian Kota Palembang berdasarkan lapangan usaha secara berkesinambungan antarwaktu.

Indikator kinerja ini telah dilaksanakan dan direalisasikan pada tanggal 11 April 2025. Publikasi telah di unggah di website BPS Kota Palembang pada tanggal yang sama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) yang menjadi bukti formal atas capaian indikator kinerja tersebut baru diterbitkan pada bulan September 2025 sesuai Surat Plt.Sekretaris Utama BPS Nomor B-600/02000/PR.613/ 2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai rujukan dalam penghitungan realisasi kinerja Triwulan III dan IV Tahun 2025.

Gambar 17. Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas



Dengan telah diterbitkannya publikasi *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024* yang disusun sesuai dengan standar metodologi statistik dan melalui proses validasi serta pengendalian kualitas yang memadai, maka seluruh publikasi Neraca Produksi yang ditargetkan telah terpenuhi. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas mencapai 100 persen. Adapun berdasarkan hasil pengukuran dan pembobotan penilaian kinerja, nilai akhir capaian indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 90 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sangat baik dan selaras dengan sasaran strategis penyediaan data dan insight statistik lintas sektor yang berkualitas. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 25. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Neraca Produksi Tahun 2025, seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga diseminasi dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip kualitas statistik, sehingga output yang dihasilkan diharapkan memenuhi aspek akurasi, relevansi, ketepatan waktu, serta keterbandingan. Meskipun secara umum indikator Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dalam proses pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala baik yang bersifat teknis maupun operasional. Kendala-kendala tersebut memerlukan perhatian serta langkah mitigasi yang tepat agar tidak berdampak signifikan terhadap kualitas hasil, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan kegiatan di periode berikutnya.

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Terjadi ketimpangan urutan rilis di mana angka PDRB Tahunan 2024 terbit lebih dulu (Februari) dibandingkan angka PDRB Triwulanan 2022-2024 (Maret). Hal ini memaksa tim untuk melakukan penyesuaian ulang kategori pada angka triwulanan agar selaras dengan angka tahunan yang sudah dipublikasikan.
2. Secara konsisten di TW I, TW II, dan TW IV, ditemukan masalah kurang lengkapnya data pendukung untuk penghitungan Nilai Tambah (Lembar Kerja PDRB). Sektor yang paling terdampak adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan.
3. Pendataan awal tahun (TW I) terhambat oleh sisa libur Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak sampel perusahaan yang baru bisa ditemui pada minggu kedua Januari.
4. Terdapat kendala signifikan pada sampel SKNP kategori Keuangan, di mana banyak perusahaan yang menolak didata atau memberikan status non-respon.

5. Volume sampel (SPPG, Sekolah, Siswa, dan Supplier) di Kota Palembang adalah yang terbanyak di Sumatera Selatan. Pendeknya waktu pendataan menyulitkan koordinasi dan perolehan data rinci, terutama dari responden *Supplier*.
6. Ditemukan banyak sampel utama yang sudah tidak aktif dalam survei SKTNP (Barang dan Jasa).
7. Terdapat Sampel SKTNP Barang ditemukan sudah tutup sedangkan TW III terjadi kasus serupa yang mengharuskan dilakukannya prosedur penggantian sampel (*replacement*) agar target data tetap terpenuhi

Solusi

1. Melakukan persiapan logistik pendataan (kuesioner dan surat tugas) lebih awal pada Desember 2024 untuk menjamin kelancaran lapangan di awal tahun.
2. Mengikuti arahan BPS Provinsi dalam proses rekonsiliasi serta menyusun basis data dan fenomena pendukung untuk melakukan revisi angka PDRB Triwulanan periode 2022-2024.
3. Mengidentifikasi indikator produktivitas di setiap kategori lapangan usaha sebagai dasar penghitungan nilai tambah yang lebih akurat.
4. Mengakomodir penggantian sampel secara *purposive* bagi responden yang menolak, *non-response*, maupun perusahaan yang sudah tutup.
5. Melibatkan pegawai organik sebagai Pengawas (PML) untuk melakukan koordinasi intensif dengan pihak SPPG dan *supplier* dalam Survei Monitoring Makan Bergizi Gratis (MBG).
6. Melakukan pengumpulan data pendukung nilai tambah dari BUMD/BUMN strategis (PT PLN, PGN, dan PDAM) secara berkala.
7. Melakukan penggantian sampel secara *purposive* dengan mengambil cadangan dari sisa *frame* pada kategori lapangan usaha yang sama untuk menjaga kualitas estimasi.
8. Melaporkan kendala sektoral secara resmi kepada Tim Neraca Produksi BPS Provinsi Sumatera Selatan.

9. Menggunakan data pendukung sekunder dan metode estimasi/pendekatan dari level provinsi untuk menutupi *gap* data di tingkat kota pada periode akhir tahun.

Tindak Lanjut Kegiatan

Sebagai tindak lanjut pada Triwulan I, dilakukan penguatan koordinasi dengan responden dengan menginstruksikan petugas untuk melakukan komunikasi awal dengan perusahaan sebelum memasuki periode libur panjang, termasuk cuti bersama Idulfitri. Selain itu, dilakukan revisi angka PDRB Triwulanan dari Triwulan I hingga Triwulan IV tahun 2022–2024, khususnya pada kategori dominan di Kota Palembang seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan, dengan mengacu pada data sekunder dan fenomena ekonomi yang relevan di tingkat provinsi. Dalam mendukung penghitungan, digunakan indikator IBS Tahunan dan IMK Triwulanan untuk kategori Industri Pengolahan, indikator Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja modal gedung, jalan, dan jembatan serta realisasi produksi semen Provinsi Sumatera Selatan untuk kategori Konstruksi, serta indikator pengeluaran konsumsi barang dari SUSENAS dan Seruti untuk kategori Perdagangan.

Pada Triwulan II, tindak lanjut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendataan, serta penyusunan daftar sampel purposive yang masih aktif beroperasi dan memiliki potensi tingkat respon yang tinggi untuk menggantikan sampel non-respon. Monitoring mandiri juga dilakukan secara intensif terhadap progres pendataan Survei Monitoring dan Evaluasi MBG, khususnya pada SPPG dan supplier. Selain itu, disusun matriks rencana kerja permintaan data ke OPD, dinas, dan perusahaan sebagai upaya sistematis dalam pemenuhan data pendukung penghitungan nilai tambah PDRB dari sisi produksi.

Pada Triwulan III, seluruh penggantian sampel yang dilakukan dilaporkan secara resmi kepada Tim Neraca Produksi BPS Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk akuntabilitas dan koordinasi antar level kerja statistik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan publikasi dan laporan Neraca Produksi pada tahun 2026, direkomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain :

1. Penghitungan tabel pokok angka PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV dan Tahunan.
2. Pengumpulan data fenomena dalam rangka penyusunan angka PDRB dan persiapan perubahan tahun dasar

Melalui penyusunan publikasi PDRB Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024, diharapkan tersedianya data dan insight statistik lintas sektor yang andal dan berkelanjutan. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi kinerja ekonomi sektoral, serta bahan analisis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan tercapainya target publikasi PDRB yang berkualitas, maka sasaran strategis penyediaan data dan insight statistik lintas sektor yang berkualitas dapat diwujudkan secara optimal

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas”, BPS Kota Palembang melaksanakan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Neraca Pengeluaran pada Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi ekonomi yang andal, komprehensif, serta dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan.

Sehubungan dengan pengukuran kinerja kegiatan tersebut, penghitungan Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas dilakukan berdasarkan dasar penghitungan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pengukuran kinerja yang berlaku.

Dasar Hitung :

$$Z = \frac{x}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Z = Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas

X = Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang berkualitas

Y= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang dihasilkan

Publikasi Neraca Pengeluaran yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Neraca Pengeluaran yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 (berkategori minimal Baik) berdasarkan hasil penilaian dengan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Laporan Neraca Pengeluaran berkualitas adalah laporan yang di dalamnya memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Neraca Pengeluaran, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas pada Tahun 2025 meliputi dua output utama, yaitu :

1. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang Menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024
2. Laporan Kegiatan Neraca Pengeluaran Tahun 2025.

Kedua output tersebut merupakan produk statistik strategis yang berperan penting dalam penyediaan data dan informasi ekonomi makro daerah, khususnya dari sisi pengeluaran, yang digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan indikator kinerja tersebut telah direalisasikan pada tanggal 30 April 2025, ditandai dengan selesainya penyusunan dan rilis Publikasi PDRB Kota Palembang Menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024. Publikasi ini disampaikan kepada pengguna data dan masyarakat luas pada hari yang sama melalui website resmi BPS Kota Palembang sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi, keterbukaan informasi publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan statistik. Melalui diseminasi tepat waktu tersebut, diharapkan data yang dihasilkan

dapat segera dimanfaatkan oleh pengguna. Meskipun pelaksanaan kegiatan dan publikasi output telah selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pencatatan realisasi kinerja indikator belum dapat dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan karena bukti formal capaian indikator berupa hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) baru diterbitkan pada bulan September 2025. Dokumen hasil PSB tersebut merupakan dasar penilaian resmi atas kualitas publikasi dan laporan yang dihasilkan, sehingga realisasi indikator kinerja baru dapat dicatat setelah dokumen dimaksud tersedia secara resmi.

Selanjutnya, sebagai upaya penyempurnaan serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Pengeluaran, pada Desember 2025 telah diterbitkan Laporan Kegiatan Neraca Pengeluaran Tahun 2025. Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan kegiatan secara komprehensif, mulai dari tahapan persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, hingga evaluasi, serta menjadi dokumen pendukung dalam pelaporan kinerja dan bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Gambar 18. Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas



Dengan realisasi sebanyak 2 (dua) output pada Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas, seluruh target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025 dapat terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator pada Tahun 2025 dinyatakan mencapai 100 persen dan hasil pengukuran dan pembobotan penilaian

kinerja, nilai akhir capaian indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 90 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan publikasi dan laporan Neraca Pengeluaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 26. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	50	100	0	0	50	100

Kegiatan penyusunan Neraca Pengeluaran dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi melalui serangkaian tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis, hingga penyebarluasan hasil serta evaluasi. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kualitas statistik agar output yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, relevan dengan kebutuhan pengguna, tepat waktu, serta dapat dibandingkan antarperiode. Walaupun secara keseluruhan Indikator Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala teknis dan operasional pada setiap triwulan. Kondisi tersebut memerlukan upaya penanganan dan mitigasi yang tepat agar tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil yang dihasilkan, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Kendala.

1. Ditemukan ketidaksesuaian antara data hasil Survei SERUTI TW IV-2024 dengan fenomena lapangan. Data SERUTI menunjukkan penurunan konsumsi

- rumah tangga, padahal secara riil seharusnya meningkat karena adanya momen libur sekolah dan Natal.
2. Kejanggalan dalam penyusunan publikasi PDRB Pengeluaran 2020-2024, di mana data jumlah rumah tangga tahun 2024 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.
 3. Data dasar untuk penghitungan komponen Perubahan Inventori masih kurang lengkap.
 4. Data *snapshot* perekonomian regional yang diterima dari Dinas Sosial pada TW I tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
 5. Terjadi keterlambatan penerimaan data dari instansi kunci (DPMPTSP Kota Palembang, Pertamina Patra Niaga, dan PT Pos) yang sangat dibutuhkan untuk penghitungan PDRB Pengeluaran TW II-2025.
 6. Sampel utama Survei Perubahan Inventori (SKSPPI), yaitu PT Hida Manta Indah, ditemukan sudah tidak beroperasi (tutup) saat pendataan pada TW III.
 7. Ditemukan kendala non-respon pada sampel SKLNPT yaitu pada lembaga Lanjut Usia Indonesia dikarenakan sulit ditemui oleh petugas dan PB Ikatan Bidan Indonesia menolak untuk didata karena merasa sudah terlalu sering dijadikan sampel (kejenuhan responden).

Solusi

1. Melakukan konfirmasi dan verifikasi data sosial ekonomi langsung ke Dinas Sosial guna memastikan keselarasan indikator kemiskinan dan konsumsi.
2. Menggunakan indikator relevan (Indeks Harga Konsumen/IHK, konsumsi listrik PLN, dan volume penumpang angkutan) sebagai basis pembandingan (*cross-check*) terhadap sub-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan fenomena ekonomi terkini.
3. Mengikuti arahan teknis BPS Provinsi dalam forum rekonsiliasi PDRB serta menyiapkan basis data fenomena untuk revisi angka PDRB triwulanan periode 2022–2024.
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan intensif kepada Tim Neraca Pengeluaran BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk memvalidasi penyebab

penurunan data rumah tangga tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya guna menjamin validitas rilis data.

5. Melaporkan dan melakukan penggantian sampel secara *purposive* pada kategori Real Estate ke BPS Provinsi untuk menjaga keterwakilan data lapangan usaha yang terdampak kendala lapangan.
6. Melakukan koordinasi aktif dengan PIC dinas/instansi terkait guna mempercepat proses pengumpulan data pendukung neraca pengeluaran.
7. Melakukan prosedur pelaporan dan penggantian sampel secara *purposive* dengan memastikan karakteristik lembaga pengganti tetap sejenis (homogen) untuk menjaga kualitas estimasi pengeluaran lembaga non-profit.

Tindak Lanjut :

Sebagai tindak lanjut, pada Triwulan I dilakukan kunjungan kembali ke dinas terkait, pelengkapan pengumpulan indikator pendukung yang relevan, revisi angka PDRB triwulanan dan tahunan Tahun 2022–2024 khususnya pada komponen perubahan inventori, serta optimalisasi anggaran agar kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan lapangan dapat berjalan lebih lancar. Pada Triwulan II, meskipun BPS Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan bahwa data jumlah rumah tangga tidak dapat direvisi pada tahun berjalan karena telah digunakan dalam berbagai proses penghitungan statistik, perbaikan data direncanakan akan dilakukan pada periode berikutnya dan dimasukkan dalam penghitungan PDRB tahun selanjutnya. Pada Triwulan III, tindak lanjut dilakukan melalui kunjungan langsung ke dinas dan instansi terkait serta penyelesaian penghitungan tabel pokok PDRB menurut pengeluaran Triwulan III Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan publikasi dan laporan Neraca Pengeluaran pada Tahun 2026, diperlukan sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas penghitungan, menjamin kesinambungan data antarperiode, serta mendukung ketepatan waktu dan akurasi output statistik yang dihasilkan. Rekomendasi yang direncanakan yaitu :

Penghitungan tabel pokok angka PDRB menurut pengeluaran triwulan IV tahun 2025 dan tahun 2025

Melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kualitas publikasi dan laporan Neraca Pengeluaran pada Tahun 2026 dapat semakin meningkat, baik dari sisi ketepatan waktu, akurasi, maupun relevansi data, sehingga mampu mendukung kebutuhan pengguna data dan pengambilan kebijakan secara lebih optimal.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas

Sebagai upaya mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas”, BPS Kota Palembang melaksanakan kegiatan penyusunan publikasi Analisis dan Pengembangan Statistik pada Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan statistik sektoral yang ditujukan untuk menghasilkan data dan informasi ekonomi yang akurat, komprehensif, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan.

Dalam rangka menilai kinerja atas pelaksanaan kegiatan tersebut, penghitungan Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas dilakukan dengan mengacu pada dasar penghitungan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pengukuran kinerja yang berlaku.

Dasar Hitung :

$$Z = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Publikasi Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas adalah publikasi yang memuat data bersumber dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data minimal 2,6 (berkategori minimal Baik) berdasarkan hasil penilaian dengan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik berkualitas adalah laporan yang di dalamnya memuat gambaran pelaksanaan kegiatan Analisis dan Pengembangan Statistik, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Target indikator kinerja Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas ditetapkan sebesar 100 persen pada Triwulan IV Tahun 2025, sedangkan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 bernilai nol. Penetapan target tersebut didasarkan pada belum adanya kepastian jadwal pelaksanaan Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 pada awal hingga pertengahan tahun. PSB merupakan instrumen utama dalam menilai kualitas publikasi dan laporan analisis statistik, sehingga hasil penilaian tersebut menjadi dasar formal dalam penghitungan capaian indikator kinerja dimaksud.

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai bukti formal atas capaian indikator kinerja baru diterbitkan pada bulan September 2025. Hal ini sesuai dengan Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi rujukan resmi dalam penghitungan realisasi kinerja Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025. Dengan diterbitkannya hasil PSB tersebut, maka penilaian terhadap kualitas publikasi dan laporan analisis dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Adapun publikasi yang menjadi sasaran dalam indikator kinerja Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas pada Tahun 2025 meliputi:

1. Statistik Daerah Kota Palembang 2025
2. Indeks Kesejahteraan Kota Palembang 2025

3. Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang 2025

Ketiga publikasi tersebut telah disusun sesuai dengan standar metodologi dan kaidah statistik yang berlaku, serta telah dirilis dan dipublikasikan melalui website resmi BPS Kota Palembang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyediaan data kepada publik. Publikasi Statistik Daerah Kota Palembang 2025 telah dirilis pada 26 September 2025 dan pelaksanaannya telah sesuai dengan jadwal rilis resmi BPS Kota Palembang. Sementara itu, publikasi Indeks Kesejahteraan Kota Palembang 2025 dan Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang 2025 masing-masing dirilis pada 31 Desember 2025, sejalan dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penempatan target indikator kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 serta nilai nol pada Triwulan I hingga Triwulan III Tahun 2025 telah mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya, khususnya terkait ketergantungan terhadap hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) sebagai dasar penilaian kualitas publikasi. Seluruh publikasi yang menjadi target indikator kinerja telah memenuhi persyaratan dan dinilai berkualitas berdasarkan hasil PSB Tahun 2025, sehingga capaian indikator kinerja dapat direalisasikan secara optimal pada akhir tahun anggaran

Gambar 19. Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas



Dengan diterbitkannya seluruh publikasi dimaksud, maka seluruh target Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik telah berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, indikator kinerja Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas menunjukkan capaian sebesar 100 persen.

Tabel 27. Capaian Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	0	0	0	100	0	0	33,33	100	0	0	33,33	100

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan melalui mekanisme pembobotan penilaian, diperoleh nilai akhir capaian indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 90 persen. Nilai tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan Analisis dan Pengembangan Statistik telah berlangsung dengan sangat baik serta sejalan dengan sasaran strategis organisasi, khususnya dalam mendukung penyediaan data dan insight statistik lintas sektor yang berkualitas dan andal

Kegiatan penyusunan Analisis dan Pengembangan Statistik dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi melalui serangkaian tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis, hingga penyebarluasan hasil serta evaluasi. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kualitas statistik agar output yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, relevan dengan kebutuhan pengguna, tepat waktu, serta dapat dibandingkan antarperiode. Walaupun secara keseluruhan Indikator Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala teknis dan operasional

pada setiap triwulan. Kondisi tersebut memerlukan upaya penanganan dan mitigasi yang tepat agar tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil yang dihasilkan, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

Kendala

1. Ditemukan ketiadaan SOP atau panduan baku mengenai pembuatan publikasi Indikator Strategis. Hal ini berlanjut pada pengisian data Indeks Pembangunan Gender (IPG) ke tabel dinamis website yang belum memiliki instruksi jelas.
2. Muncul kendala inkonsistensi format antara publikasi Statistik Daerah (Statda) Kota Palembang dengan level Provinsi. Terjadi keraguan mengenai jumlah halaman ideal (naik drastis dari 36 menjadi 75 halaman) serta perbedaan gaya desain visual (*highlight* judul) yang tidak seragam dengan kabupaten/kota lain.
3. Ketiadaan *briefing* teknis dari BPS Provinsi Sumatera Selatan (TW III) menyebabkan tim daerah harus melakukan estimasi mandiri dalam menentukan standar kualitas dan kuantitas konten publikasi.
4. Petugas merasakan keterbatasan infrastruktur dalam mempercantik tampilan publikasi (seperti desain cover dan tata letak halaman). Diperlukan dukungan aplikasi desain profesional (seperti Canva Pro) untuk meningkatkan estetika produk data (TW I).
5. Penerapan penjaminan kualitas melalui *Quality Gates* (Q-Gates) yang baru berjalan 1,5 tahun masih membingungkan bagi sebagian *Subject Matter*. Hal ini disebabkan oleh perubahan format laporan (lama vs baru) yang sulit dipahami secara cepat (TW II).
6. Pada penyusunan publikasi "Kota Palembang Dalam Angka 2025" (TW IV), data pertumbuhan penduduk tahun 2024 tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber data primer dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang tidak menampilkan angka pertumbuhan tersebut.

Solusi

1. Melakukan perbaikan dan pendalaman konsep serta definisi pada setiap indikator dalam publikasi *Indikator Strategis Kota Palembang 2025* sesuai arahan pimpinan.
2. Memperkuat kolaborasi dengan Tim DLS BPS Kota Palembang dan Tim Analisis BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk sinkronisasi data.
3. Meningkatkan daya tarik publikasi dengan melakukan pembaruan desain *cover* yang lebih profesional melalui platform desain kreatif (Canva).
4. Mempertahankan penulisan *highlight* pada setiap bab untuk mempermudah pembaca menangkap esensi data, sembari melakukan penambahan volume halaman jika data pendukung tersedia.
5. Melakukan sosialisasi dan distribusi format baru laporan *Q-Gates* kepada setiap *Subject Matter*.
6. Menerapkan pendekatan fleksibel dalam masa transisi format laporan, selama informasi yang disajikan tetap memenuhi standar minimum yang ditetapkan BPS Provinsi.
7. Melakukan *benchmarking* terhadap publikasi Statistik Daerah dari berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
8. Melakukan ekspansi konten dan penambahan halaman pada publikasi *Statistik Daerah Kota Palembang 2025* dengan mengacu pada standar kualitas publikasi tingkat Provinsi.
9. Memperluas sumber data referensi dengan memanfaatkan publikasi strategis seperti *Proyeksi Penduduk 2020-2035*, *Inkesra 2024*, dan *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2025*.
10. Menyelaraskan angka-angka kependudukan dan indikator sosial agar tetap konsisten dengan data rilis terbaru pada level regional.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penguatan kapasitas dan pemahaman penyusun publikasi melalui penelusuran kembali sumber referensi indikator strategis serta perbaikan perencanaan dan manajemen waktu pekerjaan. Diskusi dan koordinasi dengan Tim ALS BPS Provinsi Sumatera Selatan akan terus dilanjutkan guna

memastikan keselarasan format, cakupan, dan kualitas publikasi. Penerapan format terbaru QGates akan diberlakukan untuk seluruh laporan yang belum dan akan diunggah, disertai evaluasi terhadap laporan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, akan dilakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi kevalidan data kependudukan, penyusunan ringkasan data penduduk secara runtut (time series), serta peningkatan koordinasi dengan Tim Neraca Analisis BPS Provinsi Sumatera Selatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas publikasi dan laporan Analisis serta Pengembangan Statistik pada tahun-tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan publikasi dan laporan analisis dan pengembangan Statistik Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengecek kembali kevalidan data jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk yang ditampilkan pada publikasi serta membuat ringkasan data penduduk dan lain-lain secara series dan melakukan koordinasi dengan tim neraca analisis BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Secara keseluruhan, berbagai kendala yang muncul selama Tahun 2025 telah direspons melalui langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang terukur. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyempurnaan proses penyusunan publikasi dan laporan statistik ke depan. Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan referensi dan teknologi pendukung, diharapkan kualitas publikasi Analisis dan Pengembangan Statistik, khususnya pada Tahun 2026, dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penyediaan data dan insight statistik yang berkualitas, akurat, dan berkelanjutan.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tabel 28. Capaian Kinerja Tujuan Kedua

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya kolaborasi, Integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.5.1.	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral K/L/Pemda	Persen	80	94,58	118,23
2.5.1.1.	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar				
2.7.1.	Terwujudnya Kemudahan Akses Data Bps				
2.7.1.1.	Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Poin	3,33	4,26	120

Tujuan Kedua adalah mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Tujuan ini diarahkan untuk memastikan tersedianya data statistik yang berkualitas, terintegrasi, serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis.

1. Sasaran strategis pertama yaitu terwujudnya penguatan penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).
2. Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya kemudahan akses terhadap data BPS. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan keterbukaan dan pemanfaatan data statistik melalui penyediaan layanan data yang mudah diakses, tepat waktu, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna data. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi layanan statistik dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga data BPS dapat digunakan secara luas oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral

Indikator Kinerja : Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui pembinaan yang berkesinambungan, sehingga data yang dihasilkan oleh K/L/Pemda selaras dengan standar statistik nasional, memiliki kesamaan konsep dan definisi, serta mendukung integrasi data dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Pembinaan tersebut diarahkan agar seluruh kegiatan statistik sektoral dilaksanakan sesuai dengan standar statistik nasional, baik dari sisi konsep, definisi, klasifikasi, metodologi, maupun proses pengolahan dan penyajian data. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang andal, konsisten, serta dapat dibandingkan antarwilayah dan antarperiode waktu.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan indikator kinerja “Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar”. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS telah mendorong K/L/Pemda dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai dengan prinsip dan standar Sistem Statistik Nasional. Pengukuran indikator ini mencerminkan efektivitas pembinaan yang meliputi aspek perencanaan kegiatan statistik, penerapan standar dan metodologi statistik, pemanfaatan metadata, serta kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman statistik yang berlaku. Terdapat 2 OPD yang menjadi target Pembinaan Statistik Sektoral yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Dasar Hitung :

Tingkat penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar upaya pembinaan statistik sektoral yang telah diselenggarakan BPS Kota Palembang kepada Pemda sesuai dengan petunjuk

teknis pembinaan statistik sektoral.

$$TPSS = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

Keterangan:

TPSS : Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

w_i : Bobot/penimbang pada indikator ke-i

x_i : Nilai indikator ke-i

n : Jumlah indikator penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral

Melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki instrumen yang objektif dan terukur untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. Indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai area yang masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun proses penyelenggaraan statistik sektoral di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil pengukuran indikator ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan strategi pembinaan statistik sektoral pada periode selanjutnya, sehingga integrasi dan kualitas data statistik sektoral dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 29. Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar	Perse n	19.00	56.00	72.0	80.0	69.57	91.50	93.46	94.58	86.88	114.38	116.83	118.23

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-5/03000/ES/2025 tanggal 30 Januari 2025, telah dilaksanakan Kickoff Meeting Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 pada tanggal 6 Februari 2025. Kickoff meeting tersebut menjadi titik awal pelaksanaan rangkaian kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2025, sekaligus sebagai sarana penyampaian arah kebijakan, tujuan, serta strategi pembinaan yang akan dilaksanakan oleh BPS kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang bulan Februari 2025 dilakukan berbagai persiapan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. Kegiatan persiapan tersebut meliputi koordinasi awal dengan OPD yang menjadi target pembinaan, identifikasi kebutuhan teknis dan substansi statistik sektoral, serta penyiapan dokumen pendukung dan sumber daya yang diperlukan. Tahapan persiapan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.

Koordinasi awal pembinaan statistik sektoral telah dilaksanakan terhadap dua OPD, yaitu Dinas Kebudayaan Kota Palembang pada tanggal 6 Maret 2025 dan RSUD Palembang BARI pada tanggal 5 Maret 2025. Koordinasi awal ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep statistik sektoral, peran dan tanggung jawab OPD dalam penyelenggaraan statistik, serta pentingnya penerapan kaidah dan standar statistik sesuai dengan ketentuan BPS. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menggali gambaran awal kondisi pengelolaan data statistik di masing-masing OPD sebagai bahan perumusan rencana pembinaan yang lebih terarah.

Gambar 20. Koordinasi Awal Pembinaan Statistik Sektoral di RSUD dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang



Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan statistik sektoral, BPS Kota Palembang melaksanakan kegiatan internalisasi pembinaan statistik sektoral di lingkungan internal BPS. Kegiatan internalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang seragam mengenai peran strategis BPS sebagai pembina statistik sektoral, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembinaan. Selain itu, internalisasi ini juga menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang efektif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data sektoral.

Gambar 21. Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral

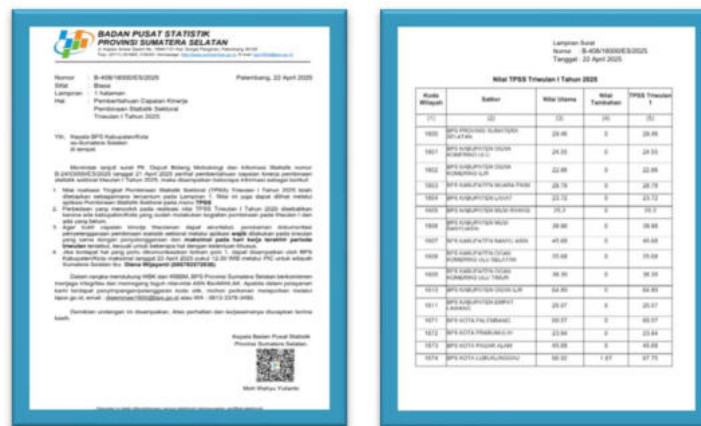


Melalui kegiatan internalisasi tersebut, pegawai BPS Kota Palembang dibekali pemahaman mengenai alur pelaksanaan pembinaan statistik sektoral, pendekatan pembinaan yang tepat sesuai dengan karakteristik OPD, serta aspek teknis statistik yang perlu diperhatikan dalam mendampingi OPD, seperti penerapan standar statistik, metadata, dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang sama, diharapkan seluruh pegawai BPS Kota Palembang mampu berperan aktif dan optimal dalam mendukung pelaksanaan pembinaan statistik sektoral, baik dari sisi teknis statistik maupun dari sisi koordinasi dan fasilitasi kelembagaan.

Koordinasi awal pembinaan statistik sektoral dan kegiatan internalisasi pembinaan statistik sektoral yang telah dilaksanakan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap capaian kinerja BPS Kota Palembang. Pada Triwulan I Tahun 2025, Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar memperoleh nilai sebesar 69,57 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan pembinaan statistik sektoral telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, nilai capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar 120 persen, yang mengindikasikan bahwa realisasi kinerja melampaui target triwulanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja terhadap target tahunan mencapai sebesar 86,88 persen, yang menunjukkan progres kinerja yang signifikan dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target kinerja akhir tahun.

Gambar 22. Pemberitahuan Capaian Kinerja Pembinaan Statistik Sektoral TW I 2025



Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan OPD yang menjadi lokus kegiatan pembinaan statistik sektoral. OPD yang sebelumnya ditetapkan sebagai lokus, yaitu RSUD Palembang BARI, kemudian digantikan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Pergantian ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, dengan mempertimbangkan relevansi program, ketersediaan data statistik sektoral, serta potensi dampak dan efektivitas capaian kinerja yang diharapkan dari kegiatan pembinaan.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, BPS Kota Palembang akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang guna mempersiapkan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral berikutnya. Selain itu, akan dilakukan identifikasi awal terhadap jenis-jenis statistik sektoral yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, termasuk mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan

materi pembinaan serta pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas statistik di lingkungan Dinas Pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Palembang juga melakukan terobosan melalui pendekatan “*jemput bola*”, yaitu dengan mendatangi langsung dinas atau OPD terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan, memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta memberikan pemahaman yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing OPD. Dengan pendekatan ini, pembinaan statistik sektoral diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga lebih aplikatif dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, pembinaan statistik sektoral telah dilaksanakan sebanyak dua kali dan dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Pada pelaksanaan awal pembinaan, OPD yang mengikuti kegiatan ini meliputi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kebudayaan
6. RSUD Palembang BARI
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8. Dinas Perdagangan
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10. Dinas Pariwisata

Pembinaan statistik sektoral yang kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025. Pada kegiatan ini, terdapat penambahan peserta dari dua OPD, yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Palembang. Penambahan OPD ini menunjukkan meningkatnya komitmen dan partisipasi pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan atau sosialisasi, khususnya yang melibatkan perwakilan dari berbagai instansi, BPS Kota Palembang menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan peserta yang hadir. Setiap kegiatan sering kali diikuti oleh orang yang berbeda dari instansi yang sama, sehingga pemahaman yang dibangun pada kegiatan sebelumnya tidak selalu berkelanjutan. Hal ini berdampak pada:

- a. Perlunya pengulangan materi pembinaan karena peserta baru belum memahami konteks kegiatan sebelumnya;
- b. Kurangnya kesinambungan dalam implementasi hasil pembinaan di instansi masing-masing;
- c. Terhambatnya efektivitas koordinasi lintas-instansi karena belum terbentuk relasi kerja yang berkesinambungan.

Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh BPS Kota Palembang, serta menegaskan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan harus merupakan pegawai yang memiliki pemahaman, kewenangan, serta kapasitas teknis yang sesuai dengan materi pembinaan dan juga mengharapkan peserta tidak diganti-ganti antar sesi, dan ditetapkan secara konsisten oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pemahaman, meminimalisasi pengulangan materi, serta mendorong percepatan implementasi hasil pembinaan di lingkungan kerja masing-masing.

Kepala dinas atau instansi terkait diminta untuk menunjuk peserta tetap yang memiliki relevansi substansi dan kompetensi terhadap materi pembinaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pemahaman, efektivitas pelaksanaan pembinaan, serta mendukung implementasi hasil pembinaan secara optimal dan berkelanjutan di lingkungan instansi masing-masing. Setiap peserta yang ditugaskan mengikuti pembinaan wajib dibekali dengan surat tugas resmi dari instansi asal, sebagai bentuk dukungan administratif dan penguatan peran peserta dalam mengikuti dan menindaklanjuti kegiatan dimaksud.

Selain kendala tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan OPD masih belum optimal, terutama pada aspek diseminasi hasil

statistik. Hasil statistik sektoral yang telah dikumpulkan dan diolah belum seluruhnya dipublikasikan atau disebarluaskan secara sistematis dan terstandar, sehingga pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun masyarakat, masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pada tahapan diseminasi statistik sektoral, agar data yang dihasilkan tidak hanya berkualitas dari sisi metodologi, tetapi juga mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Dengan terlaksananya pembinaan statistik sektoral sebanyak dua kali sepanjang Triwulan II 2025, BPS Kota Palembang menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan peran sebagai pembina statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, pelaksanaan tiga kali pembinaan statistik sektoral tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 91,50 persen, dengan target yang ditetapkan sebesar 56 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang direncanakan. Tingginya capaian kinerja tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun partisipasi OPD yang terlibat.

Lebih lanjut, capaian kinerja triwulan II untuk setahun sebesar 114,38 persen, yang mengindikasikan bahwa kinerja BPS Kota Palembang dalam pembinaan statistik sektoral telah melebihi target kinerja setahun yang ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja triwulanan mencapai sebesar 120 persen, yang menunjukkan bahwa target kinerja triwulan telah terlampaui secara optimal.

Pada bulan Juli 2025 telah dilaksanakan rapat pembahasan persiapan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (Renaksi SDI) Kota Palembang Tahun 2025–2029 serta penyusunan Daftar Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah mengenai arah kebijakan, prioritas program, serta langkah strategis yang akan ditempuh dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Gambar 23. Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Aksi SDI



Renaksi SDI Kota Palembang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di daerah. Dalam Renaksi tersebut, ditetapkan enam program utama yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip Satu Data Indonesia, guna memastikan data yang dihasilkan memenuhi kaidah standar, metadata, dan interoperabilitas.
2. Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, baik antar-OPD maupun dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Pengembangan infrastruktur dan platform data serta fasilitas analitika data, untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
4. Penguatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta peningkatan partisipasi publik, sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara profesional dan inklusif.
5. Stimulasi dan dorongan percepatan implementasi Satu Data Indonesia, melalui berbagai inisiatif dan dukungan kebijakan yang bersifat akseleratif.
6. Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah, agar data dapat menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam proses penyusunan Daftar SDI, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kewajiban pencantuman kode Standar Data Statistik (SDS) pada setiap data yang diusulkan. Pada praktiknya, sebagian besar data yang tercantum dalam Daftar Data belum memiliki kode SDS, sehingga menyulitkan pemenuhan ketentuan tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi OPD yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penetapan, penggunaan, serta manfaat SDS dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, mekanisme pengajuan Standar Data Statistik mengalami perubahan pasca tahun 2024. Perubahan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh OPD maupun oleh perangkat daerah terkait, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses penyusunan dan pengajuan Daftar Data. Ketidajelasan alur, tahapan, serta persyaratan pengajuan SDS berdampak pada keterlambatan penyesuaian Daftar Data agar sesuai dengan ketentuan dan kebijakan terbaru.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan koordinasi antara BAPPEDA, BPS, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah-langkah pengajuan SDS yang dapat diintegrasikan dalam proses penyusunan Daftar Data. Melalui koordinasi ini diharapkan data yang dihasilkan oleh OPD dapat memenuhi standar statistik yang berlaku serta selaras dengan prinsip dan kebijakan Satu Data Indonesia.

Lebih lanjut, terkait pengajuan Standar Data Statistik, telah dilakukan koordinasi dengan BPS Provinsi sebagai pihak yang berwenang dalam fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan lebih lanjut. Saat ini, Pemerintah Kota Palembang masih menunggu terbitnya petunjuk teknis (juknis) yang lebih jelas dan terperinci mengenai mekanisme pengajuan SDS yang terbaru. Keberadaan juknis tersebut diharapkan dapat menjadi acuan yang pasti bagi OPD dalam menyusun Daftar Data yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut konkret, BAPPEDA bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merencanakan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Evaluasi Statistik Sektoral Daerah. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2025 di Dinas Kominfo Kota Palembang,

dengan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang
2. Inspektur Daerah Kota Palembang
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palembang
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palembang
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
9. Dinas Pendidikan Kota Palembang
10. Dinas Kesehatan Kota Palembang
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
12. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang
13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang
14. Dinas Perhubungan Kota Palembang
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
16. Dinas Pariwisata Kota Palembang
17. Dinas Sosial Kota Palembang
18. Dinas Perdagangan Kota Palembang
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palembang
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
25. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang
26. Dinas Kebudayaan Kota Palembang
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang
28. Dinas Perikanan Kota Palembang

29. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang
30. Dinas Perindustrian Kota Palembang
31. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
32. Bagian se-Sekretariat Daerah Kota Palembang
33. RSUD Palembang Bari Kota Palembang
34. RSUD Gandus Kota Palembang
35. Seluruh Camat Kota Palembang

Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas OPD dalam proses pengajuan SDS, sekaligus mempercepat penyusunan Daftar SDI Kota Palembang yang berkualitas, terstandar, dan terintegrasi.

Gambar 24. Bimtek Evaluasi Statistik Sektoral Daerah Kota Palembang 2025



Lebih lanjut, pada tanggal 2 Desember 2025, BPS Kota Palembang melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan metadana statistik sektoral kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Bappeda Litbang dalam menyusun metadana statistik sektoral yang lengkap, sistematis, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPS.

Pendampingan difokuskan pada pemahaman konsep metadana statistik, kelengkapan unsur metadana, serta kesesuaian metadana dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, khususnya terkait standar data, metadana, dan interoperabilitas. Dalam kegiatan ini, BPS Kota Palembang memberikan penjelasan teknis mengenai pengisian metadana, penyesuaian definisi

operasional, sumber data, metode pengumpulan, serta periode dan frekuensi penyajian data.

Sejalan dengan kegiatan pendampingan penyusunan metadata statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang kepada Bappeda Litbang Kota Palembang pada tanggal 2 Desember 2025, masih ditemukan beberapa kendala teknis dalam proses pengisian dan pengelolaan metadata. Salah satu kendala yang dihadapi adalah pada penggunaan aplikasi web **indah.bps.go.id** sebagai sarana pengisian metadata statistik sektoral.

Pada aplikasi tersebut, saat ini belum tersedia fasilitas *search* atau pencarian terhadap metadata yang telah diinput. Ketiadaan fitur pencarian ini menyulitkan pengguna dalam menelusuri metadata yang sudah tersedia, memeriksa kelengkapan dan konsistensi metadata, serta menghindari terjadinya duplikasi pengisian metadata. Kondisi ini berdampak pada efisiensi kerja OPD, khususnya dalam pengelolaan metadata statistik sektoral yang jumlahnya semakin bertambah.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, BPS Kota Palembang telah melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi terkait kebutuhan penambahan fasilitas *search* pada aplikasi **indah.bps.go.id**. Koordinasi ini bertujuan agar masukan dari daerah dapat diteruskan dan ditindaklanjuti pada tingkat pengelola aplikasi, sehingga pengembangan fitur pencarian dapat dipenuhi dan mendukung pengelolaan metadata yang lebih efektif.

Ke depan, diharapkan adanya pengembangan fitur *search* pada aplikasi **indah.bps.go.id** dapat meningkatkan kemudahan akses, kualitas pengelolaan metadata statistik sektoral, serta mendukung optimalisasi implementasi Satu Data Indonesia di daerah, khususnya dalam menjamin keterlacakan dan konsistensi metadata yang dihasilkan oleh OPD.

Berdasarkan rangkaian kegiatan pembinaan statistik sektoral, koordinasi Satu Data Indonesia, bimbingan teknis pengajuan Standar Data Statistik (SDS), serta pendampingan penyusunan metadata statistik sektoral yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, BPS Kota Palembang mencatat capaian kinerja yang sangat baik. Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh mencapai sebesar 94,58 persen, yang

mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja telah berhasil direalisasikan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

Gambar 25. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar BPS Kota Palembang Tahun 2025

The screenshot displays a dashboard titled "Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar" with a sub-header "TPSS Tahun 2025*". The interface includes a dropdown menu for "Periode" set to "Triwulan IV", a "Show 100 entries" indicator, and a search bar. Below these is a table with the following data:

Kode Wilayah	Satker	Periode	Tahun	TPSS*	Utama	Tambahan	U1.1	U1.2	U1.2.1	U1.2.2	U1.3.1	U1.3.2	U2
1671	BPS KOTA PALEMBANG	Triwulan IV	2025	94,58	93,75	1,67	1	100	100	100	100	100	100

At the bottom of the table, it indicates "Showing 1 to 1 of 1 entries" and includes navigation buttons for "Previous", "1", and "Next".

Lebih lanjut, capaian kinerja terhadap target setahun sebesar 118,23 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja BPS Kota Palembang telah melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini mengindikasikan adanya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalnya pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pembinaan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia di Kota Palembang.

Sementara itu, capaian kinerja terhadap target triwulanan juga mencapai sebesar 118,23 persen, yang menandakan bahwa target kinerja pada periode pelaporan telah terlampaui secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan lebih cepat dan lebih optimal dibandingkan dengan perencanaan awal, serta didukung oleh partisipasi aktif OPD dan sinergi lintas instansi yang semakin kuat.

Secara keseluruhan, nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang tercatat sebesar 99 persen. Nilai ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang sebagai pembina statistik sektoral di daerah. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa strategi pembinaan, koordinasi, serta pendampingan yang telah dilakukan mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan terhadap

peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi BPS Kota Palembang untuk terus memperkuat peran pembinaan statistik sektoral pada periode selanjutnya. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas hasil pembinaan, masih diperlukan berbagai langkah strategis dan tindak lanjut yang terencana.

Rekomendasi :

Rapat koordinasi dan Kolaborasi dengan Pemerintahan daerah mengenai statistik sektoral daerah kota Palembang.

Melalui rangkaian kegiatan pembinaan statistik sektoral tersebut, diharapkan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang semakin memahami pentingnya statistik sektoral yang berkualitas, terstandar, dan terintegrasi. Dengan demikian, data statistik sektoral yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kemudahan Akses Data Bps

Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri

Sasaran strategis Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS merupakan upaya untuk memastikan bahwa data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan oleh seluruh pengguna data, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Kemudahan akses data menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan. Melalui sasaran ini, BPS berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna data.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, digunakan Indikator Kinerja berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) – Penilaian Mandiri. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BPS, khususnya dalam penyediaan dan penyebarluasan data statistik. Penilaian mandiri dilakukan sebagai sarana evaluasi internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelayanan, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya nilai IPP, diharapkan kemudahan akses data BPS semakin optimal dan kepuasan pengguna data dapat terus ditingkatkan.

Dasar Hitung :

$$IPP = \left(w_0 \times \sum_{i=1}^n x_i \right) + \left(w_1 \times \sum_{j=1}^m y_j \right)$$

w_0 : Bobot/penimbang instrumen evaluasi ke-1

w_1 : Bobot/penimbang instrumen evaluasi ke-2

x_i : Skor evaluasi indikator PEKPPP instrumen evaluasi ke-1

y_j : Skor evaluasi indikator PEKPPP instrumen evaluasi ke-2

i : Indikator PEKPPP instrumen evaluasi ke-1

j : Indikator PEKPPP instrumen evaluasi ke-2

n : Jumlah indikator PEKPPP instrumen evaluasi ke-1

m : Jumlah indikator PEKPPP instrumen evaluasi ke-2

IPP Triwulan 3 dihitung dr aspek 1-6 [all aspek] hasil Desk-Evaluation + updating aspek 1 khusus SKM [skor dari laporan TW3 di web SKD2025]

IPP Triwulan 4 dihitung dr aspek 1-6 [all aspek] hasil Desk-Evaluation + updating aspek 1 khusus SKM [skor dari laporan TW4 di web SKD2025]

Tabel 30. Dasar Hitung dan Basis Data Target IKU Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri Triwulan I – IV 2025

PERKIRAAN TARGET PK IPP TRIWULANAN TAHUN 2025

Kode Prov	Jumlah Kab/Kota	Unit Lokus Evaluasi	IPP Prov	Target IPP Prov 2025				Perkiraan IPP 2024 Kab/Kota revisi [berdasarkan kategori PEKPPP2024]	Target IPP Kab/Kota				Keterangan		
				2024	2025	Triwulan 1	Triwulan 2		Triwulan 3	Triwulan 4	2024	2025		Triwulan 1	Triwulan 2
16	16	Sumatera Selatan	4,83	4,62	1,11	4,30	4,39	4,62	3,33	3,33	-	0,80	3,10	3,33	Triwulan 1=24% Triwulan 2=33% Triwulan 3=95% Triwulan 4=100% Persentase capaian IPP triwulanan menyesuaikan dg timeline PEKPPP Level Nasional oleh Kementerian PANRB

Tabel 31. Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kinerja Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Person	0.00	0.80	3.10	3.33	0.00	1.03	3.91	4.26	0.00	30.87	117.39	120.00

Sesuai dengan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) – Penilaian Mandiri digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS. Indikator ini bersifat *outcome-oriented* karena menggambarkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan melalui kemudahan akses data dan layanan statistik yang disediakan oleh BPS. Pengukuran dilakukan secara periodik dengan target kumulatif per triwulan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada Triwulan I target kumulatif IPP ditetapkan sebesar 0,00 persen dengan realisasi sebesar 0,00 persen. Capaian tersebut sesuai dengan rencana kinerja, mengingat pada periode awal tahun kegiatan masih difokuskan pada tahap persiapan, penguatan sistem pelayanan, serta penataan internal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, capaian kinerja terhadap target setahun pada Triwulan I masih berada pada angka 0,00 persen.

Pada Triwulan II, target kumulatif meningkat menjadi 0,80 persen dan realisasi kinerja mencapai 1,03 persen. Hal ini menghasilkan capaian kinerja terhadap target setahun sebesar 30,87 persen. Capaian tersebut menunjukkan

bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan publik telah berjalan lebih baik dari yang direncanakan, serta mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan dan kemudahan akses data BPS.

Selanjutnya, pada Triwulan III, target kumulatif ditetapkan sebesar 3,10 persen dengan realisasi kumulatif sebesar 3,91 persen. Dengan realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target setahun mencapai 117,39 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa target tahunan Indeks Pelayanan Publik telah terlampaui sebelum akhir tahun anggaran. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas strategi peningkatan pelayanan, konsistensi pelaksanaan program, serta optimalnya peran sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada Triwulan IV, target kumulatif sebesar 3,33 persen berhasil direalisasikan sebesar 4,26 persen, sehingga capaian kinerja terhadap target setahun mencapai 120,00 persen. Capaian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik BPS, khususnya dalam kemudahan akses data dan layanan statistik, telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) – Penilaian Mandiri yang melampaui target tahunan menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja telah selaras dengan prinsip SAKIP, yaitu keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa *output dan outcome* yang dihasilkan telah memberikan nilai tambah bagi pengguna layanan. Ke depan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, guna mempertahankan dan meningkatkan kemudahan akses data BPS.

Meskipun indeks kepuasan dan kualitas layanan BPS Kota Palembang secara umum telah melampaui target yang ditetapkan, BPS tetap menyadari bahwa menjaga konsistensi mutu pelayanan publik merupakan tantangan yang berkelanjutan. Fluktuasi jumlah kunjungan pengguna data, baik secara langsung maupun daring, menuntut kesiapan sarana, sistem, dan sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, pembaruan infrastruktur sistem informasi serta standarisasi prosedur pelayanan di seluruh unit kerja masih memerlukan

penguatan agar kualitas layanan dapat terjaga secara merata. Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, berikut diuraikan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang direncanakan.

Kendala

Pada Triwulan I, kendala utama dihadapi pada Pilar 3, khususnya terkait pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. Dibutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp2,6 juta untuk pengadaan fasilitas pendukung seperti landmark parkir tamu (motor, mobil, dan difabel), petunjuk arah layanan, pencetakan poster dan bingkai informasi, serta penanda titik kumpul. Selain itu, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral memerlukan kelengkapan bukti dukung yang cukup banyak dan detail. Banyaknya dokumen pendukung yang harus disiapkan pada setiap tahapan kegiatan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan kelengkapan, ketertiban, dan kesesuaian dengan ketentuan PEKPPP. Pada triwulan ini juga belum terlaksana kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Standar Pelayanan Publik BPS Kota Palembang.

Pada Triwulan II, kendala masih ditemukan pada pilar Sarana dan Prasarana, terutama terkait belum optimalnya ketersediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini berpotensi menghambat prinsip pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada Triwulan III, tantangan utama berkaitan dengan pelaksanaan Survei Kebutuhan Data (SKD). BPS Kota Palembang mengalami kesulitan dalam memenuhi target responden SKD dengan komposisi minimal 60 persen berasal dari institusi pemerintahan. Selain itu, meskipun tautan kuesioner SKD telah disampaikan kepada responden, tidak seluruh responden menindaklanjutinya dengan mengisi kuesioner, sehingga memengaruhi kelengkapan data yang dihimpun.

Pada Triwulan IV, kendala yang dihadapi masih berkaitan dengan tingkat respons SKD. Walaupun link kuesioner telah dibagikan kepada seluruh responden sasaran, hingga akhir periode masih terdapat responden yang belum memberikan tanggapan, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk memastikan seluruh data dapat terkumpul secara optimal.

Solusi

Sebagai respons atas kendala pada Triwulan I, kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana telah disampaikan secara lisan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim, sebagai bagian dari pembahasan kebutuhan pendukung kegiatan pelayanan publik ke depan. Selain itu, dilakukan upaya pengumpulan dan penataan bukti dukung PEKPPP secara bertahap agar dokumentasi kegiatan pembinaan statistik sektoral dapat lebih tertib, lengkap, dan mudah diakses.

Pada Triwulan II, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik yang inklusif, BPS Kota Palembang merumuskan langkah-langkah perbaikan pada pilar Sarana dan Prasarana, khususnya bagi penyandang disabilitas. Rencana tersebut meliputi penyediaan jalur akses difabel berupa ramp, penyediaan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat penyangga, serta penyiapan ruang tunggu dan tempat duduk khusus difabel yang lebih ramah dan mudah diakses.

Pada Triwulan III, solusi yang dilakukan antara lain dengan memberikan tautan SKD kepada instansi atau OPD yang telah memperoleh pelayanan Statistik Terpadu (PST) dari BPS Kota Palembang. Selain itu, dilakukan pengecekan secara berkala melalui laman SKD untuk memastikan responden telah mengisi kuesioner, sehingga dapat diketahui secara pasti tingkat respons yang telah dicapai.

Pada Triwulan IV, dilakukan pengingat (reminder) kepada responden yang belum mengisi kuesioner SKD melalui berbagai media komunikasi yang tersedia, seperti WhatsApp dan telepon. Langkah ini diambil untuk meningkatkan tingkat partisipasi responden sekaligus memastikan kelengkapan data sebelum periode pelaporan berakhir.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut Triwulan I, BPS Kota Palembang merencanakan pemenuhan seluruh bukti dukung yang diperlukan untuk PEKPPP serta mengikuti kegiatan coaching clinic PEKPPP guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan tim. Selain itu, diidentifikasi kebutuhan penambahan sumber daya manusia dalam Tim

PEKPPP agar pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dapat berjalan lebih optimal.

Pada Triwulan II, pemenuhan sarana dan prasarana ramah difabel akan dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk penyediaan jalur khusus difabel, anggaran direncanakan bersumber dari anggaran pemeliharaan perkantoran. Diharapkan ke depan BPS Kota Palembang memiliki jalur akses difabel, kursi roda, tongkat penyangga, serta ruang tunggu khusus yang layak dan nyaman.

Pada Triwulan III, dilakukan pengiriman ulang tautan SKD kepada OPD yang telah menerima pelayanan statistik dari BPS Kota Palembang. Meskipun jumlah responden telah memenuhi target sebanyak 30 responden, hasil verifikasi menunjukkan baru 26 responden yang tervalidasi, sementara 4 responden lainnya direncanakan untuk diverifikasi pada Triwulan IV.

Rekomendasi Tahun 2026

Peningkatan Partisipasi Responden SKD

Sebagai tindak lanjut atas masih adanya responden yang belum mengisi kuesioner Survei Kebutuhan Data (SKD), perlu dilakukan upaya penagihan pengisian kuesioner melalui pengiriman pengingat secara berkala kepada responden yang bersangkutan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan tingkat respons secara berkelanjutan serta pemberian pendampingan apabila terdapat kendala teknis dalam proses pengisian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi responden serta menjamin kelengkapan dan kualitas data yang dihimpun.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang dalam bidang pelayanan publik telah berjalan dengan sangat baik. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun menunjukkan komitmen BPS Kota Palembang dalam meningkatkan kualitas layanan statistik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang tinggi, termasuk nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang mencapai 99 persen.

Meskipun demikian, BPS Kota Palembang tetap menyadari bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian, baik terkait pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, konsistensi partisipasi responden Survei Kebutuhan Data, maupun pemenuhan bukti dukung penilaian kinerja. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi yang penting untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan adanya rekomendasi yang telah dirumuskan, diharapkan pada tahun 2026 BPS Kota Palembang dapat semakin meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung terwujudnya kemudahan akses data statistik yang berkualitas, akurat, dan terpercaya bagi seluruh pengguna data.

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan Ketiga Badan Pusat Statistik adalah mewujudkan tata kelola BPS yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien dalam menyelenggarakan statistik. Tujuan ini menekankan pentingnya pengelolaan seluruh proses kegiatan statistik yang dilakukan secara profesional, berstandar jelas, dan berpedoman pada kaidah statistik nasional maupun internasional agar data yang dihasilkan valid, konsisten, dan dapat dipercaya. Selain itu, BPS dituntut untuk menjalankan setiap kegiatan secara akuntabel dan transparan sehingga penggunaan anggaran, sumber daya, serta hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Tata kelola yang efektif memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sementara itu, prinsip efisiensi mendorong BPS untuk memanfaatkan sumber daya, teknologi, dan inovasi secara optimal sehingga penyelenggaraan statistik dapat dilakukan dengan biaya dan waktu yang minimal tanpa mengurangi kualitas data. Tujuan ini terdiri dari 1 sasaran strategis yaitu Terwujudnya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dan 2 indikator yaitu :

1. Nilai SAKIP oleh Inspektorat
2. Indeks Implementasi BerAKHLAK

Tabel 32. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik					
Terwujudnya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Persen	74,16	74,60	100,59
	Indeks Implementasi BerAKHLAK	Persen	64,84	73,20	112,89
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga					106,74

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP oleh Inspektorat

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh Inspektorat merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, termasuk Badan Pusat Statistik. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Nilai SAKIP menunjukkan kualitas penerapan manajemen kinerja, mulai dari keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dengan program serta kegiatan, hingga efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja. Semakin tinggi nilai SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat, semakin baik pula tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja instansi dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Capaian Kinerja dari indikator Kinerja Nilai Sakip oleh Inspektorat tabel dibawah ini:

Tabel 33. Capaian Kinerja Nilai SAKIP oleh Inspektorat per Triwulan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA									Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Persen	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	100,59

Di tahun 2025, BPS Kota Palembang berhasil meraih 74,60 poin dalam penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meningkat dibanding target yang ditetapkan sebesar 74,16 poin, atau naik 0,44 poin. Capaian ini menunjukkan realisasi kinerja sebesar 100,59% dari target yang ditentukan, menandakan bahwa pelaksanaan SAKIP di BPS Kota Palembang berjalan efektif dan mendekati optimal.

Proses penyusunan dokumen SAKIP diawali dengan perencanaan yang matang, melibatkan seluruh tim yang berdedikasi untuk mengelola dan memonitor kinerja organisasi. Setiap target dan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2025 dirancang secara strategis untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan sesuai standar akuntabilitas yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BPS Kota Palembang untuk menjadikan perencanaan kinerja sebagai fondasi yang kuat dalam seluruh aktivitas organisasi.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui rapat rutin yang melibatkan seluruh pegawai. Dalam rapat mingguan ini, progres kinerja dievaluasi, kendala yang muncul diidentifikasi, dan solusi disusun secara bersama untuk memastikan setiap permasalahan dapat ditangani dengan tepat. Proses evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen BPS Kota Palembang untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan organisasi.

Pelaksanaan SAKIP di BPS Kota Palembang melibatkan berbagai kegiatan yang mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh

karena itu, pemahaman yang mendalam tentang SAKIP harus dimiliki oleh seluruh pegawai, bukan hanya individu tertentu. Namun, kompleksitas SAKIP yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja dengan akuntabilitas yang ketat menyebabkan pemahaman ini belum merata di seluruh lini pegawai, sehingga partisipasi dalam proses SAKIP menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi hal ini, BPS Kota Palembang secara aktif mengikuti pelatihan dan internalisasi yang diselenggarakan oleh BPS pusat, seperti pembinaan SAKIP nasional, internalisasi Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029, serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran seluruh pegawai sehingga mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan SAKIP.

Selain itu, pendokumentasian kegiatan SAKIP yang dilakukan saat ini belum tertata secara sistematis dan terintegrasi. Dokumen pendukung sering tersebar di berbagai unit kerja tanpa sistem penyimpanan yang standar dan mudah diakses. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen, terutama saat memenuhi permintaan audit atau evaluasi dari Inspektorat, yang berpotensi membuat laporan akuntabilitas kinerja menjadi kurang lengkap dan kurang valid. Untuk menjawab permasalahan ini, BPS Kota Palembang menginisiasi pengumpulan seluruh dokumen pendukung ke dalam satu wadah penyimpanan terintegrasi yang dikelola secara bersama oleh seluruh pegawai. Dengan cara ini, dokumentasi dapat tersusun lebih rapi, teratur, dan mudah diakses, sehingga mempermudah pelaporan dan memastikan akurasi data.

Permintaan bukti dukung SAKIP oleh Inspektorat juga menimbulkan perbedaan pemahaman terkait jenis dan bentuk bukti yang valid. Untuk itu, admin SAKIP dan ketua tim di BPS Kota Palembang menetapkan indikator proksi kinerja sebagai pedoman internal dalam penyusunan dokumen. Namun, kendala muncul karena panduan teknis dari BPS Provinsi sering disampaikan mendekati batas waktu pengumpulan dokumen, sehingga dokumen yang sudah disusun tidak selalu sesuai dengan panduan terbaru. Hal ini menyulitkan admin dalam melakukan perbaikan dokumen yang sudah diunggah dan berdampak pada kelengkapan serta validitas bukti dukung secara keseluruhan.

Untuk menjaga konsistensi dan menghindari kebingungan akibat perubahan teknis mendadak, BPS Kota Palembang tetap mengacu pada indikator proksi yang telah disepakati sejak awal. Seluruh ketua tim diingatkan untuk memenuhi seluruh bukti dukung, baik terkait indikator utama maupun proksi, tanpa terkecuali. Pemenuhan bukti dukung merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota tim, bukan hanya admin SAKIP. Jika terdapat arahan teknis baru, penyesuaian dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi bersama, sehingga prinsip dasar yang telah ditetapkan tetap terjaga. Selain itu, BPS Kota Palembang menetapkan deadline internal lebih awal dari jadwal resmi SAKIP, agar pengecekan dan konsolidasi dokumen dapat dilakukan dengan lebih baik sebelum pelaporan final ke Inspektorat.

Dalam rangka mempercepat pengumpulan bukti dukung proksi, seluruh Ketua Tim diminta untuk mengisi data proksi lebih awal. Meskipun langkah ini belum sepenuhnya optimal — pengisian dokumen secara lengkap baru terlaksana pada Desember 2025 hingga Januari 2026 — strategi ini menjadi dasar bagi pelaksanaan rutin ke depan. Sebagai tindak lanjut, pengisian proksi direncanakan dilakukan setiap bulan secara berkala oleh masing-masing Ketua Tim, sehingga proses verifikasi data lebih cepat, beban kerja di akhir periode berkurang, dan pengumpulan bukti dukung menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Untuk mendukung pelaksanaan pengisian rutin ini, BPS Kota Palembang menyusun dan mendistribusikan alat monitoring untuk bukti dukung indikator proksi. Alat monitoring ini berfungsi sebagai panduan teknis sekaligus kontrol pelaksanaan tugas, sehingga peran dan tanggung jawab setiap Ketua Tim lebih jelas dan progres pengumpulan dokumen dapat dipantau secara berkala. Monitoring ini diperbarui sehingga pemenuhan dokumen pendukung dapat berjalan lebih terstruktur, tepat waktu, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, pelaporan kinerja SAKIP di BPS Kota Palembang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan organisasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, BPS Kota Palembang telah melakukan inovasi penggunaan teknologi untuk mendukung SAKIP yaitu aplikasi SATU (Sistem Administrasi Terpadu) pada link :

<https://sites.google.com/view/satu-bpskotapalembang/>.

Aplikasi ini meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan pengelolaan data kinerja. Sistem informasi yang baik akan mempercepat proses pelaporan dan evaluasi kinerja. Melalui aplikasi ini pendukung SAKIP dapat di upload pada panel menu “Form Rencana Aksi”.

Gambar 26. Aplikasi SATU (Sistem Adiministrasi Terpadu)



Indikator Kinerja : Indeks Implementasi BerAKHLAK

Indeks Implementasi BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, internalisasi, dan penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta perilaku kerja sehari-hari di lingkungan organisasi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana ASN telah menjadikan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai landasan dalam bekerja, berinteraksi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas pembinaan budaya kerja ASN, mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan,

serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dengan meningkatnya Indeks Implementasi BerAKHLAK, diharapkan terwujud budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Penentuan range target IKU 2025 BPS Kabupaten/Kota didasarkan pada nilai realisasi SBO BPS Kota Palembang 2024 yaitu 55,9 poin dikalikan faktor koreksi 1,16 sehingga diperoleh angka target 64,84 poin.

Tabel 34. Capaian Kinerja Indeks Implementasi BerAKHLAK per Triwulan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks Implementasi BerAKHLAK	Persen	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	112,89

Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-20/02100/PR.710/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Laporan Hasil Survei Budaya Organisasi Tahun 2025, Indeks Implementasi BerAKHLAK pada BPS Kota Palembang sebesar 73,20 poin. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 64,84 poin, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 112,89 persen dan Nilai Akhir Capaian PK sebesar 99 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK di lingkungan BPS Kota Palembang telah berjalan dengan baik dan efektif.

Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya pemahaman dan internalisasi nilai BerAKHLAK oleh pegawai, yang tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari, pola kerja yang profesional, serta meningkatnya kolaborasi dan orientasi pelayanan. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas berbagai upaya penguatan budaya organisasi yang telah dilaksanakan, seperti :

1. ASN Pro (ASN Sehat, Senang dan Produktif)
2. Rapih Kantorku (Rapi,bersih kantorku)

3. Muter Pagi (Mood Booster Pagi-pagi)
4. Kolaborasi (Kota Palembang Berbagi knowledge dan informasi)
5. Kopi Manis (Koordinasi Pagi Menambah Harmonis)
6. Jus Manggis (Jumat Semangat Berbagi Sesama)
7. Sempurna (Seleksi Monthly Pegawai Unggul dan Berintegritas)

Dalam pelaksanaan Indeks Implementasi BerAKHLAK di BPS Kota Palembang masih terdapat beberapa kendala.

Pertama, masih kurangnya proyek pembangunan budaya organisasi yang secara khusus membahas burnout pegawai serta kegiatan sharing knowledge, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan transfer pengetahuan belum berjalan optimal. Kedua, pelaksanaan inovasi budaya kerja sebagai bentuk penerapan nilai-nilai BerAKHLAK belum dilaksanakan secara konsisten dan terjadwal.

Selain itu, pada pelaksanaan penilaian kinerja pegawai melalui sistem SEMPURNA, terdapat kendala pada komponen penilaian antarpegawai (peer assessment). Beberapa pegawai tidak atau terlambat melakukan penilaian, sehingga menghambat proses rekapitulasi dan penyelesaian penilaian kinerja pegawai secara tepat waktu.

Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan burnout pegawai, Change Ambassador BPS Kota Palembang menginisiasi proyek “ASN Pro (ASN Sehat, Senang, dan Produktif)” yang merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya. Proyek ini menjadi wadah bagi pegawai untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga dan seni. Kegiatan olahraga meliputi senam pagi, badminton, jalan pagi, dan biliar, sedangkan pada bidang seni dilaksanakan kegiatan karaoke bersama.

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi serta memberikan ruang bagi pegawai untuk berbagi ilmu, ide, dan informasi, Change Ambassador juga menginisiasi proyek “Kolaborasi (Kota Palembang Berbagi Knowledge dan Informasi)” yang direncanakan untuk dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin. Selain itu, untuk

meningkatkan konsistensi penerapan inovasi budaya kerja, dilakukan penyusunan jadwal pelaksanaan inovasi budaya kerja secara terencana.

Terkait kendala pada penilaian SEMPURNA, BPS Kota Palembang secara aktif melakukan pengingat (reminder) kepada pegawai yang belum melaksanakan penilaian antarpegawai guna mempercepat proses rekapitulasi penilaian kinerja.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, BPS Kota Palembang akan terus mengembangkan dan melaksanakan inovasi “Kolaborasi (Kota Palembang Berbagi Knowledge dan Informasi)” secara berkelanjutan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK. Selain itu, akan disusun laporan aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai bentuk dokumentasi, evaluasi, dan penguatan budaya kerja di lingkungan BPS Kota Palembang.

Rekomendasi Tahun 2026 :

Dalam rangka meningkatkan Indeks Implementasi BerAKHLAK pada tahun 2026, BPS Kota Palembang direkomendasikan untuk mengembangkan dan melaksanakan inovasi *LUR (Logical Brain, Uniteq Squad, Relevant Quiz)* sebagai sarana penguatan budaya kerja, peningkatan kapasitas berpikir logis, kerja tim, serta pemahaman pegawai terhadap tugas dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif pegawai, meningkatkan kolaborasi, serta menciptakan suasana kerja yang adaptif dan produktif. Melalui program LUR, BPS Kota Palembang berkomitmen membangun ekosistem kerja yang tidak hanya mengedepankan profesionalisme, tetapi juga mendukung keberlanjutan produktivitas serta kesejahteraan mental pegawai secara konsisten. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK secara berkala sebagai bentuk dokumentasi, evaluasi, dan monitoring atas penerapan nilai BerAKHLAK di lingkungan BPS Kota Palembang. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan serta referensi dalam penguatan budaya organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan capaian Indeks Implementasi BerAKHLAK sebesar 73,20 poin yang melampaui target, BPS Kota Palembang menunjukkan komitmen nyata

dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK secara efektif di lingkungan kerja. Meskipun terdapat beberapa kendala, upaya perbaikan melalui inovasi budaya kerja dan program kolaborasi telah berhasil mendorong peningkatan budaya organisasi dan profesionalisme. Ke depan, melalui pelaksanaan inovasi LUR (Logical Brain, Uniteq Squad, Relevant Quiz) dan penyusunan laporan aktualisasi nilai-nilai BerAKHLAK, BPS Kota Palembang berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan produktif, sehingga tercipta ekosistem kerja yang profesional dan berkelanjutan.

3.2. Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra

Capaian kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-209 menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Analisis capaian kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana BPS mampu mewujudkan tujuan strategis yang telah dirancang, baik dalam hal penyediaan data statistik, pemenuhan kebutuhan pengguna, maupun peningkatan kualitas layanan statistik.

Setiap indikator kinerja memiliki target spesifik yang dirancang untuk mendukung visi dan misi BPS dalam menghadirkan statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. Melalui capaian kinerja ini, dapat terlihat perbandingan antara realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Tabel 35. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas						

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 2. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 3. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 4. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 5. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas						
Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 6. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas						
Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 7. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 8. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 9. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 10. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas						
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 11. Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah						
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar	Persen	80	98,53	94,58	118,23	95,99
Sasaran 12. Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS						
Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Poin	3,33	4,53	4,26	120	94,04
Sasaran 13. Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota						
Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Poin	74,16	74,20	74,60	100,59	100,54
Indeks Implementasi BerAKHLAK	Poin	64,84	68,84	73,20	112,89	106,33

3.2.1. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas

Keberhasilan pada indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas menunjukkan konsistensi dalam penerapan standar operasional prosedur penjaminan mutu secara disiplin dan menyeluruh. Sampai saat ini, BPS Kota Palembang terus memastikan bahwa setiap laporan yang diterbitkan telah melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan validasi secara berjenjang. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 maupun 2029 dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Faktor keberhasilan penyusunan publikasi/laporan Statistik kependudukan dan Ketenagakerjaan yang berkualitas 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kualitas Kerangka Sampel yang Mutakhir

Hasil updating rumah tangga digunakan sebagai dasar penarikan sampel sekaligus penghitungan penimbang (weighting). Kerangka sampel yang telah diverifikasi dan diperbarui memastikan estimasi ketenagakerjaan lebih representatif dan akurat.

2. Pemeriksaan Berlapis (Layered Quality Control)

Proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap:

- PPL memeriksa kelengkapan dan kewajaran isian sebelum submit.
- PML melakukan pemeriksaan ulang serta approval/reject disertai catatan perbaikan.
- Admin Kabupaten/Kota dan Provinsi melakukan validasi lanjutan melalui sistem.

Mekanisme ini memperkecil potensi kesalahan sebelum data masuk tahap final.

3. Pemanfaatan Sistem Digital Terintegrasi

Penggunaan aplikasi Fasih BPS, FASIH Pendataan, FASIH-SM, dan dashboard monitoring memungkinkan:

- Entri data secara real time
- Deteksi anomali lebih cepat
- Pemantauan progres pencacahan
- Kontrol status dokumen (open, submitted, approved, rejected)

Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi sekaligus akuntabilitas proses.

4. Mekanisme Approval dan Reject yang Jelas

Setiap data yang diragukan dapat dikembalikan (reject) kepada PPL dengan catatan koreksi. Sistem ini memastikan tidak ada data yang disahkan tanpa melalui verifikasi menyeluruh.

5. Supervisi Lapangan yang Intensif

Supervisi dilakukan oleh PML, BPS Kabupaten/Kota, hingga BPS Provinsi, baik saat pencacahan maupun pasca pencacahan. Pengawasan langsung ini menjaga konsistensi penerapan konsep dan definisi.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Rapat evaluasi rutin selama periode pencacahan membahas:

- Konsistensi dan kewajaran isian

- Temuan lapangan
- Mitigasi risiko non-respon
- Evaluasi progres dan anomali

Evaluasi ini mencegah kesalahan berulang dan meningkatkan kualitas data secara berkelanjutan.

7. Koordinasi yang Responsif

Pembentukan grup komunikasi (WhatsApp group) mempercepat penyelesaian kendala lapangan serta memperkuat koordinasi antara PPL, PML, dan penanggung jawab kegiatan.

8. Validasi Akhir oleh Admin/Ketua Tim

Tahap validasi akhir melalui sistem memastikan bahwa hanya data yang telah clean dan memenuhi standar kualitas yang dapat di-approve untuk digunakan dalam penyusunan indikator.

9. Kepatuhan terhadap SOP Penjaminan Mutu

Seluruh tahapan—dari updating, pencacahan, entri, validasi, hingga evaluasi—dilaksanakan sesuai standar operasional, sehingga menjamin akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu publikasi.

Pelaksanaan Sakernas dan Supas 2025 di BPS Kota Palembang berjalan dengan baik berkat penerapan prosedur kerja yang sistematis, pengawasan berlapis, dan pemanfaatan teknologi digital untuk entri dan validasi data. Pemutakhiran rumah tangga yang akurat, kontrol kualitas melalui PML, supervisi lapangan, serta evaluasi berkala menjadi faktor kunci tercapainya target pencacahan dan penarikan sampel secara optimal.

Meskipun terdapat hambatan seperti perubahan dinamika rumah tangga, temuan ketidakwajaran data, dan tantangan koordinasi lapangan, langkah mitigasi melalui supervisi intensif, rapat evaluasi, serta penggunaan sistem monitoring Fasih mampu meminimalkan dampak terhadap kualitas data.

Keberhasilan penyusunan publikasi/laporan ini menunjukkan komitmen penuh BPS Kota Palembang dalam menghasilkan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang valid, reliabel, dan tepat waktu. Data yang diperoleh dari Sakernas dan Supas 2025 diharapkan dapat menjadi acuan yang kredibel bagi

perumusan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang.

3.2.2. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas

Penyusunan publikasi dan laporan statistik kesejahteraan rakyat merupakan salah satu pilar penting dalam menyediakan informasi yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pola konsumsi. Kualitas publikasi ini sangat menentukan relevansi dan akurasi data yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan manusia di tingkat daerah maupun nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPS Kota Palembang telah berhasil mencapai target indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 maupun 2029. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh publikasi/laporan, termasuk hasil survei sosial ekonomi yang memuat informasi menyeluruh tentang kesejahteraan masyarakat, telah disusun melalui mekanisme kontrol kualitas yang ketat, mulai dari pemutakhiran data, pengolahan, hingga analisis dan diseminasi.

Keberhasilan pencapaian target ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Blok Sensus yang Akurat

- Penentuan blok sensus dilakukan dengan identifikasi lapangan dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat sehingga masyarakat mendukung pelaksanaan survei.
- Seluruh rumah tangga di blok sensus didaftarkan dan diperbarui datanya melalui Daftar VSEN25.P.
- Pencatatan bangunan dan rumah tangga secara door-to-door memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Pengawasan dan Supervisi Berlapis

- PML mendampingi pencacahan dan pemutakhiran di lapangan untuk memastikan proses berjalan sesuai SOP.

- Supervisi oleh Kepala BPS Kota Palembang dan pengawas kabupaten/provinsi menjaga kualitas data dari tahap awal hingga akhir.
- Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun melalui sistem monitoring web (SIEMAS), sehingga setiap kesalahan dapat segera diperbaiki.

3. Sistem Digital Terintegrasi

- Aplikasi SIEMAS memungkinkan pemantauan real-time, entri data, pengambilan foto, koordinat lokasi rumah tangga, dan kontrol status dokumen.
- Fasilitas ini membantu PML dan PPL mendeteksi kesalahan lebih awal dan mempermudah validasi data.

4. Skema Kerja yang Terstruktur

- Susenas Maret menggunakan Skema 212, Susenas Februari dan September menggunakan skema terkontrol lainnya, yang mengatur jadwal pencacahan, editing, dan penyerahan dokumen.
- Skema ini memastikan arus kerja lapangan terkontrol, dokumen terinput dengan baik, dan waktu validasi tersedia sebelum laporan final.

5. Entri Data dan Pengolahan Tepat Waktu

- Setelah pemutakhiran, data di entri oleh petugas IPDS dan melalui tahap receiving-batching, editing-coding, hingga entri final sesuai SOP.
- Tahap ini memastikan dokumen siap untuk analisis dan publikasi tanpa keterlambatan.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- Evaluasi dilakukan melalui rapat rutin dan pemantauan progres entri/pencacahan di web monitoring.
- Diskusi poin-poin temuan, anomali, dan non-respon memastikan kesalahan diminimalkan dan kualitas data tetap terjaga.

7. Koordinasi Intensif

- Pembentukan grup komunikasi (WhatsApp) mempercepat penyelesaian masalah lapangan dan koordinasi antara PPL, PML, dan penanggung jawab kegiatan.

- Komunikasi yang cepat membantu mitigasi kendala dan menjaga kontinuitas proses.

8. Kepatuhan terhadap SOP

- Seluruh tahapan dari pemutakhiran blok sensus, penarikan sampel, pencacahan, pengawasan, hingga pengolahan data dilaksanakan sesuai SOP.
- Kepatuhan ini menjamin akurasi, konsistensi, dan validitas data sebagai dasar publikasi statistik yang kredibel.

Capaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas yang berhasil memenuhi target Renstra 2025 dan 2029 menunjukkan bahwa seluruh publikasi telah disusun dengan standar penjaminan kualitas yang ketat, mulai dari pengumpulan data hingga proses analisis dan diseminasi. Keberhasilan ini menegaskan komitmen BPS Kota Palembang dalam menghadirkan data yang valid, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun terdapat tantangan di lapangan, seperti perubahan kondisi rumah tangga dan kebutuhan supervisi intensif, mekanisme kontrol kualitas, pengawasan berlapis, serta evaluasi berkala telah memastikan bahwa publikasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan terpercaya bagi pemerintah daerah. Ke depan, keberlanjutan penerapan standar kualitas ini akan tetap menjadi fokus utama untuk menjaga kredibilitas dan relevansi statistik kesejahteraan rakyat di Kota Palembang.

3.2.3. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

Penyusunan publikasi dan laporan statistik ketahanan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam menggambarkan kondisi sosial masyarakat. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko sosial dan penguatan ketahanan masyarakat di tingkat lokal.

BPS Kota Palembang pada tahun 2025 telah berhasil mencapai target indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas sebesar 100 persen, yang sesuai dengan target Renstra 2025 maupun 2029. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh publikasi disusun melalui mekanisme kontrol kualitas yang ketat, mulai dari pengumpulan data, pemutakhiran blok sensus, pengolahan, hingga validasi dan diseminasi laporan.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penguatan SDM Petugas – Melibatkan petugas lapangan (PCL) dan pengawas lapangan (PML) yang memiliki kompetensi statistika dan pemahaman prosedur operasional standar, serta dilengkapi dengan briefing dan pelatihan sebelum pelaksanaan.
2. Pemutakhiran Data yang Teliti – Pemutakhiran blok sensus dan rumah tangga dilakukan secara door-to-door untuk memastikan akurasi populasi rumah tangga serta kondisi sosial masyarakat.
3. Pengawasan dan Monitoring Berlapis – PML, Kepala BPS Kota Palembang, serta sistem web monitoring memantau seluruh proses pemutakhiran dan pendataan, sehingga konsistensi dan kewajaran data dapat dijaga.
4. Pemanfaatan aplikasi berbasis CAPI yang memungkinkan proses pengolahan dan pemeriksaan data dilakukan secara real time sehingga meminimalkan kesalahan input dan inkonsistensi data.
5. Koordinasi dan Komunikasi Efektif – Pembentukan grup komunikasi, rapat evaluasi berkala, dan koordinasi intensif antar petugas memastikan kendala di lapangan dapat segera ditangani dan kualitas data tetap terjaga.
6. Kepatuhan terhadap SOP memastikan pengumpulan data berlangsung efisien dan terkontrol.

Faktor-faktor tersebut secara sinergis mendukung tercapainya kualitas publikasi dan laporan statistik ketahanan sosial.

Capaian 100 persen pada indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk target tahun 2025 dan 2029 menunjukkan keberhasilan BPS Kota Palembang dalam menghadirkan data yang

valid, akurat, dan tepat waktu. Keberhasilan ini menegaskan komitmen institusi dalam menyediakan basis data yang dapat dijadikan rujukan strategis bagi pengambilan kebijakan sosial di tingkat daerah. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan pendataan, seperti :

1. Keterlambatan penyampaian data dan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas, atau instansi terkait khususnya dari Polrestabes Palembang
2. Narasumber merupakan pejabat baru sehingga tidak mengetahui persis keadaan wilayahnya. Bahkan beberapa pejabat desa yang baru tidak memiliki arsip data tahun sebelumnya disebabkan data tidak diserahkan oleh pejabat.
3. Data tidak tersedia di desa/kelurahan. Data tidak termutakhirkan dengan baik dan konsepnya berbeda.
4. Aplikasi CAPI error dan beberapa data hilang setelah direject.
5. Masih terdapat infrastruktur yang double counting dan tidak jelas penamaannya sehingga pemeriksa/pengawas harus mengkonfirmasi ulang ke petugas.

Dari hambatan-hambatan yang ada, adapun solusi-solusi yang dilakukan antara lain:

1. Untuk mengatasi keterlambatan penyampaian data dari instansi terkait, tim sosial BPS Kota Palembang melakukan langkah-langkah yang bersifat proaktif dan kolaboratif baik melalui komunikasi intensif seperti berkomunikasi melalui pesan chat dan juga melakukan kunjungan berulang secara langsung yang terbukti lebih efektif dalam mendorong percepatan respons. Adapun kunjungan ulang yang dilakukan oleh petugas dilakukan sebanyak dua kali, sampai dengan data didapatkan secara lengkap dan akurat.
2. Memberikan data pre pendataan yang berisi tentang data tahun sebelumnya. Selain itu, pendataan juga didampingi oleh operator dan

perangkat kelurahan lainnya yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan.

3. Pendataan mengikuti konsep yang telah diberikan saat pelatihan, sehingga petugas menjelaskan kepada narasumber mengenai konsep yang ada.
4. Meminta petugas untuk melakukan log out yang sebelumnya telah dipastikan data yang belum disubmit untuk disubmit. Setelah log out data yang hilang akan muncul kembali.
5. Penanggung jawab melakukan tabulasi infrastruktur yang ada yang telah diinput oleh petugas, yang kemudian bersama dengan pengawas melakukan pemeriksaan

Secara keseluruhan, pencapaian optimal pada indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk target 2025 dan 2029, menjadi bukti nyata komitmen dalam menghasilkan data yang akurat, andal, dan tepat waktu. Ke depan, upaya peningkatan kualitas akan terus dilakukan melalui penguatan metodologi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga statistik yang dihasilkan semakin mampu mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.

3.2.4. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas

Indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas merupakan tolok ukur penting dalam menjamin tersedianya data pertanian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan ketahanan pangan, stabilitas harga komoditas, pengendalian inflasi, serta perencanaan pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen kuat dalam menerapkan standar penjaminan kualitas data, mulai dari tahapan pengumpulan data di lapangan, pengolahan, pemeriksaan, hingga proses validasi

dan diseminasi. Setiap publikasi yang dihasilkan telah melalui mekanisme pengendalian mutu yang ketat guna memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran data, sehingga mampu menjadi rujukan yang kredibel bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian kinerja. Sebagai penyelenggara statistik dasar, Badan Pusat Statistik memiliki tanggung jawab memastikan kualitas publikasi melalui tata kelola yang baik dan pengendalian mutu yang ketat

Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam kendali organisasi.:

1. Perencanaan dan Manajemen Kegiatan

- Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan yang realistis.
- Penetapan target kinerja yang terukur.
- Identifikasi potensi risiko sejak awal kegiatan.
- Koordinasi internal tim statistik pertanian.

Perencanaan yang baik berkontribusi langsung terhadap ketepatan waktu dan kelancaran publikasi.

2. Kompetensi dan Kapasitas SDM

- Proses rekrutmen petugas yang selektif.
- Pelatihan teknis sebelum pelaksanaan survei.
- Pemahaman konsep dan definisi statistik pertanian.
- Kemampuan penggunaan aplikasi pengolahan data.
- Integritas dan kedisiplinan petugas.

SDM yang kompeten berpengaruh terhadap akurasi data dan minimnya kesalahan saat pengolahan.

3. Kepatuhan terhadap SOP dan Standar Mutu

- Pelaksanaan survei sesuai pedoman teknis.
- Proses editing, validasi, dan verifikasi berjenjang.
- Dokumentasi dan administrasi yang lengkap.

Kepatuhan terhadap SOP menjamin konsistensi dan kredibilitas publikasi.

4. Sistem Pengawasan dan Monitoring

- Supervisi lapangan oleh pengawas (PMS).
- Monitoring progres melalui dashboard/aplikasi manajemen survei.
- Evaluasi rutin terhadap capaian dan kendala.

Monitoring yang efektif mencegah kesalahan berlanjut hingga tahap publikasi.

5. Dukungan Teknologi Informasi

- Pemanfaatan aplikasi sistem pengolahan online seperti <https://ksa.bps.go.id/jagung> dan <https://ksapro-manajemen.bps.go.id>. dan lain-lain
- Keamanan data melalui VPN.
- Ketersediaan perangkat dan jaringan yang memadai.

Teknologi mempercepat proses pengolahan serta meningkatkan efisiensi kerja.

Faktor eksternal merupakan faktor di luar kendali langsung organisasi, namun mempengaruhi pencapaian kinerja.

1. Koordinasi dengan Instansi Mitra

- Dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Kerja sama aparat wilayah (SLS/RT/RW).
- Keterlibatan petugas UPTD dalam pencacahan.

Koordinasi yang baik memperlancar pengumpulan dokumen dan validasi data.

2. Partisipasi dan Respons Responden

- Kesiediaan petani untuk diwawancarai.
- Keterbukaan dalam memberikan informasi produksi.
- Ketepatan informasi waktu panen.

Tingkat respons yang tinggi meningkatkan kualitas data dasar.

3. Kondisi Geografis dan Cuaca

- Segmen tidak dapat diakses akibat banjir.
- Perubahan kondisi lahan akibat alih fungsi.

- Faktor musim yang memengaruhi jadwal panen.

Kondisi ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kelengkapan data.

4. Perubahan Kebijakan dan Dinamika Sektor Pertanian

- Perubahan pola tanam.
- Fluktuasi harga komoditas.
- Kebijakan pemerintah terkait komoditas strategis.

Dinamika ini memerlukan penyesuaian dalam proses validasi dan analisis data.

Penguatan faktor internal (SDM, pengawasan, dan teknologi) terbukti mampu memitigasi dampak faktor eksternal, sehingga publikasi tetap dapat diselesaikan sesuai target dan standar mutu yang ditetapkan. Meskipun berbagai faktor internal dan eksternal telah mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan maupun pada tahap pengolahan data. Kendala tersebut merupakan bagian dari dinamika operasional kegiatan statistik yang perlu dikelola secara sistematis agar tidak berdampak signifikan terhadap kualitas dan ketepatan waktu publikasi.

Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan secara komprehensif disertai langkah-langkah solusi dan mitigasi yang tepat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengendalian mutu dan perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja, sehingga capaian indikator tetap dapat dipertahankan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Solusi

1. Keterbatasan Kapasitas SDM

Kendala:

- Tidak semua petugas memiliki pemahaman konsep yang sama kuat.
- Perbedaan tingkat pengalaman petugas dalam penggunaan aplikasi.

Solusi:

- Pelaksanaan pelatihan teknis dan refreshment materi secara berkala.

- Pembinaan langsung oleh pengawas (PMS).
- Pendampingan saat awal masa pengamatan.

2. Potensi Kesalahan Pencatatan dan Anomali Data

Kendala:

- Ditemukan data anomali yang memerlukan konfirmasi ulang.
- Kesalahan pengkodean hasil amatan (misalnya segmen tidak dapat diakses).

Solusi:

- Pemeriksaan dan validasi berjenjang sebelum finalisasi.
- Tindak lanjut cepat terhadap data tidak wajar.
- Monitoring melalui dashboard manajemen survei.

3. Keterlambatan Pengumpulan Dokumen

Kendala:

- Keterlambatan pemasukan dokumen dari lapangan.
- Ketidakesesuaian jadwal dengan realisasi lapangan.

Solusi:

- Reminder rutin kepada petugas dan mitra.
- Monitoring progres harian/mingguan.
- Penegasan tenggat waktu yang jelas.

4. Kendala Teknis Perangkat dan Jaringan

Kendala:

- Memori HP petugas penuh sehingga proses pengambilan foto lambat.
- Gangguan jaringan internet saat pengiriman data.

Solusi:

- Pembersihan dan optimalisasi perangkat secara berkala.
- Pengiriman data pada lokasi dengan jaringan stabil.
- Backup data sebelum pengiriman.

5. Responden Sulit Ditemui atau Menolak

Kendala:

- Rumah tangga tidak berada di tempat saat listing.
- Penolakan untuk diwawancarai.

Solusi:

- Kunjungan ulang (revisit).
- Koordinasi dengan ketua SLS/RT/RW.
- Pendekatan persuasif dan edukasi pentingnya data statistik.

6. Segmen Tidak Dapat Diakses

Kendala:

- Kondisi banjir atau akses jalan sulit.

Solusi:

- Pengkodean sesuai SOP dan pembuatan berita acara.
- Penggantian kode amatan sesuai ketentuan.
- Koordinasi dengan admin untuk penyesuaian status segmen.

7. Terjadinya Lewat Panen pada Ubinan

Kendala:

- Kurangnya koordinasi waktu panen dengan petani.

Solusi:

- Meningkatkan komunikasi intensif dengan petani.
- Monitoring jadwal panen secara lebih aktif.
- Pencatatan nomor kontak petani untuk konfirmasi cepat.

Secara keseluruhan, berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dapat diatasi melalui langkah-langkah solusi yang cepat, tepat, dan terukur. Upaya mitigasi yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen terhadap pengendalian mutu dan perbaikan berkelanjutan, sehingga tidak mengurangi kualitas publikasi yang dihasilkan. Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, diharapkan capaian indikator Persentase

Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode mendatang.

3.2.5. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas

Subsektor Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan merupakan bagian penting dalam Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, serta ketahanan pangan dan protein hewani masyarakat. Data statistik yang akurat dan tepat waktu pada ketiga subsektor ini menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perhitungan PDB/PDRB, penyusunan supply-demand komoditas, serta evaluasi program pemerintah.

Sebagai penyelenggara statistik dasar, Badan Pusat Statistik memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan publikasi dan laporan statistik yang memenuhi standar kualitas, yaitu relevan, akurat, konsisten, mutakhir, dan tepat waktu. Pada level kabupaten/kota, pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan melalui berbagai survei rutin, antara lain:

- Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) dan Survei Perusahaan Budidaya Ikan (LTB)
- Survei Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Triwulanan
- Survei Perusahaan Kehutanan Tahunan

Indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menghasilkan laporan yang sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 dan 2029, capaian indikator ini mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh laporan yang menjadi target telah diselesaikan sesuai dengan standar kualitas dan ketepatan waktu.

Keberhasilan pencapaian indikator sebesar 100 persen pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang berjalan secara sinergis.

Faktor Internal

1. Perencanaan dan Manajemen Kinerja yang Terstruktur

- Penyusunan jadwal pendataan bulanan, triwulanan, dan tahunan secara sistematis.
- Penetapan target yang jelas dan terukur.
- Rapat koordinasi internal sebelum masa pendataan.
- Identifikasi risiko sejak tahap persiapan.

Perencanaan yang baik memastikan tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengumpulan maupun pengolahan data.

2. Kompetensi dan Profesionalisme SDM

- Petugas pencacah (PPL) dan pengawas (PML/PMS) memiliki pemahaman konsep yang baik.
- Pelaksanaan briefing dan pembekalan sebelum kegiatan lapangan.
- Penguasaan aplikasi CAPI dan sistem pengolahan data.
- Disiplin dalam memenuhi tenggat waktu.

Kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menjaga akurasi dan konsistensi data.

3. Kepatuhan terhadap SOP dan Standar Mutu

- Pelaksanaan pendataan sesuai pedoman teknis.
- Pemeriksaan dan validasi data secara berjenjang.
- Dokumentasi administrasi yang lengkap.
- Tindak lanjut cepat terhadap data anomali.

Kepatuhan terhadap SOP menjamin publikasi memenuhi aspek relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu

- Supervisi oleh pengawas.
- Monitoring progres assignment secara berkala.
- Evaluasi capaian target setiap periode pendataan.

Pengawasan yang konsisten mencegah terjadinya kesalahan berulang.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penggunaan moda CAPI menggantikan PAPI untuk meningkatkan efisiensi.
- Pengolahan data melalui sistem online.
- Keamanan data melalui sistem login dan monitoring berbasis web.

Teknologi mendukung percepatan proses dan meningkatkan akurasi hasil.

Faktor Eksternal

1. Koordinasi dengan Instansi dan Mitra

- Kerja sama yang baik dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Dukungan dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Rumah Potong Hewan (RPH).
- Koordinasi dengan perusahaan kehutanan.

Hubungan yang baik meningkatkan response rate dan kelengkapan data.

2. Tingkat Respons Responden

- Kesiediaan instansi dan perusahaan memberikan data.
- Komunikasi aktif antara petugas dan responden.

Tingkat respons yang tinggi berkontribusi pada tercapainya target 100 persen.

Meskipun berbagai faktor internal dan eksternal telah mendukung tercapainya indikator sebesar 100 persen pada tahun 2025 dan 2029, dalam pelaksanaannya tetap terdapat sejumlah kendala yang dihadapi baik pada tahap pengumpulan, pengolahan, maupun penyusunan publikasi. Kendala tersebut merupakan bagian dari dinamika operasional kegiatan statistik yang memerlukan penanganan sistematis agar tidak berdampak pada kualitas dan ketepatan waktu laporan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan penerapan solusi yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan capaian kinerja.

Kendala dan Solusi

1. Ketidakkonsistenan Pengisian Data

Kendala:

Terdapat perbedaan interpretasi konsep oleh responden atau petugas yang dapat memengaruhi konsistensi data antar periode.

Solusi:

- Pemberian pembekalan ulang (refreshing konsep).
- Penerapan validasi berjenjang sebelum finalisasi data.
- Koordinasi langsung dengan responden apabila terdapat anomali.

2. Kendala Teknis Aplikasi atau Jaringan

Kendala:

Gangguan jaringan internet atau kendala teknis pada sistem dapat memperlambat proses pengiriman data.

Solusi:

- Penginputan data secara offline dan sinkronisasi saat jaringan stabil.
- Koordinasi dengan tim teknis apabila terjadi error sistem.
- Penjadwalan input data di luar jam sibuk jaringan.

3. Keterlambatan Penyampaian Data oleh Responden

Kendala:

Beberapa instansi atau perusahaan terlambat menyampaikan laporan karena kesibukan operasional.

Solusi:

- Melakukan kunjungan ulang/revisit bersama dengan ketua tim Statistik Pertanian BPS Provinsi Sumatera Selatan



Secara keseluruhan, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan statistik dapat diantisipasi dan ditangani melalui langkah-langkah solusi yang terukur dan berorientasi pada pengendalian mutu. Pendekatan perbaikan berkelanjutan ini memastikan bahwa kualitas publikasi tetap terjaga, sehingga capaian indikator sebesar 100 persen tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga semakin diperkuat pada periode perencanaan berikutnya.

3.2.6. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas

Indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menghasilkan laporan statistik industri yang memenuhi standar kualitas, meliputi aspek akurasi, konsistensi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap metodologi. Pada Tahun 2025 dan 2029, target indikator ditetapkan sebesar 100 persen. Realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Dengan demikian, indikator ini berhasil mencapai target secara penuh.

Capaian 100 persen pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh laporan statistik industri yang menjadi target telah diselesaikan tepat waktu, memenuhi standar kualitas dan metodologi; melalui proses validasi dan pengendalian mutu berjenjang dan ditindaklanjuti terhadap temuan anomali sebelum finalisasi data.

Pelaksanaan kegiatan statistik industri melibatkan proses listing, pencacahan sampel usaha rumah tangga, pengawasan, serta perbaikan data melalui aplikasi FASIH Mobile. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas manajemen kegiatan, koordinasi internal tim Statistik Pertanian dan Industri, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kualitas data.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target 100 persen antara lain:

1. **Perencanaan Kegiatan yang Sistematis**

Jadwal listing dan pencacahan disusun secara terstruktur sehingga pelaksanaan berjalan sesuai timeline.

2. Kepatuhan terhadap SOP

Seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaporan, dilaksanakan sesuai pedoman teknis dan standar metodologi.

3. Kompetensi dan Komitmen SDM

Petugas dan pengawas memahami konsep klasifikasi KBLI serta mekanisme validasi data.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan FASIH Mobile mempercepat proses pengumpulan dan perbaikan data.

5. Pemeriksaan oleh PML dan perbaikan anomali berdasarkan hasil analisis tingkat provinsi memastikan kualitas data sebelum finalisasi

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, antara lain keterlambatan assign dokumen akibat gangguan jaringan dan responden yang sulit ditemui atau cenderung menolak. Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi pendataan sementara menggunakan kuesioner sebelum input ke system, perbaikan langsung di FASIH Mobile, supervisi dan klarifikasi ulang oleh pengawas dan kunjungan ulang kepada responden bersama pengawas.

Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan operasional di lapangan, permasalahan tersebut dapat segera diatasi melalui langkah perbaikan yang tepat sehingga tidak memengaruhi kualitas maupun ketepatan waktu penyusunan laporan. Capaian ini mencerminkan komitmen, efektivitas koordinasi tim, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kualitas data statistik industri.

Dengan capaian tersebut, target kinerja sebesar 100 persen tidak hanya berhasil direalisasikan pada Tahun 2025, tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan target yang sama hingga Tahun 2029.

3.2.7. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas

Statistik Distribusi memiliki peran strategis dalam menggambarkan perkembangan sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, ekspedisi, serta

aktivitas distribusi barang dan jasa yang mendukung kelancaran perekonomian. Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan indikator ekonomi, analisis inflasi, perhitungan PDRB, serta perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan transportasi.

Sebagai penyelenggara statistik dasar, Badan Pusat Statistik bertanggung jawab menghasilkan statistik distribusi yang berkualitas, yaitu relevan, akurat, konsisten, mutakhir, dan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan Statistik Distribusi mencakup berbagai survei rutin, antara lain SPUNP, Poldis, VPEK, STKU, UDP, Kompilasi Data Transportasi, serta SAPB yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laporan yang memenuhi standar kualitas metodologi dan ketepatan waktu penyelesaian. Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh laporan statistik distribusi telah disusun sesuai standar yang ditetapkan. Target yang sama juga ditetapkan hingga Tahun 2029 sebesar 100 persen sebagai bentuk komitmen untuk mempertahankan kualitas dan konsistensi kinerja.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengolahan data dalam rangka mendukung penyusunan laporan statistik distribusi. Keberhasilan pencapaian indikator sebesar 100 persen untuk target 2025 dan 2029 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Koordinasi yang Sistematis

- Penyusunan jadwal kegiatan survei secara terstruktur.
- Pelaksanaan pelatihan/briefing petugas sebelum kegiatan lapangan.
- Koordinasi intensif antara BPS kabupaten/kota dan BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Perencanaan yang baik memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai timeline.

2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan

- Pelatihan daring SPUNP, Poldis, dan VPEK melalui Zoom Meeting.

- Pembekalan teknis terkait konsep, definisi operasional, dan mekanisme pengisian kuesioner.
- Keterlibatan PML, PCL, dan penanggung jawab kegiatan dalam proses pembelajaran.

Pemahaman konsep yang baik meminimalkan kesalahan isian dan meningkatkan kualitas data.

3. Tingkat Respons (Response Rate) yang Optimal

Seluruh survei Statistik Distribusi Tahun 2025 mencapai response rate sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan petugas dalam menjalin komunikasi dengan responden serta memastikan kelengkapan dokumen.

4. Pengawasan dan Supervisi Berjenjang

- Pemeriksaan dokumen oleh pengawas sebelum pengolahan.
- Supervisi lapangan untuk memastikan keakuratan informasi.
- Validasi data di tingkat provinsi sebelum finalisasi.

Sistem pengawasan ini menjamin kualitas dan konsistensi data sebelum disusun menjadi laporan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (CAPI dan Web Entri)

- Penggunaan metode CAPI pada STKU, UDP, dan VPEK yang mempercepat proses validasi.
- Pengolahan berbasis web entri untuk Poldis dan survei lainnya.
- Peningkatan performa aplikasi yang lebih stabil dan efisien.

Digitalisasi proses pengumpulan dan pengolahan data meningkatkan akurasi serta ketepatan waktu penyelesaian laporan.

6. Kepatuhan terhadap SOP dan Jadwal yang Ditetapkan

Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pelaksanaan lapangan hingga pengolahan dan pengiriman dokumen ke tingkat pusat, dilaksanakan sesuai SOP dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan.

Selain faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan, terdapat pula beberapa hambatan yang dapat memengaruhi keberlanjutan kualitas kinerja.

Faktor penghambat yang berpotensi mempengaruhi pencapaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas, meskipun pada Tahun 2025 telah mencapai 100 persen:

1. Kendala Teknis dan Infrastruktur

- Gangguan jaringan internet saat pelaksanaan CAPI atau web entri.
- Error atau maintenance aplikasi pengolahan data.

2. Tantangan dalam Pengumpulan Data

- Responden sulit ditemui karena mobilitas tinggi (khususnya sektor transportasi dan perdagangan).
- Perubahan struktur usaha (tutup/pindah alamat).
- Ketidaksiapan dokumen administrasi responden saat pencacahan.

4. Risiko Ketidakkonsistenan Data

- Perbedaan pemahaman konsep dan definisi operasional antarpetugas.
- Kesalahan pengisian akibat kurang teliti.
- Kebutuhan klarifikasi berulang yang memperpanjang waktu pengolahan.

5. Faktor Eksternal

- Kondisi cuaca ekstrem yang menghambat kegiatan lapangan.
- Gangguan sosial atau kebijakan tertentu yang membatasi mobilitas.
- Perubahan regulasi yang berdampak pada mekanisme pengumpulan data.

6. Tekanan Ketepatan Waktu

- Jadwal kegiatan yang padat dan beririsan dengan survei lain.
- Batas waktu pengiriman dokumen ke tingkat pusat yang ketat.
- Proses validasi berulang yang memerlukan koordinasi lintas level.

Capaian ini didukung oleh perencanaan yang sistematis, pelaksanaan pelatihan petugas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (CAPI dan web entri), serta pengawasan berjenjang yang memastikan keakuratan dan konsistensi data. Tingkat pemasukan dokumen (response rate) yang mencapai 100 persen

juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan survei dan koordinasi yang baik antara petugas dan responden

4.2.1. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas

Indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat ketercapaian penyusunan dan penyampaian publikasi statistik harga yang memenuhi aspek ketepatan waktu, kelengkapan substansi, akurasi data, serta kesesuaian dengan standar metodologi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Indikator ini menjadi tolok ukur profesionalisme dalam penyediaan data harga, termasuk BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi Kota Palembang, Laporan Inflasi Kota Palembang Januari-Desember 2025 dan Laporan Pelaksanaan Statistik Harga 2025.

Rilis Perkembangan IHK/Inflasi bulanan yang dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan jadwal Advance Release Calendar (ARC) mencerminkan komitmen dalam menjaga kredibilitas dan transparansi data statistik. BRS ini tidak hanya menyajikan angka inflasi m-to-m dan y-on-y, tetapi juga analisis perkembangan harga, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi, serta komoditas dominan yang memengaruhi dinamika harga di Kota Palembang. Dengan demikian, BRS statistik harga berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah.

Publikasi dan laporan statistik harga yang mencakup kegiatan Survei Harga Produsen (SHP), Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB), Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), Survei Volume Penjualan Eceran Beras (SVPEB), Survei Volume Komoditas Spesifik (SVK), serta rilis inflasi telah dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengolahan, hingga diseminasi, berjalan sesuai rencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian, capaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas terealisasi sebesar 100 persen, baik terhadap target Tahun 2025 maupun target jangka menengah Tahun 2029.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Konsistensi Ketepatan Waktu Rilis (On Schedule ARC)

Seluruh rilis IHK/Inflasi bulanan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Advance Release Calendar, sehingga menjamin kepastian informasi bagi pengguna data.

2. Perencanaan dan Persiapan yang Matang

Seluruh kegiatan telah diawali dengan rapat koordinasi, penyusunan jadwal, serta antisipasi terhadap potensi kendala lapangan seperti non-respon atau pergantian sampel.

3. Kualitas Data dan Proses Pengolahan yang Terstandar

Data inflasi dihasilkan melalui proses pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan yang mengikuti metodologi nasional sehingga menjamin akurasi dan konsistensi data.

4. Pengawasan dan Validasi Berlapis

Adanya proses supervisi, validasi harga ekstrem, serta rekonsiliasi data memastikan publikasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan substansi maupun teknis.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi web entry (SHP, SHPB, SHKK) serta CAPI melalui aplikasi FASIH mendukung ketepatan waktu, kemudahan monitoring, dan pengendalian mutu data dan sistem rilis berbasis web mendukung efisiensi proses, meminimalkan kesalahan entri, serta mempercepat penyampaian informasi kepada publik.

6. Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Responden

Kerja sama dengan responden, dinas teknis, serta instansi terkait mendukung kelengkapan dan validitas data yang dikumpulkan dan kehadiran pemerintah daerah, OPD, dan instansi terkait dalam setiap rilis menunjukkan sinergi yang kuat dalam pemanfaatan data statistik harga sebagai dasar pengambilan kebijakan.

7. Komitmen terhadap Transparansi dan Diseminasi Terbuka

BRS yang dapat diakses melalui laman resmi BPS Kota Palembang memperkuat prinsip keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang dihasilkan.

Di samping berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang perlu diantisipasi guna menjaga keberlanjutan kualitas publikasi/laporan Statistik Harga, sebagai berikut:

1. Kendala Lapangan dan Respons Responden
 - Pergantian responden atau tutupnya usaha sampel.
 - Responden tidak berada di tempat pada periode pencacahan.
 - Keterlambatan penyampaian data harga dari mitra atau pedagang.
2. Fluktuasi Harga yang Ekstrem dan Dinamis
 - Perubahan harga yang sangat cepat pada komoditas volatile food.
 - Perbedaan kualitas atau spesifikasi barang yang memerlukan klarifikasi ulang.
 - Kebutuhan validasi tambahan terhadap anomali harga.
3. Kendala Teknis Sistem dan Infrastruktur
 - Gangguan jaringan internet saat penggunaan web entry atau CAPI (FASIH).
 - Pemeliharaan sistem (maintenance) yang beririsan dengan jadwal pengolahan.
 - Keterbatasan perangkat pendukung kegiatan lapangan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Beban kerja tinggi terutama menjelang jadwal rilis inflasi.
 - Perbedaan pemahaman konsep dan definisi operasional antartetugas.
 - Kebutuhan pembinaan berkelanjutan bagi petugas baru.
5. Tekanan Ketepatan Waktu Rilis (ARC)
 - Jadwal rilis inflasi yang sangat ketat sehingga memerlukan proses validasi cepat namun tetap akurat.
6. Faktor Eksternal

- Kondisi cuaca atau gangguan sosial yang memengaruhi aktivitas pasar.
- Kebijakan pemerintah yang berdampak pada pola distribusi dan harga komoditas tertentu.

Identifikasi faktor-faktor penghambat tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi risiko, sehingga kualitas, akurasi, dan ketepatan waktu publikasi Statistik Harga dapat terus dipertahankan hingga target jangka menengah Tahun 2029.

3.2.9. Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas

Indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan statistik yang memenuhi aspek ketepatan waktu, kelengkapan substansi, akurasi, konsistensi metodologi, serta kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Indikator ini mencerminkan komitmen dalam menyediakan data sektoral yang andal sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025, laporan kegiatan statistik yang mencakup sektor Keuangan, Teknologi Informasi, serta Pariwisata—termasuk Koperasi Simpan Pinjam, Valuta Asing, BUMD, Survei Jasa Akomodasi (VHTS dan VHTL), Survei Penyedia Makanan dan Minuman (VREST), Statistik E-Commerce dan Survei Daya Tarik Wisata (VDTW)—telah disusun sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengolahan, hingga penyusunan laporan akhir, dilaksanakan secara sistematis dan sesuai pedoman teknis.

Dengan pelaksanaan yang terencana dan pengendalian mutu yang baik, capaian indikator Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas pada Tahun 2025 terealisasi sebesar

100 persen, serta selaras dengan target jangka menengah hingga Tahun 2029 sebesar 100 persen.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Perencanaan dan Penjadwalan yang Matang
Jadwal pelaksanaan kegiatan lapangan, pengolahan, hingga penyusunan laporan telah direncanakan secara sistematis sehingga setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Kepatuhan terhadap SOP dan Pedoman Teknis
Seluruh proses pendataan dan penyusunan laporan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, sehingga menjamin konsistensi dan kualitas output.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (CAPI/FASIH)
Penggunaan aplikasi berbasis CAPI mendukung efisiensi pengumpulan data, meminimalkan kesalahan entri, dan mempercepat proses pengolahan.
4. Pengawasan dan Monitoring Berjenjang
Adanya briefing, monitoring, serta evaluasi berkala oleh penanggung jawab kegiatan memastikan kendala dapat segera diatasi tanpa mengganggu jadwal penyusunan laporan.
5. Kerja Sama Tim yang Solid
Sinergi antara petugas lapangan, pengawas, dan subject matter mendukung kelengkapan data serta kelancaran proses finalisasi laporan.
6. Pengendalian Mutu dan Validasi Data
Proses pemeriksaan dan klarifikasi data, termasuk kunjungan ulang apabila diperlukan, memastikan laporan yang disusun memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi.

Di samping faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang perlu diantisipasi agar kualitas publikasi Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tetap terjaga, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Respons dan Ketersediaan Data
 - Responden sektor keuangan atau usaha pariwisata yang memiliki kebijakan internal terkait kerahasiaan data.
 - Keterlambatan penyediaan laporan administrasi dari koperasi, BUMD, atau pelaku usaha.
 - Tingkat kesibukan responden (hotel, restoran, pengelola destinasi) yang tinggi pada periode tertentu.
2. Dinamika dan Perubahan Karakteristik Usaha
 - Perubahan status usaha (tutup sementara/permanen, pindah lokasi, perubahan kepemilikan).
 - Perkembangan pesat sektor e-commerce dan teknologi informasi yang memerlukan penyesuaian konsep dan instrumen.
3. Kendala Teknis dan Infrastruktur
 - Gangguan jaringan internet saat pelaksanaan CAPI/FASIH.
 - Kendala perangkat atau aplikasi yang memerlukan pembaruan sistem.
 - Sinkronisasi data yang membutuhkan waktu tambahan pada tahap pengolahan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Beban kerja yang meningkat ketika beberapa survei dilaksanakan secara bersamaan.
 - Perbedaan pemahaman konsep antarpetugas yang memerlukan pembinaan lanjutan.
 - Kebutuhan adaptasi bagi petugas baru terhadap metodologi survei sektoral.
5. Tekanan Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan
 - Proses klarifikasi data yang berulang sehingga berpotensi memperpanjang waktu pengolahan.
6. Faktor Eksternal
 - Kondisi ekonomi atau kebijakan tertentu yang memengaruhi aktivitas usaha responden.
 - Gangguan cuaca atau situasi tertentu yang membatasi mobilitas petugas lapangan.

Identifikasi faktor-faktor penghambat ini menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi risiko dan peningkatan kualitas berkelanjutan, sehingga capaian indikator sebesar 100 persen dapat dipertahankan hingga Tahun 2029.

3.2.10. Persentase Publikasi/ Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas

Indikator ini merupakan instrumen fundamental dalam mengukur kesehatan ekonomi Kota Palembang melalui pendekatan nilai tambah bruto (PDRB) dari sisi lapangan usaha. Kualitas laporan neraca produksi mencerminkan kemampuan BPS dalam mengintegrasikan berbagai data sektoral menjadi satu gambaran utuh mengenai struktur pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Keberhasilan ini ditandai dengan minimalnya revisi angka statistik serta ketepatan waktu rilis yang konsisten. Capaian tahun 2025 ini membuktikan bahwa penguatan koordinasi data sektoral dengan dinas-dinas terkait serta penyempurnaan metodologi penghitungan telah berjalan sesuai dengan standar Satu Data Indonesia.

Keberhasilan BPS Kota Palembang dalam menjaga kualitas tinggi pada laporan Neraca Produksi didukung oleh integrasi data yang kuat, analisis fenomena yang tajam, serta inovasi dalam survei sektoral. Berikut adalah pilar utama pendorong capaian tersebut:

1. Konsistensi Rekonsiliasi dan Harmonisasi Data. Pelaksanaan Rekonsiliasi PDRB Triwulanan memastikan terciptanya angka final yang koheren. Proses ini menjamin tidak adanya disparitas data antar-satuan kerja sehingga tabel pokok PDRB yang dihasilkan memiliki validitas tinggi sebelum dirilis ke publik.
2. Penguatan Narasi Melalui Analisis Fenomena Ekonomi. Penyusunan publikasi Neraca Produksi tidak hanya berfokus pada angka, tetapi didukung oleh penyusunan fenomena ekonomi yang mendalam di setiap triwulan. Identifikasi peristiwa ekonomi di lapangan—seperti dampak musiman, kebijakan pemerintah, hingga pergeseran pola produksi—memungkinkan BPS

menyajikan narasi pertumbuhan ekonomi yang kontekstual dan informatif, baik dalam rilis berkala maupun publikasi tahunan periode 2020-2024.

3. Penyediaan Basis Data melalui Survei Khusus (SKTNP). Keberhasilan penghitungan nilai tambah bruto juga didorong oleh kelancaran pelaksanaan Survei Khusus Neraca Pendapatan Nasional (SKTNP) Barang dan Jasa sepanjang tahun 2025. Data yang diperoleh dari survei ini menjadi input vital dalam memotret struktur biaya dan produksi lapangan usaha secara lebih presisi.
4. Adaptabilitas terhadap Isu Strategis Nasional. Keberhasilan kinerja tahun ini juga diperkuat dengan keterlibatan BPS dalam Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Keterlibatan dalam survei strategis ini memperluas cakupan basis data neraca sosial-ekonomi yang pada gilirannya memperkaya analisis kualitas laporan neraca secara keseluruhan.

Pencapaian positif pada tahun 2025 diposisikan sebagai fondasi fundamental untuk mengakselerasi target jangka panjang pada tahun 2029. Menuju akhir periode Renstra, BPS Kota Palembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas neraca produksi melalui:

- Implementasi Sistem Integrasi Neraca Nasional (Sinnas): Memastikan proses penyusunan neraca lebih otomatis dan terstandarisasi secara digital.
- Penguatan Analisis Ekonomi Regional: Memperdalam narasi publikasi agar mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih taktis bagi pemerintah daerah.
- Adaptasi Perubahan Tahun Dasar: Mempersiapkan transisi menuju tahun dasar terbaru guna menangkap struktur ekonomi terkini yang lebih relevan dengan kondisi global.
- Untuk tahun 2026 akan terdapat penambahan BRS pertriwulan

Langkah strategis ini diambil agar pada tahun 2029, BPS Kota Palembang tidak hanya menyajikan angka pertumbuhan, tetapi mampu menghadirkan laporan

neraca produksi yang kredibel, akuntabel, dan menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan transformasi ekonomi di wilayah Kota Palembang.

1.2.11. Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas

Indikator ini merupakan instrumen fundamental dalam mengukur kesehatan ekonomi Kota Palembang melalui pendekatan nilai tambah bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Kualitas laporan neraca pengeluaran mencerminkan kemampuan BPS dalam mengintegrasikan berbagai data sektoral menjadi satu gambaran utuh mengenai struktur pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Seluruh publikasi strategis, termasuk Laporan PDRB Pengeluaran telah diterbitkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Keberhasilan ini ditandai dengan minimalnya revisi angka statistik serta ketepatan waktu rilis yang konsisten. Capaian tahun 2025 ini membuktikan bahwa penguatan koordinasi data sektoral dengan dinas-dinas terkait serta penyempurnaan metodologi penghitungan telah berjalan sesuai dengan standar Satu Data Indonesia.

Keberhasilan penyusunan Publikasi/Laporan PDRB Menurut Pengeluaran oleh BPS Kota Palembang Tahun 2025 didukung oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan data sekunder dari OPD, BUMN/BUMD, dan instansi vertikal yang memperkuat estimasi komponen pengeluaran, serta pelaksanaan rekonsiliasi berkala dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dengan kerangka PDRB nasional. Pemanfaatan indikator pembanding seperti IHK, data kelistrikan, dan transportasi meningkatkan akurasi dan kewajaran angka, sementara penyusunan tabel dinamis triwulanan mempercepat akses data bagi pengguna. Tim juga responsif terhadap anomali data melalui klarifikasi dan penyesuaian metodologis, disiplin terhadap jadwal rilis memperkuat kredibilitas, serta kolaborasi lintas fungsi internal BPS mendukung kelancaran proses kompilasi, validasi, dan diseminasi. Selain itu, manajemen risiko melalui revisi anggaran, kunjungan lapangan, dan komunikasi intensif dengan PIC data menjaga keberlanjutan penyusunan publikasi, didukung oleh

evaluasi pascakegiatan dan komitmen perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas di periode berikutnya.

Meskipun banyak faktor yang mendukung keberhasilan penyusunan, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang turut memengaruhi proses penyusunan Publikasi/Laporan PDRB Menurut Pengeluaran. Faktor penghambat penyusunan Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palembang antara lain keterlambatan dan ketidaklengkapan data pendukung dari dinas/instansi maupun data sektoral, serta anomali atau ketidakwajaran data yang memerlukan klarifikasi tambahan. Proses revisi dan rekonsiliasi angka dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan juga memperpanjang waktu penyusunan, ditambah keterbatasan data untuk komponen tertentu seperti perubahan inventori. Tekanan ketepatan waktu rilis, koordinasi lintas tim yang kurang optimal, serta beban kerja tinggi akibat tumpang tindih dengan kegiatan survei dan pengolahan data menjadi faktor lain yang memengaruhi kelancaran proses penyusunan publikasi/laporan.

Untuk mengatasi faktor penghambat penyusunan Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran pada Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nwas) BPS Kota Palembang, berbagai solusi telah diterapkan dan direkomendasikan. Pertama, penguatan koordinasi dengan instansi penyedia data dilakukan melalui komunikasi intensif, penjadwalan permintaan data lebih awal, serta penunjukan PIC (person in charge) pada masing-masing instansi untuk mempercepat konfirmasi dan klarifikasi data. Kedua, pemanfaatan indikator alternatif atau proxy indicator, seperti IHK, data kelistrikan, transportasi, dan indikator sektoral lainnya, digunakan untuk uji kewajaran angka, sekaligus membangun bank data indikator pendukung guna mengantisipasi keterlambatan data utama. Ketiga, percepatan proses rekonsiliasi dan review internal dilakukan secara berkala dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan sebelum jadwal finalisasi, serta penyusunan timeline internal lebih awal sebagai buffer waktu. Keempat, peningkatan pengendalian mutu dilakukan melalui pengecekan silang antar komponen pengeluaran dan penggunaan checklist untuk meminimalkan kesalahan teknis maupun substansi. Kelima, manajemen waktu dan pembagian tugas dioptimalkan dengan pembagian peran yang jelas serta pengolahan dan drafting narasi dilakukan secara paralel agar tidak menumpuk di akhir periode. Selain itu, standar prosedur revisi data

ditetapkan agar setiap perubahan dapat segera diintegrasikan ke dalam tabel dan narasi publikasi, diiringi optimalisasi anggaran untuk mendukung kunjungan lapangan atau koordinasi langsung ke instansi penyedia data. Terakhir, peningkatan kapasitas tim melalui pembinaan teknis dan dokumentasi pembelajaran setiap periode penyusunan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga kendala seperti keterlambatan data, anomali angka, dan tekanan waktu rilis dapat diminimalkan.

3.2.12 Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas

Penyusunan laporan analisis dan pengembangan statistik merupakan pilar penting dalam memberikan makna di balik angka, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terkini, indikator Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas menunjukkan tren pencapaian yang sangat positif dan selaras dengan peta jalan jangka menengah dan panjang instansi.

Terhadap Target Renstra 2025, capaian saat ini telah menunjukkan pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan secara nasional. Keberhasilan ini diukur melalui ketepatan waktu rilis, kedalaman tinjauan deskriptif, serta relevansi konten terhadap isu-isu terkini seperti ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPG (Indeks Pembangunan Gender), kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan dan lingkungan, pendidikan, kesehatan dan penggunaan internet, pemerintahan, geografi dan iklim, pemerataan pembangunan, pembangunan manusia, pertambangan dan energi, hotel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi dan harga, pengeluaran penduduk, perdagangan, pendapatan regional serta perbandingan regional.

Seluruh publikasi yang dihasilkan pada tahun 2025 telah melalui proses penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) yang ketat, sehingga target jangka

pendek untuk menyediakan dokumentasi statistik yang kredibel dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan telah terealisasi sepenuhnya.

Menuju Target Renstra 2029, strategi pengembangan difokuskan pada peningkatan nilai tambah laporan melalui pemanfaatan metode analisis tingkat lanjut (*advanced analytics*) dan integrasi data lintas sektor. Target tahun 2029 diarahkan agar publikasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki kekuatan prediktif dan preskriptif dalam memotret fenomena sosial ekonomi. Dengan melakukan pengembangan kapasitas SDM di bidang sains data secara berkelanjutan serta penguatan visualisasi data yang lebih interaktif, BPS optimistis dapat mencapai target 2029 dengan standar kualitas yang melampaui ekspektasi pengguna data, sekaligus mengukuhkan peran BPS sebagai *center of excellence* statistik di wilayah Kota Palembang.

Keberhasilan pencapaian target kualitas publikasi dan laporan analisis statistik periode 2024–2025 didukung oleh tiga pilar utama, yaitu penguatan penjaminan kualitas, rekonsiliasi data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia :

1. Penguatan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Implementasi sistem pemantauan dan pengendalian mutu yang ketat menjadi faktor utama dalam menjaga akurasi dan konsistensi data. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan teknis QGate bagi operator BPS Kota Palembang serta monitoring pada berbagai survei strategis, seperti Susenas, Sakernas, Podes, SKNP, Supas, IMK Tahunan, Wilkerstat, VHDL, V-REST, dan STPIM. Seluruh tahapan, mulai dari pelatihan, pelaksanaan lapangan, hingga pengolahan data, telah melalui proses validasi sesuai standar yang ditetapkan. Mekanisme ini memastikan publikasi strategis seperti Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Daerah Kota Palembang, dan Indeks Pembangunan Gender memiliki tingkat keandalan yang tinggi sebelum disampaikan kepada publik.
2. Pelaksanaan rekonsiliasi data Indeks Pembangunan Gender (IPG). Proses penyelarasan data hingga tahap penetapan angka final mendorong terciptanya konsistensi indikator gender di Kota Palembang. Rekonsiliasi ini berperan penting dalam meminimalkan anomali data sektoral, sehingga

indikator seperti Indeks Ketimpangan Gender memiliki legitimasi yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Partisipasi dalam forum inovatif seperti RANGKAI (Rangkaian Sharing Knowledge dan Akselerasi Statistik) turut memperkuat kompetensi analitis pegawai. Melalui kegiatan ini, tim mampu menyusun analisis lintas sektor yang lebih komprehensif, tajam, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan publikasi dan laporan analisis statistik, tim menghadapi berbagai tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama terkait validitas data dan manajemen waktu. Kendala utama ditemukan pada aspek akurasi data sektoral, seperti sulitnya verifikasi keabsahan data siswa mukim (pesantren) untuk penghitungan IPM. Selain itu, keterbatasan waktu dalam proses rekonsiliasi dan analisis fenomena sering kali berbenturan dengan agenda besar seperti Hari Statistik Nasional (HSN) dan cuti bersama, yang berdampak pada mundurnya jadwal rilis publikasi tertentu. Dari sisi infrastruktur dan koordinasi, kendala mencakup perangkat kerja yang kurang suportif terhadap aplikasi desain publikasi (InDesign), serta belum optimalnya pemahaman dan kedisiplinan jadwal para operator *Quality Gates* (QGates).

Menyikapi hambatan tersebut, langkah-langkah solutif telah diimplementasikan secara taktis untuk menjaga integritas data. Tim melakukan verifikasi ulang secara manual, serta melakukan pengecekan silang data pendidikan melalui web EMIS Kemenag dan kunjungan langsung ke sekolah *boarding* dan kantor DPRD. Untuk mengatasi kendala sistemik, tim memperkuat jalur komunikasi dengan penanggung jawab (*Subject Matter*) BPS Propinsi Sumatera Selatan, melakukan manajemen jadwal rilis secara fleksibel namun tetap terukur (non-ARC), serta memberikan pengingat berkala kepada operator QGate BPS Kota Palembang guna memastikan proses *quality gate* berjalan tepat waktu.

Sebagai rencana perbaikan jangka panjang hingga tahun 2029, BPS Kota Palembang akan mengintegrasikan seluruh pengalaman solutif ke dalam peta jalan transformasi statistik yang lebih proaktif dan terintegrasi. Fokus utama

hingga tahun 2026 adalah memperkuat sinergi data lintas sektor dan manajemen waktu dalam penyusunan publikasi rutin seperti IPG, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang dan Statistik Daerah Kota Palembang yang lebih tajam. Memasuki periode 2027-2029, strategi akan ditingkatkan melalui digitalisasi sistem kualitas (*Quality Gates*) secara otomatis dan penguatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan *advanced analytics* untuk menghasilkan analisis yang bersifat prediktif. Dengan evaluasi berkelanjutan, diharapkan pada akhir tahun 2029 akan tercipta ekosistem statistik yang matang dan berkelanjutan, sehingga produk statistik yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah strategis dan menjadi rujukan utama yang kredibel bagi seluruh pengambil kebijakan di Kota Palembang.

3.2.13. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

Indikator ini mencerminkan keberhasilan BPS dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 sebagai pembina statistik sektoral, melalui upaya sistematis untuk meningkatkan literasi statistik dan kualitas data pada Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah (K/L/D/I).

Pada periode Renstra 2025, penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral di Kota Palembang telah berlangsung secara progresif dan memenuhi standar kualitas, dengan tingkat penyelenggaraan sesuai standar sebesar 94,58 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan telah terlaksana secara sistematis, efektif, dan mendukung konsistensi kualitas data di BPS Kota Palembang.

Menjelang target renstra 2029, strategi pembinaan diarahkan pada peningkatan kematangan (*maturity level*) ekosistem data. Fokus tidak hanya pada pemenuhan administrasi statistik, tetapi juga pada terciptanya sistem data yang terintegrasi, otomatis, dan berkelanjutan. BPS menargetkan transformasi peran dari sekadar pembina menjadi mitra strategis dalam pemanfaatan analisis data tingkat lanjut bagi pemerintah daerah. Dengan pemerataan literasi statistik hingga unit terkecil, diharapkan seluruh penyelenggaraan statistik sektoral di Kota

Palembang pada akhir Renstra 2029 mampu memenuhi standar kualitas internasional, menekan diskrepansi data secara mandiri, dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi berbasis data.

Capaian pada tahun 2025 bahkan melampaui target, yaitu sebesar 118,23 persen, menandakan efektivitas pelaksanaan pembinaan. Sementara itu, proyeksi capaian untuk 2029 sebesar 95,99 persen menunjukkan tren positif dan konsistensi dalam penguatan kualitas pembinaan statistik sektoral, sekaligus memastikan kesinambungan peningkatan kualitas data dan literasi statistik di seluruh unit kerja. Keberhasilan pencapaian indikator pembinaan statistik sektoral tidak terlepas dari sejumlah faktor strategis yang saling mendukung secara sistematis dan berkelanjutan yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan statistik sektoral secara berkala (minimal dua kali dalam setahun) menunjukkan adanya komitmen nyata dalam memberikan pendampingan intensif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembinaan tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi menyentuh aspek teknis seperti penyusunan metadata, penerapan standar data, mekanisme rekomendasi statistik, serta tata kelola data sektoral. Pendekatan yang berkelanjutan ini membantu produsen data meningkatkan kualitas output statistik sehingga sesuai dengan prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pembentukan Tim Pembina Statistik Sektoral menjadi fondasi utama dalam menjamin kejelasan peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam proses pembinaan. Struktur tim yang jelas memungkinkan pembagian tugas yang terukur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembinaan. Keberadaan tim ini juga memperkuat koordinasi BPS Kota Palembang sehingga arah kebijakan pembinaan tetap selaras dengan standar nasional. Dukungan tersebut semakin optimal melalui penerapan manajemen user pada Aplikasi Dokumentasi Pembinaan, yang memastikan seluruh aktivitas terdokumentasi secara digital, terdokumentasi dengan baik, transparan, serta memenuhi standar administrasi yang ditetapkan oleh BPS RI. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memudahkan proses monitoring dan pelaporan capaian.

3. Kualitas pembinaan sangat ditentukan oleh kapasitas pembina itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh BPS RI menjadi faktor penting dalam menjaga keseragaman pemahaman metodologi dan standar kualitas. Melalui kegiatan tersebut, para pembina memperoleh pembaruan kebijakan, penguatan substansi teknis, serta penyamaan persepsi terkait implementasi prinsip Satu Data Indonesia. Dengan kompetensi yang terjaga, pembina di daerah mampu memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran dan berbasis standar yang sama di seluruh Indonesia.
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Daerah Kota Palembang Tahun 2025 menjadi instrumen evaluasi yang sangat strategis. Kegiatan ini tidak hanya mengukur tingkat penerapan standar statistik oleh instansi sektoral, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bersama. Melalui bimbingan teknis tersebut, perangkat daerah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola data, penyusunan metadata, penerapan standar data, serta pengisian instrumen evaluasi secara benar dan konsisten. Forum ini juga menjadi ruang klarifikasi atas berbagai kendala teknis yang dihadapi OPD.

Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Palembang juga menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari kebijakan eksternal berupa instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran paket pertemuan, yang mengharuskan adanya penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan. Di tingkat daerah, tantangan manajerial seperti perubahan mendadak lokus pembinaan (dari RSUD BARI Palembang ke Dinas Pendidikan Kota Palembang), tingginya pergantian pegawai pada instansi binaan, serta benturan jadwal dengan kegiatan ad-hoc pimpinan pusat turut memengaruhi ritme pembinaan. Dari sisi substansi, masih ditemui rendahnya kualitas metadata dan usulan rekomendasi statistik yang diajukan OPD, sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif.

Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, berbagai langkah solutif telah diimplementasikan. BPS melakukan identifikasi ulang OPD prioritas sebagai strategi mitigasi risiko perubahan kebijakan. Untuk menjaga keberlanjutan

pengetahuan di tengah pergantian pegawai, dilakukan pembaruan narahubung secara berkala dan penunjukan admin pada aplikasi Romantik guna memastikan kesinambungan pengelolaan rekomendasi statistik. Koordinasi intensif dengan Dinas Kominfo dilakukan untuk penyesuaian jadwal kegiatan yang lebih fleksibel. Selain itu, BPS Kota Palembang bersama Bappeda Litbang Kota Palembang menyelenggarakan pendampingan penyusunan metadata dan rekomendasi statistik, dengan BPS sebagai narasumber utama, guna meningkatkan pemahaman teknis produsen data dalam memenuhi kaidah statistik yang berlaku.

Sebagai rencana jangka panjang hingga tahun 2029, BPS Kota Palembang berkomitmen mentransformasi capaian saat ini menjadi fondasi penguatan ekosistem statistik sektoral yang matang dan berkelanjutan. Pada periode hingga 2026, fokus diarahkan pada penguatan internal Tim Pembina dan digitalisasi penuh manajemen dokumentasi pembinaan. Memasuki periode 2027–2029, strategi akan ditingkatkan pada otomatisasi pemantauan kualitas data sektoral melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang lebih terstruktur dan berbasis sistem. Dengan penguatan literasi statistik pada seluruh produsen data serta koordinasi lintas sektoral yang semakin mandiri, diharapkan pada akhir tahun 2029 akan terwujud budaya Satu Data yang inklusif di Kota Palembang, di mana data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terintegrasi, serta responsif terhadap kebutuhan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

3.2.14. Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pemerintah. Penilaian IPP dilakukan berdasarkan pemenuhan komponen standar pelayanan, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian IPP melalui mekanisme penilaian mandiri menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pelayanan publik. Melalui penilaian ini, unit pelayanan dapat mengidentifikasi tingkat pemenuhan

standar pelayanan sekaligus melakukan evaluasi internal terhadap aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan penilaian IPP tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga pada kualitas implementasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, IPP menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur komitmen organisasi terhadap pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Melalui pelaksanaan penilaian mandiri IPP secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kualitas pelayanan publik terus meningkat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) melalui penilaian mandiri pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi capaian terhadap target Tahun 2025 mencapai 120 persen, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan komponen standar pelayanan, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan telah dilaksanakan secara optimal.

Sementara itu, terhadap target jangka menengah Tahun 2029, capaian telah mencapai 94,04 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah berada pada jalur yang tepat dan hampir memenuhi target akhir periode perencanaan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai 100 persen terhadap target 2029, capaian tersebut mencerminkan kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan pencapaian target Indeks Pelayanan Publik melalui penilaian mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis sebagai berikut:

1. Kedisiplinan dalam melakukan penilaian mandiri melalui aplikasi serta pengunggahan bukti dukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) menjadi bentuk transparansi organisasi. Proses ini semakin optimal dengan adanya mekanisme sanggahan dan perbaikan bukti dukung berdasarkan masukan validator pusat, yang memastikan data capaian tetap akurat dan objektif
2. Komitmen Pimpinan dan Budaya Pelayanan Prima

Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan serta penerapan budaya kerja berorientasi pada kepuasan pengguna layanan menjadi landasan utama peningkatan nilai IPP.

3. Pemenuhan Standar Pelayanan

Seluruh komponen standar pelayanan, seperti persyaratan layanan, prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk layanan, serta mekanisme pengaduan, telah ditetapkan dan dipublikasikan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Tersedianya ruang layanan yang memadai, fasilitas pendukung (ruang tunggu, sarana disabilitas, media informasi), serta sarana pengaduan yang mudah diakses turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan

Digitalisasi layanan, termasuk pemanfaatan website dan kanal daring untuk akses informasi serta pengaduan, meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

6. Pengendalian dan Monitoring Internal

Dilakukan evaluasi berkala terhadap pemenuhan komponen penilaian IPP, termasuk kelengkapan dokumen pendukung, sehingga proses penilaian mandiri dapat dilakukan secara objektif dan sesuai indikator yang ditetapkan.

7. Transparansi dan Akuntabilitas Layanan

Informasi layanan dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses, serta tersedia mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Pelayanan Publik, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain:

1. Keterbatasan Pemahaman terhadap Komponen Penilaian

Tidak seluruh petugas memahami secara menyeluruh indikator dan bukti dukung yang dipersyaratkan dalam penilaian IPP, sehingga diperlukan waktu tambahan untuk melengkapi dokumen.

2. Kelengkapan Administrasi dan Dokumentasi

Beberapa dokumen pendukung standar pelayanan belum terdokumentasi secara sistematis, meskipun praktik pelayanan telah berjalan dengan baik.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan, seperti ruang layanan yang belum sepenuhnya ideal atau sarana khusus bagi kelompok rentan yang perlu ditingkatkan.

4. Kendala Pemanfaatan Teknologi Informasi

Gangguan teknis pada sistem layanan daring atau keterbatasan pembaruan informasi di website dapat memengaruhi aspek transparansi dan aksesibilitas layanan.

5. Keterbatasan SDM dan Beban Kerja

Beban kerja yang cukup tinggi pada unit pelayanan dapat memengaruhi optimalisasi pemenuhan seluruh komponen penilaian secara bersamaan.

Capaian sebesar 120 persen saat ini menjadi standar mutu baru bagi BPS Kota Palembang untuk terus melakukan transformasi dan inovasi layanan yang berkelanjutan hingga tahun 2029. Untuk menjaga tren positif tersebut, strategi perbaikan ke depan difokuskan pada penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada masyarakat melalui keaktifan internalisasi kebijakan pusat dan pemenuhan bukti dukung yang akuntabel. Dengan komitmen yang konsisten dan langkah perbaikan yang terarah, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat sehingga target kinerja jangka menengah dapat tercapai secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.2.15. Nilai SAKIP oleh Inspektorat

Pencapaian Nilai SAKIP oleh Inspektorat pada periode Renstra 2025–2029 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung penerapan manajemen kinerja berbasis hasil. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja secara selaras dan terukur.

Pada tahun 2025, realisasi Nilai SAKIP mencapai 100,59 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sementara itu, pada tahun 2029, capaian kembali melampaui target dengan realisasi sebesar 100,54 persen. Hal ini membuktikan bahwa organisasi mampu menjaga konsistensi kinerja dalam jangka menengah, sekaligus menciptakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan strategis.

Keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP yang melampaui target pada tahun 2025 dan 2029 didukung oleh beberapa faktor utama.

1. Adanya komitmen dan peran aktif pimpinan dalam mendorong penerapan manajemen kinerja yang konsisten dan berorientasi hasil. Komitmen ini tercermin dalam penguatan budaya kerja berbasis kinerja serta pengambilan keputusan yang selaras dengan dokumen perencanaan strategis.
2. Semakin meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis serta indikator yang terukur. Hal ini membuat proses pengendalian dan evaluasi menjadi lebih efektif.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang rutin dan berkelanjutan, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat. Proses ini membantu memastikan adanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam sistem akuntabilitas kinerja.

Meskipun capaian kinerja Nilai SAKIP telah melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi pencapaian kinerja. Peningkatan poin SAKIP yang ditargetkan setiap tahun berdampak pada semakin tingginya standar kualitas dokumen perencanaan,

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tim SAKIP menjadi semakin besar, karena diperlukan ketelitian lebih tinggi dalam penyusunan cascading kinerja, pemenuhan eviden dukung, penyesuaian indikator, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat. Di sisi lain, belum adanya penambahan personel yang secara khusus menangani pengelolaan SAKIP mengakibatkan tugas tersebut harus dirangkap dengan pekerjaan rutin lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan keterbatasan waktu serta risiko kurang optimalnya proses pengendalian dan evaluasi kinerja apabila tidak diimbangi dengan penguatan manajemen beban kerja atau dukungan sumber daya yang memadai.

Rencana tindak lanjut strategis ke depan akan diprioritaskan pada penguatan pengawasan melalui rapat monitoring kinerja triwulanan secara berkala dan pemeriksaan ketat terhadap kertas kerja monitoring untuk memastikan pemerataan kualitas data.

3.2.1.6. Indeks Implementasi BerAKHLAK

Capaian kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana pada tahun 2025 realisasi mencapai 112,89 persen dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2029 capaian kinerja juga melampaui target dengan realisasi sebesar 106,33 persen.

Capaian yang melebihi 100 persen tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai BerAKHLAK telah berjalan secara efektif dan melampaui ekspektasi yang direncanakan, baik dalam aspek internalisasi nilai, perubahan perilaku kerja, maupun penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif.

Keberhasilan capaian Indeks Implementasi BerAKHLAK yang melampaui target pada tahun 2025 dan 2029 didukung oleh beberapa faktor utama.

1. Adanya komitmen pimpinan dalam menginternalisasikan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten melalui keteladanan, arahan, dan penguatan

- budaya kerja. Pimpinan tidak hanya menyampaikan secara normatif, tetapi juga mendorong penerapan nilai tersebut dalam praktik kerja sehari-hari.
2. Integrasi nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam sistem manajemen kinerja, termasuk dalam perencanaan, penilaian kinerja, dan evaluasi pegawai (seperti pelaksanaan SEMPURNA). Dengan demikian, penerapan nilai tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari indikator keberhasilan individu dan unit kerja.
 3. Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Mulai tahun 2026, akan dilaksanakan berbagai program inovatif seperti LUR (Logical Brain, nUnited Squad, Relevant Quiz) yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pegawai melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, internalisasi nilai tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi juga melalui praktik langsung yang membentuk kebiasaan positif.

Selain pelaksanaan program baru, organisasi juga akan memperkuat dan menyempurnakan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya seperti Muter Pagi, Kopi Manis, Kolaborasi, Jus Manggis, ASN Pro, SEMPURNA dan lain-lain. Upaya perbaikan berkelanjutan ini bertujuan memastikan bahwa perubahan tidak bersifat sementara, melainkan terintegrasi secara konsisten dalam sistem kerja, penilaian kinerja, dan perilaku individu.

Dengan strategi tersebut, diharapkan hingga tahun 2029 akan terbentuk budaya organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, di mana nilai-nilai BerAKHLAK tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

3.3.1. Capaian Prioritas Nasional

3.3.1.1. Pembinaan Statistik Sektoral

Pembinaan Statistik Sektoral merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik oleh instansi pemerintah daerah maupun perangkat daerah agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan standar statistik nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi.

Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) di BPS Kota Palembang Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain koordinasi, konsultasi, asistensi teknis, bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap proses bisnis statistik sektoral mulai dari perencanaan kegiatan statistik, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga diseminasi. Selain itu, pembinaan juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola data, serta penerapan standar, klasifikasi, kode referensi, dan metadata statistik. Pada tahun 2025, BPS Kota Palembang mendapat target pembinaan terhadap dua OPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, dan telah melaksanakan tiga kali koordinasi dengan perangkat daerah serta instansi terkait.

1. Koordinasi dilakukan dengan RSUD Bari pada 5 Maret 2025 untuk menyelaraskan data kesehatan sektoral dan memastikan penerapan standar statistik nasional.
2. Koordinasi kedua dilaksanakan dengan Dinas Kebudayaan Kota Palembang pada 6 Maret 2025, dengan fokus pada pembinaan data kebudayaan dan integrasi data sektoral ke dalam sistem statistik daerah.
3. Koordinasi ketiga dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang pada 23 April 2025, yang menitikberatkan pada penyelarasan data pendidikan, peningkatan kualitas data, dan penerapan metadata sesuai standar statistik.

Selain melalui koordinasi, pembinaan statistik sektoral di BPS Kota Palembang juga dilaksanakan melalui tiga kali pertemuan formal Pembinaan Statistik Sektoral (PSS). Pertemuan pertama pada 21 Mei 2025 difokuskan pada Domain Proses Bisnis Statistik, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai alur proses bisnis statistik mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data. Dengan memahami proses bisnis ini, perangkat daerah diharapkan mampu mengelola data sektoral secara lebih sistematis dan sesuai standar nasional.

Pertemuan kedua, yang dilaksanakan pada 22 Mei 2025, membahas Domain Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN). Materi ini menekankan pentingnya integrasi data sektoral dalam kerangka SDI serta penerapan prinsip-prinsip SSN, termasuk standarisasi indikator, metadata, klasifikasi, dan kode referensi. Dengan demikian, OPD diharapkan mampu menyajikan data yang konsisten, akurat, dan mudah diintegrasikan dengan sistem statistik daerah maupun nasional.

Pertemuan ketiga pada 26 Juni 2025 difokuskan pada evaluasi dan monitoring hasil pembinaan sebelumnya. Kegiatan ini mencakup tindak lanjut perbaikan data sektoral, pemantauan konsistensi, serta peningkatan kualitas pengelolaan data. Materi yang disampaikan meliputi penyampaian Sistem Statistik Nasional (SSN), rekomendasi statistik dan metadata, serta evaluasi pembinaan statistik sektoral. Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah tidak hanya memahami teori dan prosedur, tetapi juga dapat mengaplikasikan perbaikan dan integrasi data secara nyata.

Secara keseluruhan, rangkaian pertemuan PSS ini bertujuan untuk memastikan bahwa data sektoral yang dihasilkan oleh OPD di Kota Palembang bersifat akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antara BPS, perangkat daerah, dan Walidata, sehingga membangun ekosistem data yang lebih terintegrasi dan berkualitas.

Dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, pada 18 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat pembahasan persiapan penyusunan

Rencana Aksi SDI Kota Palembang 2025–2029 serta Daftar Data SDI Kota Palembang. Rancangan Daftar Data tahun 2024 telah disiapkan, namun proses finalisasi memerlukan metadata yang belum sepenuhnya terselesaikan akibat keterbatasan waktu. Pada 4 Agustus 2025 dilanjutkan dengan rapat asistensi/pendampingan lanjutan mengenai penyusunan dan pengisian metadata statistik sektoral. Selain itu, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata berkomitmen kuat dalam mewujudkan SDI, yang merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap data yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan bersifat akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka memperkuat pemahaman perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan data sektoral, memperkuat koordinasi antara Walidata, Produsen Data, dan OPD, serta mendorong perencanaan berbasis data, akan diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Statistik Daerah. Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari dengan pemateri dari BPS Kota Palembang dan diikuti oleh 34 OPD serta seluruh Camat di Kota Palembang, sebagai upaya memastikan tercapainya data sektoral yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pembangunan daerah berbasis bukti.

Kendala pembinaan statistik sektoral :

1. Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) belum maksimal.
Standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas belum sepenuhnya diterapkan, sehingga integrasi data antar sistem masih terbatas.
2. Komitmen pimpinan terhadap tata kelola data belum merata.
Tidak semua pimpinan menjadikan data sebagai prioritas strategis, sehingga pembinaan statistik sektoral belum mendapat dukungan optimal dari sisi kebijakan dan anggaran.
3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM statistik/data.
Banyak instansi belum memiliki tenaga fungsional statistik atau analis data yang memadai, sehingga pengolahan dan analisis data belum optimal.
4. Kualitas data belum optimal

Data sering tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak konsisten antar periode, sehingga mengurangi kepercayaan dan validitas dalam perencanaan pembangunan.

5. Keterbatasan anggaran

Pengembangan sistem data, peningkatan kapasitas SDM, dan pembinaan berkelanjutan sering terkendala keterbatasan dana.

Solusi dalam pembinaan statistik sektoral sebagai berikut :

1. Peningkatan komitmen pimpinan (leadership support)

Mendorong pimpinan untuk menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan melalui kebijakan berbasis data (evidence-based policy) dan dukungan anggaran yang memadai.

2. Peningkatan kapasitas SDM

Melaksanakan pelatihan rutin terkait statistik dasar, pengelolaan data, metadata, standar data, interoperabilitas, serta analisis data. Selain itu, mendorong pengembangan jabatan fungsional statistik.

3. Standarisasi data dan indikator

Menyepakati definisi operasional, metode penghitungan, klasifikasi, serta kode referensi yang sama untuk menghindari perbedaan angka antar sektor.

4. Penyusunan dan pengelolaan metadata

Setiap data sektoral wajib dilengkapi metadata yang memuat sumber, metode, periode, satuan, dan cakupan sehingga transparansi dan pemahaman data meningkat.

5. Pengalokasian anggaran khusus statistik sektoral

Mengintegrasikan kebutuhan pengembangan data dalam dokumen perencanaan dan penganggaran agar pembinaan berjalan berkelanjutan.

Berikut rekomendasi pembinaan statistik sektoral yang dapat dijadikan arahan kebijakan dan langkah strategis:

1. Memperkuat pembinaan teknis kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga

BPS perlu meningkatkan intensitas pendampingan, dan asistensi teknis terkait standar data, metodologi, serta penyusunan metadata statistik sektoral.

2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
BPS dapat menyediakan dashboard nasional untuk memantau capaian statistik sektoral daerah secara real time.
3. Memperkuat sinergi dengan Walidata daerah
Koordinasi rutin antara BPS dan Dinas Kominfo selaku Walidata untuk memastikan implementasi standar data berjalan konsisten.
4. Memberikan umpan balik evaluatif yang konstruktif
Hasil Evaluasi Statistik Sektoral sebaiknya disertai rekomendasi teknis yang rinci dan roadmap perbaikan.

Dengan terselenggaranya koordinasi, asistensi dan Pembinaan Statistik Sektoral, BPS Kota Palembang berhasil meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap proses bisnis statistik, penerapan Sistem Statistik Nasional, serta prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kualitas dan konsistensi data sektoral, tetapi juga mendukung integrasi data antar OPD serta penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui upaya pembinaan yang berkesinambungan, BPS Kota Palembang berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya data sektoral yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung tercapainya tata kelola data yang profesional, transparan, dan berkualitas di tingkat daerah.

3.3.1.2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Kegiatan rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Kota Palembang merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala setiap awal bulan, umumnya pada hari pertama, sebagai bentuk penyampaian informasi statistik resmi terkait kondisi inflasi atau deflasi di Kota Palembang.

Dalam setiap pelaksanaannya, Kepala BPS Kota Palembang menyampaikan secara langsung perkembangan IHK/Inflasi bulanan, meliputi tingkat inflasi, kelompok pengeluaran yang memengaruhi perubahan harga, serta komoditas utama penyumbang inflasi atau deflasi. Paparan ini menjadi sumber data yang akurat dan terpercaya bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memahami dinamika harga di Kota Palembang.

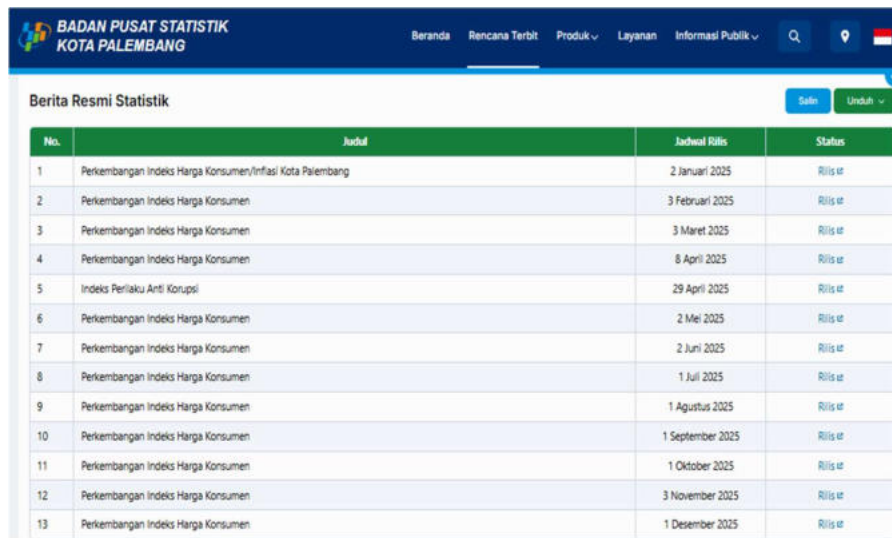
Kegiatan rilis ini dihadiri oleh Wali Kota Palembang serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, bersama dengan instansi terkait dan media. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam pengendalian inflasi dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan rilis IHK/Inflasi yang konsisten dan tepat waktu sepanjang tahun, BPS Kota Palembang berperan aktif dalam mendukung transparansi data, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data guna menjaga stabilitas harga dan perekonomian Kota Palembang.

Rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi bulanan Kota Palembang dapat diakses oleh publik melalui laman resmi BPS Kota Palembang pada alamat <https://palembangkota.bps.go.id/id/arc>. Publikasi ini disajikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan kemudahan akses informasi statistik bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, media, serta masyarakat umum.

BPS Kota Palembang berkomitmen untuk menyampaikan rilis Perkembangan IHK/Inflasi secara konsisten dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Advance Release Calendar (ARC). Komitmen ini merupakan wujud profesionalisme BPS dalam menjaga kredibilitas data statistik serta memastikan ketersediaan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian Kota Palembang.

Gambar 27. Screenshot Berita Resmi Statistik di Website



No.	Judul	Jadwal Rilis	Status
1	Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Palembang	2 Januari 2025	Rilis <small>st</small>
2	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	3 Februari 2025	Rilis <small>st</small>
3	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	3 Maret 2025	Rilis <small>st</small>
4	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	8 April 2025	Rilis <small>st</small>
5	Indeks Perilaku Anti Korupsi	29 April 2025	Rilis <small>st</small>
6	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	2 Mei 2025	Rilis <small>st</small>
7	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	2 Juni 2025	Rilis <small>st</small>
8	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	1 Juli 2025	Rilis <small>st</small>
9	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	1 Agustus 2025	Rilis <small>st</small>
10	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	1 September 2025	Rilis <small>st</small>
11	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	1 Oktober 2025	Rilis <small>st</small>
12	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	3 November 2025	Rilis <small>st</small>
13	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	1 Desember 2025	Rilis <small>st</small>

Kendala

Dalam pelaksanaan diseminasi data inflasi Kota Palembang Tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang menghadapi beberapa kendala. Stakeholder dan pemangku kebijakan, baik perangkat daerah, kepala dinas dan OPD terkait, peneliti, maupun pengamat ekonomi, memerlukan informasi angka inflasi yang bersifat cepat, ringkas, dan mudah diakses segera setelah data dirilis.

Selama ini, angka inflasi disajikan melalui Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi dalam format dokumen Portable Document Format (PDF) yang diunggah pada laman resmi BPS Kota Palembang. Format dan mekanisme akses tersebut dinilai kurang praktis bagi sebagian pengguna data yang membutuhkan informasi secara cepat tanpa harus mengakses situs resmi BPS atau membuka dokumen lengkap.

Solusi

Sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses dan kecepatan diseminasi informasi inflasi, BPS Kota Palembang mengembangkan inovasi PAL-INSTA. PAL-INSTA menyajikan indikator strategis terkini Kota Palembang, khususnya angka inflasi, dalam format visual yang ringkas, informatif, dan mudah dipahami.

Inovasi ini memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana diseminasi, sehingga pengguna data dapat memperoleh informasi inflasi secara langsung

melalui akun resmi media sosial BPS Kota Palembang, tanpa harus mengakses laman resmi atau membuka dokumen BRS dalam format PDF.

Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kepercayaan pengguna data, disarankan agar penyajian informasi inflasi melalui PAL-INSTA dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal. Konten PAL-INSTA yang disajikan melalui akun media sosial Instagram BPS Kota Palembang direkomendasikan untuk dirilis tepat pada hari yang sama dengan jadwal rilis resmi inflasi BPS Kota Palembang, tanpa adanya keterlambatan hari (*without time lag*).

Dengan demikian, PAL-INSTA diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi pelengkap yang efektif, responsif, dan relevan bagi stakeholder dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

3.3.2. Prioritas Presiden

3.3.2.1. Inpres 4 2025 : DTSEN

Implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menempatkan BPS sebagai salah satu penanggung jawab dalam penyediaan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tugas BPS sebagaimana yang dimuat dalam Inpres 4 Tahun 2025 adalah menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN, menerima DTSEN yang mencakup informasi by name by address dari Kementerian/Lembaga dan melakukan integrasi data, menyusun DTSEN yang akurat, terkini dan terintegrasi, mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, menyerahkan pemandaatan DTSEN kepada Menko PM, MenPPN, dan Mensos, serta melaporkan pelaksanaan DTSEN kepada Presiden secara berkala.

Dalam rangka mengimplementasikan Inpres 4 Tahun 2025, BPS Kota Palembang berkomitmen menjalankan tugas tersebut melalui penguatan validasi data lapangan dan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang diambil berbasis pada data yang akurat. Pada tahun 2025, BPS Kota Palembang turut berperan aktif dalam program Sekolah Rakyat. BPS Kota Palembang melakukan pencermatan dan mempelajari DTSEN terutama data

penduduk usia sekolah yang belum pernah sekolah dan/atau tidak bersekolah lagi yang kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Palembang serta bersama dengan SDM PKH dan Dinas Sosial melakukan verifikasi langsung terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Tahap Ia dan Ic.

Gambar 28. Verifikasi data DTSEN



Secara umum pelaksanaan verifikasi calon siswa sekolah rakyat ini cukup mengalami kendala dikarenakan sulitnya memenuhi kuota calon siswa sekolah rakyat yang telah memenuhi kualifikasi persyaratan yang bersedia sekolah asrama, sehingga petugas perlu menverifikasi kembali calon siswa sekolah rakyat lainnya.

Saran diberikan kepada dinas terkait agar lebih mensosialisasikan program sekolah rakyat, sehingga masyarakat percaya atas kualitas program ini dan bersedia mengikuti sekolah asrama.

Selanjutnya Sesuai arahan Kepala BPS dalam Surat B-605/01000/ES/2025 Tanggal 2 Desember, Perihal Pendampingan Verifikasi Data Calon Penerima BLTS Kesra pada point 3: BPS Provinsi segera menginformasikan ke BPS Kabupaten/Kota untuk mengawal proses pemutakhiran bersama Dinas Sosial dan Pendamping PKH masing-masing. Menindaklanjuti arahan tersebut, BPS Kota Palembang segera melakukan beberapa hal yaitu :

1. Koordinasi Dengan Dinas Sosial

Kepala BPS Kota Palembang menghubungi kepala Dinas Sosial Kota Palembang via telepon. Koordinasi via telepon ini awalnya hanya untuk mengatur jadwal koordinasi tatap muka, namun karena kadis dan jajarannya sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota, sehingga koordinasi dilakukan via telepon. Berdasarkan hasil koordinasi didapatkan informasi bahwa Dinas Sosial Kota Palembang belum menerima instruksi dari Kementerian Sosial mengenai verifikasi lapangan terhadap kelayakan keluarga pengganti calon penerima BLTS Kesra.

2. Koordinasi Dengan Pendamping PKH

Tim dari pendamping PKH datang ke kantor BPS Kota Palembang untuk menindaklanjuti informasi yang mereka dapat dari Dinas Sosial Kota Palembang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan tim pendamping PKH didapatkan informasi bahwa belum ada surat/instruksi dari Kementerian Sosial kepada tim pendamping PKH untuk melakukan verifikasi lapangan dan tim pendamping PKH tidak mengetahui berapa jumlah KK yang perlu dilakukan verifikasi untuk di Kota Palembang . Namun setelah dicek diaplikasi

SIKS-NG memang telah terdapat nama keluarga yang perlu dilakukan verifikasi lapangan sehingga BPS Kota Palembang bersama dengan Tim SDM PKH melakukan verifikasi lapangan terhadap keluarga pengganti calon penerima BLTS Kesra yang didampingi oleh tim dari tim Dinas Sosial Kota Palembang.



Gambar 29. Koordinasi dengan Koordinator PKH

3. Pendampingan Verifikasi

Pendampingan verifikasi lapangan terhadap kelayakan keluarga pengganti calon penerima BLTS Kesra dilaksanakan di Kelurahan Ilir Barat Dua Kecamatan Ilir Barat Dua RT 10 RW 03 Kota Palembang terhadap beberapa Keluarga yang berada di desil 5 sd 10. Didalam

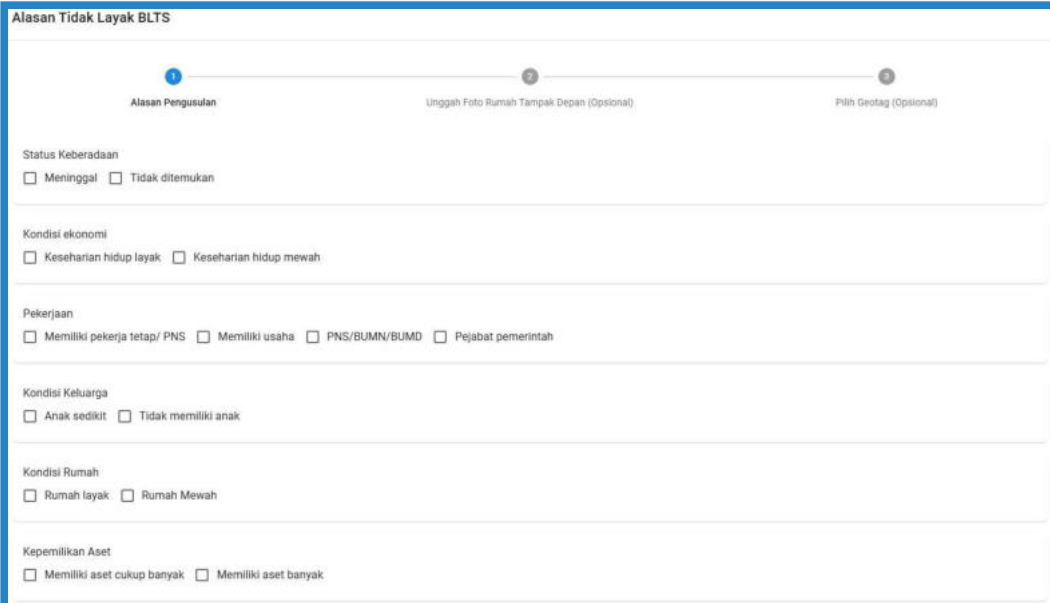
aplikasi SIKS-NG verifikasi hanya menayakan keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima BLTS Kesra.

Beberapa pertanyaan lanjutan yang terdapat di aplikasi SIKS-NG yang digunakan operator untuk menjadikan keluarga tidak layak menerima BLTS Kesra diantaranya :

- Status Keberadaan: Meninggal, Tidak ditemukan
- Kondisi Ekonomi: Keseharian hidup layak, Keseharian hidup mewah
- Pekerjaan : Memiliki pekerjaan tetap/ PNS, Memiliki Usaha, PNS/BUMN/BUMD, Pejabat pemerintah
- Kondisi Keluarga: Anak sedikit, Tidak memiliki anak
- Kondisi Rumah: Rumah layak, Rumah mewah dan Kepemilikan Aset: Memiliki aset cukup banyak, Memiliki aset banyak

Setelah itu verifikator dari Dinsos diharapkan dapat mengunggah foto dan geotagging sebagai bukti, namun ini bersifat opsional.

Gambar 30. Tangkapan layar aplikasi SIKS-NG pertanyaan alasan Tidak Layak BLTS



Alasan Tidak Layak BLTS

1 Alasan Pengusulan 2 Unggah Foto Rumah Tampak Depan (Opsional) 3 Pilih Geotag (Opsional)

Status Keberadaan
 Meninggal Tidak ditemukan

Kondisi ekonomi
 Keseharian hidup layak Keseharian hidup mewah

Pekerjaan
 Memiliki pekerja tetap/ PNS Memiliki usaha PNS/BUMN/BUMD Pejabat pemerintah

Kondisi Keluarga
 Anak sedikit Tidak memiliki anak

Kondisi Rumah
 Rumah layak Rumah Mewah

Kepemilikan Aset
 Memiliki aset cukup banyak Memiliki aset banyak

Sementara itu untuk alasan yang dapat digunakan operator untuk menjadikan keluarga layak menerima BLTS Kesra diantaranya:

1. Kondisi kesehatan: Disabilitas, Mengidap penyakit kronis
2. Kondisi ekonomi: hidup dari bantuan keluarga/tetangga/pemerintah, keseharian hidup tidak layak
3. Pekerjaan: tidak punya pekerjaan, pekerjaan serabutan
4. Kondisi keluarga: cerai hidup/mati/yatim/piatu, anak banyak/anak masih kecil, hidup sebatang kara
5. Kondisi rumah: rumah tidak layak, rumah kurang layak
6. Kepemilikan aset: tidak memiliki rumah, tidak memiliki aset, aset sedikit
7. Setelah itu verifikator dari Dinsos diharapkan dapat mengunggah foto dan geotagging sebagai bukti, namun ini bersifat opsional.

Gambar 31. Tangkapan layar aplikasi SIKS-NG pertanyaan Alasan Layak BLTS

Alasan Layak BLTS

1 Alasan Pengusulan 2 Unggah Foto Rumah Tampak Depan (Opsional) 3 Pilih Geotag (Opsional)

Kondisi Kesehatan
 Disabilitas Mengidap Penyakit Kronis

Kondisi ekonomi
 Hidup dari bantuan keluarga/tetangga/ pemerintah Keseharian hidup tidak layak

Pekerjaan
 Tidak punya pekerjaan Pekerjaan serabutan

Kondisi Keluarga
 Cerai hidup/ mati/ Yatim/Piatu Anak banyak/ anak masih kecil Hidup Sebatang Kara

Kondisi Rumah
 Rumah tidak layak Rumah kurang layak

Tutup Lanjut

Gambar 32. Pendampingan Verifikasi Terhadap Keluarga Edi Saputra



Dari hasil pendampingan didapatkan permasalahan dalam melakukan verifikasi. Verifikasi sebagian besar tidak dilaksanakan oleh pendamping PKH ataupun operator kelurahan. Verifikasi hanya dilakukan oleh sebagian kecil kecamatan dan hanya bersifat uji petik karena verifikasi baru dimulai oleh pendamping PKH dan Dinsos Palembang pada tanggal 5 Desember 2025, dimana merupakan hari terakhir verifikasi.

Terkait permasalahan ini BPS Kota Palembang melaporkan secara tertulis hasil pendampingan verifikasi keluarga calon BLTS Palembang kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian akan dilanjutkan ke BPS RI.

1.3.2.1. Inpres 6 2025 : Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Survei KSA Padi

Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai Nawacita. Untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, dibutuhkan data pertanian yang akurat dan tepat waktu. Selama ini, pengumpulan data luas panen menggunakan metode konvensional (eye estimate) yang kurang akurat dan memerlukan waktu lama.

Sebagai perbaikan, BPS bekerja sama dengan BPPT menerapkan metode Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis teknologi. Metode ini lebih objektif, modern, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan cepat.

Manfaatnya antara lain:

1. Menyediakan data akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.
2. Memberikan informasi luas panen, luas tanam, luas vegetatif, luas generatif, serta fase pertumbuhan padi dan jagung.

Alokasi petugas KSA memperhatikan banyaknya segmen yang akan dicacah, jarak, wilayah domisili petugas dan waktu penyelesaiannya sehingga petugas dapat menyelesaikan pekerjaan di lapangan dengan cepat. Secara umum, jumlah segmen KSA Padi sebanyak 34 segmen.

Berikut adalah jadwal kegiatan KSA Tahun 2025.

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pelaksanaan pengambilan data lapangan	7 hari terakhir setiap bulan
2	Verifikasi data lapangan oleh pengawasa	Tangga; 1-5 bulan berikutnya setelah pelaksanaan
3	Pengolahan dan tabulasi data	Tanggal 6-15 bulan berikutnya setelah pelaksanaan

Pelatihan Survei KSA dan Ubinan Tahun 2025 dilaksanakan oleh BPS RI secara daring pada tanggal 9 – 10 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh ketua dan anggota tim Statistik Pertanian dan Industri BPS Kota Palembang.

Terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti:

1. Ada beberapa segmen KSA Padi yang sulit dikunjungi karena kondisi lapangan banjir;
2. HP Petugas memorinya penuh sehingga ketika proses pengambilan foto amatan menjadi lambat.

Pengawasan/pemeriksaan dilakukan oleh PMS untuk meminimalisir

kesalahan yang terjadi. Pemeriksaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Pemeriksaan/pengawasan dalam kegiatan KSA 2025 bertujuan untuk:

1. Menjamin agar PCS melakukan tugasnya sesuai dengan jadwal waktu, tata cara dan instruksi yang telah dilakukan;
2. Menjamin kebenaran dan keabsahan hasil pelaksanaan lapangan yang dilakukan oleh PCS;
3. Menjamin agar PCS selalu berpegang teguh pada buku Pedoman Pencacah KSA Padi dan Jagung 2025, terutama konsep dan definisi yang digunakan.

Gambar 33. Pendataan KSA Padi



PMS harus melakukan pengawasan terhadap hasil pengamatan yang dilakukan PCS yang diawasinya selama rentang waktu pengamatan. Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui pengawasan secara langsung ke lokasi segmen, dan monitoring pelaksanaan KSA 2025. Monitoring KSA padi dapat dilakukan pada aplikasi KSA padi dan website <https://ksapro-manajemen.bps.go.id>.

Kegiatan pencacahan pengamatan Survei KSA Tahun 2025 dilaksanakan rutin setiap bulan dan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Berikut target dan realisasi pemasukan amatan Survei KSA Padi tahun 2025:

Kecamatan	Target	Realisasi
KSA PADI		
Ilir Barat Satu	12	12
Ilir Barat Dua	24	24
Gandus	84	84
Seberang Ulu Satu	48	48
Jakabaring	12	12
Seberang Ulu Dua	12	12
Kertapati	60	60
Plaju	36	36
Kalidoni	84	84
Sematangborang	36	36

Berdasarkan tabel target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kota Palembang dalam pelaksanaan Survei KSA Padi telah mencapai target 100 persen selama tahun 2025.

Selanjutnya berdasarkan hasil supervise/pengawasan yang dilakukan di beberapa sampel area Survei KSA diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Salah satu kendala yang dihadapi saat pelaksanaan Survei KSA adalah terdapat segmen yang wilayahnya tidak dapat diakses. Solusi yang dilakukan adalah petugas membuat kode hasil amatan menjadi 12 (Tidak dapat diakses) dan dilanjutkan dengan membuat berita acara. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Admin adalah edit amatan kode 12 menjadi Bukan Lahan Pertanian.
2. Selebihnya pelaksanaan lapangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP baik pencacahan maupun pemeriksaan/pengawasan.

Adapun saran bagi kegiatan Survei KSA 2025 yang telah dilaksanakan di BPS Kota Palembang sebagai gambaran untuk kegiatan survei berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap petugas yang dilibatkan harus dilakukan dengan perekrutan yang baik, agar didapatkan petugas yang berdedikasi dan berloyalitas tinggi agar diperoleh data yang berkualitas;
2. Setiap tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan Survei KSA 2025 harus dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan saat pelatihan;
3. Petugas yang terlibat harus memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga pendataan lapangan Survei KSA 2025 ini bisa berjalan lancar;
4. Hasil amatan di lapangan oleh petugas sebaiknya langsung diperiksa oleh pengawas sehingga jika ada kesalahan langsung bisa dikoreksi.

Ubinan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis di Indonesia karena berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan pangan sebagai hak asasi warga negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sejalan dengan tujuan SDGs untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan serta mewujudkan pertanian berkelanjutan.

Padi sebagai komoditas utama memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris, produksi beras dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan sehingga impor masih dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produksi, terutama melalui intensifikasi pertanian di tengah tantangan alih fungsi lahan.

Untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan produksi beras, diperlukan data produktivitas yang akurat. BPS secara rutin melaksanakan Survei Ubinan di 34 provinsi sepanjang tahun guna mengumpulkan data produktivitas padi sawah dan padi ladang sebagai komponen utama dalam penghitungan produksi padi nasional.

Pelaksanaan Survei Ubinan di Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui Survei Ubinan. Secara garis besar pelaksanaan Survei Ubinan terbagi menjadi 2

yaitu pemutakhiran daftar rumah tangga dan pelaksanaan ubinan.

Rekap Pemutakhiran Sampel Rumah Tangga Ubinan Palawija

Alokasi Blok Sensus	SR 1 2025	SR 2 2025	SR 3 2025	Jumlah
Jumlah	3	3	6	12

Pada tahun 2025 jumlah blok yang dimutakhirkan sebanyak 12 blok sensus dengan target sampel sebanyak 38 plot. Namun realisasinya, pada subround 1 terpenuhi 5 sampel, pada subround 2 hanya 9 sampel dan subround 3 sebanyak 11 sampel. Jadi total realisasi untuk ubinan palawija adalah 25 sampel rumah tangga/plot (65.78%). Kemudian dalam ubinan padi tahun 2025 dilakukan metode ubinan berbasis KSA. Dalam praktiknya, ubinan KSA lebih mudah dilaksanakan karena kita sudah mengetahui lokasi ubinan meskipun belum mengetahui pengelola sehingga pemantauan sawah lebih mudah dilakukan.

Target dan Realisasi Sampel Ubinan Padi

Jenis Tanaman	Target SR1 2025	Target SR2 2025	Target SR3 2025
Padi	0	1	82

Jenis Tanaman	Realisasi SR1 2025	Realisasi SR2 2025	Realisasi SR3 2025
Padi	0	1	114

Sehingga total realisasi padi dan palawija ada sebanyak 115 sampel dari total target kota Palembang adalah 83 sampel. Secara persentase capaiannya adalah 138.55%. Selama pelaksanaan di lapangan, salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas adalah kurangnya koordinasi dengan petani sehingga terjadi lewat panen. Solusi yang dilakukan oleh petugas adalah terus melakukan komunikasi dengan petani agar selanjutnya tidak lagi terjadi lewat panen.

Kegiatan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2025 di BPS Kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.

Pendataan Survei Pertanian Tanaman Pangan tidak mendapat kendala yang berarti. Pengumpulan data Survei Pertanian Tanaman Pangan 2025 sangat membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan petugas ubinan. Beberapa kendala terjadi namun masih bisa teratasi dan tidak mengganggu pelaksanaan Survei Ubinan di Kota Palembang.

Gambar 34. Pendataan Lapangan Ubinan



Adapun saran bagi kegiatan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2025 yang telah dilaksanakan di BPS Kota Palembang sebagai gambaran untuk kegiatan survei berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap petugas yang terlibat harus berdedikasi dan berloyalitas tinggi agar diperoleh data yang berkualitas;
2. Setiap tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2025 harus dilaksanakan secara tepat dan benar agar tidak menjadi masalah atau kendala pada tahapan berikutnya;
3. Petugas yang terlibat harus memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga pendataan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2025 ini bisa berjalan lancar.

3.3.2.2. Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem

Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) menjadi salah satu intervensi penting yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung

kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah juga akan terus memastikan penyaluran BLTS Kesra berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

BLTS Kesra adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan dan turut menopang pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun. BLTS Kesra merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional pada Triwulan IV Tahun 2025. Program ini dirancang agar bantuan dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Peran BPS dalam program ini adalah melakukan pendampingan verifikasi data calon penerima BLTS Kesra sesuai dengan surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B- 605/01000/ES/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Pendampingan Verifikasi Data Calon Penerima BLTS Kesra. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara teknis kepada petugas verifikasi yang bertugas di Kelurahan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses verifikasi, dan menyediakan informasi lapangan yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan penerima BLTS Kesra.

BPS Kota Palembang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang ditemukan bahwa adanya perbedaan pemahaman antara dinas dan operator kelurahan dan juga masih ditemukan keluarga yang tidak layak dan menerima bantuan. Proses verifikasi juga telah melibatkan perangkat daerah setempat.

Rangkaian kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan maksimal dan menghasilkan beberapa poin penting. Adapun output dari kegiatan di atas antara lain:

1. Tersedianya hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLTS Kesra di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan penetapan penerima bantuan.
2. Teridentifikasinya keluarga yang tidak layak namun tercatat sebagai penerima

BLTS Kesra, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pemutakhiran data.

3. Meningkatnya kualitas data calon penerima BLTS Kesra, khususnya dari sisi kesesuaian kondisi sosial ekonomi di lapangan dengan kriteria penerima bantuan.
4. Terbangunnya koordinasi yang lebih intensif antara BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, dan perangkat kelurahan dalam proses verifikasi data.
5. Tersusunnya informasi dan temuan lapangan terkait proses verifikasi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lanjutan oleh pemangku kepentingan.

Untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai dinamika di lapangan, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa tantangan yang muncul. Dalam pelaksanaannya, masih dihadapkan beberapa kendala antara lain:

1. Perbedaan pemahaman mengenai kriteria penerima BLTS Kesra antara dinas sosial, operator kelurahan, dan petugas verifikasi di lapangan.
2. Masih ditemukannya keluarga yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, namun tercantum dalam daftar calon penerima bantuan.
3. Keterbatasan pemahaman teknis petugas verifikasi kelurahan dalam menerapkan pedoman dan instrumen verifikasi.
4. Kondisi data awal yang belum sepenuhnya mutakhir, sehingga memerlukan klarifikasi tambahan di lapangan.
5. Waktu verifikasi yang relatif terbatas, sementara cakupan wilayah dan jumlah calon penerima cukup besar.

Guna meminimalisir hambatan tersebut dan memastikan program tetap berjalan secara optimal, telah dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Adapun solusi atas kendala-kendala tersebut adalah:

1. Melaksanakan Sosialisasi Terpadu dan Penyamaan persepsi melalui Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan Dinas Sosial, Operator dan Verifikator untuk membedah instrument kriteria secara mendalam.

2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Sebagai bentuk nyata dari upaya perbaikan dan penguatan program di lapangan, diperlukan rangkaian aksi yang terukur. Terkait hal tersebut, rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi antara BPS, Dinas Sosial, dan operator kelurahan melalui penjelasan ulang kriteria dan mekanisme verifikasi BLTS Kesra.
2. Penyampaian hasil temuan verifikasi kepada Dinas Sosial sebagai bahan perbaikan dan pemutakhiran data penerima bantuan.
3. Pemberian pendampingan teknis lanjutan kepada petugas verifikasi kelurahan, khususnya terkait penerapan kriteria dan pengisian instrumen verifikasi.
4. Mendorong pemanfaatan data hasil verifikasi lapangan sebagai referensi utama dalam penetapan penerima BLTS Kesra agar bantuan tepat sasaran.
5. Penguatan peran BPS Kota Palembang dalam monitoring dan evaluasi, untuk memastikan kualitas data sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga.

3.3.2.3. Makan Bergizi Gratis

Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Indonesia dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Asupan gizi yang memadai, terutama bagi kelompok usia sekolah, memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, perkembangan kognitif, serta produktivitas individu di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi gizi yang tepat sasaran.

Program MBG salah satunya bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik pada jenjang prasekolah sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat

memperoleh asupan nutrisi yang cukup selama jam belajar. Selain memberikan manfaat kesehatan bagi penerima manfaat langsung, program ini juga memiliki dampak terhadap aspek ekonomi dan sosial rumah tangga. Dalam rangka mengukur outcome program MBG untuk anak sekolah pada jangka pendek, perlu dilakukan survei baseline guna menilai pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga.

Pelaksanaan Survei Baseline Monitoring dan Evaluasi Program MBG dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juli dan bulan November 2025. Adapun secara umum kendala yang timbul pada saat pelaksanaan pendataan rumah tangga Survei Baseline Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis 2025 yaitu responden tidak berada di rumah saat petugas survei datang karena bekerja dan permasalahan pada CAPI seperti aplikasi mengalami error, lambat, atau gagal sinkronisasi ke server, terutama ketika jaringan internet tidak stabil.

BPS Kota Palembang juga melakukan strategi dalam pelaksanaan lapangan Survei Baseline Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis 2025 yaitu sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan ulang/revisit
- Untuk mengatasi kendala penggunaan CAPI melakukan pengecekan perangkat secara berkala, memastikan aplikasi telah diperbarui sebelum turun lapangan, serta menyediakan power bank untuk mengantisipasi baterai habis. Untuk mengatasi kendala jaringan, petugas dapat memanfaatkan mode offline saat wawancara dan melakukan sinkronisasi data ketika sudah berada di area dengan sinyal yang stabil.

3.3.3. Isu Strategis Nasional

3.3.3.1. Perpres 12 2025 : Survei Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Transformasi menuju sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing menjadi prioritas dalam

RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dalam hal ini, petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian memiliki peran sentral sehingga peningkatan kesejahteraan mereka menjadi sasaran penting pembangunan.

Selama ini, kesejahteraan petani diukur melalui indikator proxy seperti Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), dan tingkat kemiskinan. Namun, ketiga indikator tersebut masih terbatas karena hanya menilai aspek ekonomi dan belum mencerminkan kesejahteraan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang bersifat multidimensi, mencakup aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan dan gizi, serta mitigasi risiko usaha pertanian.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BPS melaksanakan Survei Kesejahteraan Petani 2025 (SKP2025) di seluruh provinsi. Survei ini mengumpulkan data dari rumah tangga usaha pertanian di berbagai subsektor guna menghasilkan indikator kesejahteraan petani yang lebih komprehensif dan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat sasaran.

Semua persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) sudah dilakukan agar pelaksanaan kegiatan baik pendataan di lapangan sampai dengan pengolahan berjalan lancar dan sesuai dengan SOP. Tim Statistik Pertanian dan Industri BPS Kota Palembang melakukan assign e-form yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kesejahteraan Petani.

Selama proses persiapan mulai dari rapat pembahasan jadwal dan kemungkinan masalah-masalah yang akan dihadapi selama pelaksanaan lapangan hingga *assign* dokumen ke akun petugas sudah dilaksanakan sesuai SOP. Pelatihan Petugas juga sudah dilaksanakan secara luring di Kantor BPS Kota Palembang pada tanggal 10 sd 11 September 2025. Pelatihan Petugas SKP berjalan lancar dan seluruh petugas berhasil mendapatkan nilai akhir lebih dari 80 (dinyatakan Lulus).

Kendala yang dihadapi selama proses persiapan adalah keterlambatan *assign* petugas di web FASIH-SM karena permasalahan jaringan. Solusinya adalah petugas melakukan pendataan menggunakan kuesioner terlebih dahulu dan kemudian di *input* ke aplikasi FASIH Mobile setelah proses *assign* berhasil. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk kegiatan ke depannya adalah melakukan proses *assignment* lebih awal untuk mengantisipasi kendala teknis dan memberikan *briefing* kepada petugas

terkait prosedur alternatif jika terjadi gangguan sistem. Selibuhnya proses persiapan telah dilaksanakan sesuai SOP dan tidak ada kendala yang berarti.

Kegiatan pendataan Survei Kesejahteraan Petani 2025 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada pertengahan September hingga pertengahan Oktober 2025. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data menggunakan kuesioner elektronik berupa e-form SKP untuk mempermudah proses pencatatan dan pengolahan data. Total sampel yang berhasil didata sebanyak 183 rumah tangga, dengan capaian respons sebesar 100 persen, sehingga seluruh target sampel dapat dicacah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) adalah terdapat beberapa rumah tangga yang sulit ditemui. Sehingga solusi yang dilakukan adalah petugas bersama pengawas lapangan melakukan kunjungan ulang ke rumah tangga yang berkaitan. Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan ke depan adalah meningkatkan koordinasi dengan aparat desa atau ketua RT/RW setempat untuk memperoleh informasi terkait waktu keberadaan responden di rumah, sehingga kunjungan dapat dilakukan pada waktu yang lebih tepat. Selain itu, petugas juga disarankan melakukan konfirmasi awal melalui kontak yang tersedia sebelum kunjungan, serta menyiapkan waktu cadangan untuk kunjungan ulang guna mengantisipasi responden yang sulit ditemui. Kendala lainnya terdapat beberapa sampel rumah tangga yang komoditas diusahakannya berubah. Sehingga solusi yang dilakukan adalah petugas melaporkan hal tersebut ke pengawas untuk dilakukan penggantian sampel.

Gambar 35. Pengawasan pendataan Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2025



3.3.3.2. Undang-Undang No 16 Tahun 1997 : Sensus Ekonomi

Perkembangan ekonomi yang dinamis menuntut ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. BPS mendukung kebutuhan tersebut melalui pengembangan Statistical Business Register (SBR), yaitu daftar unit usaha/perusahaan yang terstruktur dan diperbarui secara berkala sebagai kerangka sampel survei ekonomi dan dasar penyusunan statistik demografi bisnis. SBR mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti sensus, survei, data administrasi, profiling, dan data perpajakan, dengan proses matching untuk mencegah duplikasi dan memastikan kelengkapan data.

Sejak dibangun ulang berbasis data Sensus Ekonomi 2016, SBR terus dipelihara melalui integrasi data Penanggung Jawab Kegiatan (PJK), data pajak dari DJP, survey feedback, Groundcheck (QIS) 2023, serta Updating Direktori Usaha/Perusahaan (UDPE) dan profiling tahun 2024. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan validitas data usaha/perusahaan.

Dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 2026, SBR menjadi rujukan utama untuk identifikasi awal keberadaan usaha/perusahaan. Oleh karena itu, pada tahun 2025 kembali dilaksanakan kegiatan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi (UDPE) Lanjutan dan Profiling oleh BPS Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memutakhirkan database SBR agar semakin akurat, lengkap, dan andal sebagai dasar penyusunan statistik ekonomi dan pelaksanaan sensus mendatang. Jumlah sampel UDPE Lanjutan tahun 2025.

Tabel 36. Jumlah sampel UDPE Lanjutan tahun 2025

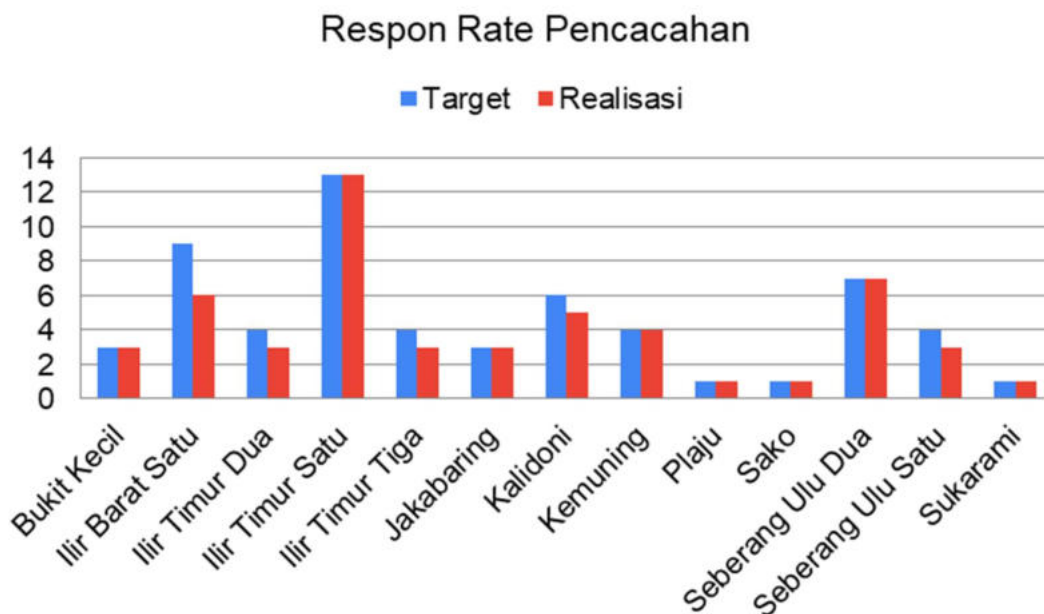
Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Sampel
010	ILIR BARAT DUA	2
011	GANDUS	3
020	SEBERANG ULU SATU	17
021	KERTAPATI	1
022	JAKABARING	5
030	SEBERANG ULU DUA	12
031	PLAJU	4
040	ILIR BARAT SATU	40
041	BUKIT KECIL	11
050	ILIR TIMUR SATU	76
051	KEMUNING	20
060	ILIR TIMUR DUA	28
061	KALIDONO	42

062	ILIR TIMUR TIGA	28
070	SAKO	11
071	SEMATANG BORANG	2
080	SUKARAMI	30
081	ALANG-ALANG LEBAR	28

Secara keseluruhan survei berbasis usaha tingkat respon rate-nya cukup baik, untuk kegiatan survei ini mencapai 100 persen. Apabila respon rate tidak mencapai 100 persen atau lebih akan menjadi kendala bagi BPS untuk menyajikan data berkualitas. Kedepan diharapkan peningkatan sosialisasi sensus/survei yang dilaksanakan oleh BPS, sehingga meningkatkan kesadaran kalangan usaha sebagai calon responden akan pentingnya respon/jawaban responden untuk peningkatan kualitas data.

Kegiatan survei UDPE 2025 Kota Palembang dengan jumlah sampel sebanyak 60 usaha dan 53 usaha berhasil dicacah.

Grafik 6. Presentase Respon Rate



Terdapat beberapa kendala dan permasalahan terkait kegiatan UDPE Lanjutan Tahun 2025. Permasalahan dan kendala tersebut dapat dibagi menjadi permasalahan dan kendala pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil.

Tabel 37. Permasalahan Kegiatan UDPE Lanjutan Tahun 2025

Tahap	Topik	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
Persiapan	Konsep dan Definisi	1. Tidak ada masalah	
	Penyiapan Data	1. Sampel belum tersedia sampai dengan waktu pendataan lapangan	Lakukan koordinasi, Gunakan data pendukung dari direktori lain dan
	Identifikasi Sampel	1. Beberapa responden tidak memiliki alamat lengkap 2. Nomor telpon banyak yang tidak aktif lagi.	Gunakan data pendukung dari direktori lain (seperti hasil Pemetaan Wilkerstat yang sedang berjalan) untuk memperbarui lokasi
Pelaksanaan	Waktu Pendataan	1. Kegiatan bersamaan dengan pemetaan wilkerstat. 2. Jadwal pencacahan kurang dari 1 bulan	Terapkan manajemen beban kerja (workload management): bagi tim secara spesifik antara yang fokus di Wilkerstat dan yang fokus pada pencacahan sampel ini. Prioritaskan sampel yang alamatnya sudah jelas terlebih dahulu agar progres (target harian) tetap tercapai.
	Kuesioner	1. Tidak ada masalah	
	Sampel usaha/perusahaan	1. Alamat responden tidak jelas sehingga sulit untuk dilacak 2. Alamat tidak mmenyertakan no telpon	Lakukan search mandiri melalui Google Maps atau media sosial perusahaan jika nama usaha diketahui
	Aplikasi FASIH	1. Proses assign sering gagal dan harus sering dicoba	Lakukan proses assign pada jam tidak sibuk (pagi buta atau malam hari) untuk menghindari beban server.
Pengolahan	ID SBR	1. Tidak ada masalah	
	<i>E-mail</i>	1. Beberapa perusahaan/usaha tidak memiliki email	gunakan metode pencacahan tatap muka (PAPI/CAPI) atau tinggalkan kuesioner fisik (drop-off)
	Anomali Data	1. Jumlah TK dan upah tidak sesuai 2. Jumlah pengeluaran lebih besar dari penerimaan	Konfirmasi Ulang (Probing)

Beberapa rekomendasi yang dapat disusun diantaranya yaitu:

- Adanya koordinasi dengan lembaga yang terkait dengan sampel usaha seperti DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, dan pihak terkait lainnya.
- Perlunya pendekatan kepada perusahaan/usaha melalui wadah organisasi yang membawahnya agar kegiatan lebih mudah dilaksanakan.
- Koordinasi yang intens dengan responden serta menjaga hubungan baik guna keberhasilan sensus dan survey kedepannya.

2. Profiling di BPS Kabupaten/Kota

Kegiatan profiling usaha akan melibatkan *Liaison Officer* (LO) di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Petugas profiling adalah organik BPS RI/Provinsi/Kabupaten/Kota. Alokasi profiler daerah proporsional terhadap jumlah usaha besar yang belum pernah termutakhirkan. Beberapa variabel yang dimutakhirkan meliputi keberadaan perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, *email*, kategori dan KBLI. Profiling dilakukan oleh tim BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan aplikasi Matcha-Pro yang diakses melalui alamat <https://matchapro.web.bps.go.id>

Persentase Penyelesaian Target Profiling

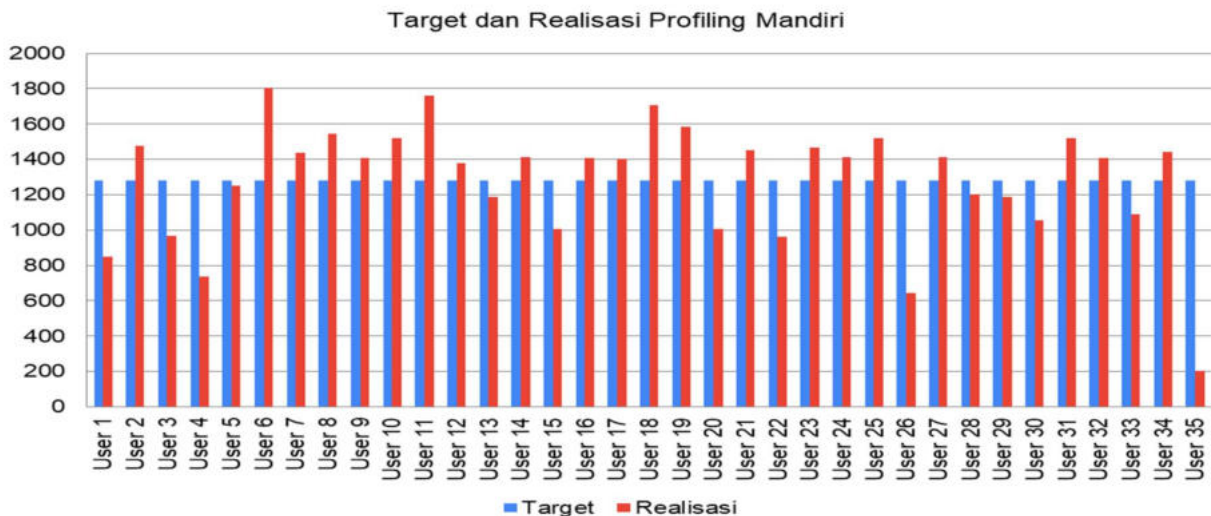
Hasil Profiling Periodik

Kegiatan profiling di BPS Kota Palembang telah dilakukan namun belum maksimal. Untuk target dan capaian penyelesaian profiling periodik Kota Palembang mencapai 151 usaha. Hal ini dikarenakan kegiatan profiling periodik pada awal tahun hanya dilakukan oleh 3 orang dan belum melibatkan seluruh pegawai sehingga hasilnya tidak maksimal.

Hasil Profiling Mandiri

Kegiatan profiling mandiri dilaksanakan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Seluruh pegawai ikut aktif terlibat dalam melakukan profiling usaha secara on-desk dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk mengidentifikasi perusahaan/usaha yang ada di *webentry matchapro*. Adapun jumlah target Usaha/perusahaan yang akan dilakukan profiling yaitu sebanyak 54.217 dan realisasi sudah mencapai 100 persen.

Grafik 7. Target dan Realisasi Penyelesaian Profiling Mandiri



Hasil Profiling Berdasarkan Sumber Data

Kegiatan Profiling Mandiri SBR bertujuan untuk memastikan bahwa cakupan unit usaha mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Proses ini dilakukan secara on-desk oleh Profiler BPS Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan berbagai sumber data yang tersedia, yaitu :

Data dari OJK Palembang, Data dari web Gapensi, Data dari web Kemenag, Data dari web BPJS-Kesehatan, Data dari DPMPSTSP Prov. Jateng, Data dari Disperindag Prov. Jateng.

Beberapa sumber data yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran database SBR pada kegiatan profiling berasal dari beberapa instansi daerah atau kegiatan lain yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 38 Sumber Data Pemuktahiran

No	Sumber Data	Jumlah Data
1	http://s.bps.go.id/Direktori_Usaha_1671	5.992
2	http://s.bps.go.id/Data_OJK_Palembang	868
3	https://s.bps.go.id/Data_Gapensi	402

Beberapa permasalahan dan Solusi pada kegiatan Profiling di BPS Kota Palembang adalah sebagai berikut:

Topik (1)	Permasalahan (2)	Solusi (3)
Aplikasi Matcha Pro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan sering error 2. VPN Sering Down 3. Beberapa kasus data tidak tersimpan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan erros sementara dengan restart HP 2. Pindah ke Wi-Fi yang lebih stabil atau sinyal lebih kuat 3. Sisakan minimal 10–15% ruang kosong
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya petugas ikut kegiatan berurusan kegiatan lainnya 2. Padatnya jadwal kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan prioritas kegiatan
Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Awalnya evaluasi kegiatan Mandiri, belum terstruktur dengan perencanaan semula, karena di anggap belum suatu kewajiban 2. Kegiatan profiling mandiri tidak berjalan dengan baik dan jauh dari target yang harus diselesaikan. 3. di pertengahan tahun di buat suatu tim khusus yang menangani masalah kegiatan SBR mandiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan evaluasi sebagai kewajiban, menyusun mekanisme evaluasi sejak tahap perencanaan, serta menunjuk penanggung jawab evaluasi agar pelaksanaannya berjalan sistematis 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres kegiatan

Beberapa rekomendasi yang dapat disusun diantaranya yaitu:

- Adanya koordinasi dengan dinas dan instansi terkait yang membawahi perusahaan/usaha melalui matching data dengan data dari instansi terkait dan data profiling.
- Perlunya *Groundchek* untuk memastikan keberadaan unit usaha di lapangan
- Mitigasi resiko dari awal tahun agar kegiatan dapat berjalan maksimal

Inovasi yang dilakukan BPS Kota Palembang dalam mendukung penyelesaian kegiatan UDPE Lanjutan Tahun 2025 dan Profiling SBR yaitu dengan membagi habis seluruh kegiatan profiling SBR kepada seluruh organik di BPS kota Palembang yang berjumlah 35 orang guna menyelesaikan kegiatan profiling agar tepat waktu. Adapun target profiling sebanyak 54.217 dapat diselesaikan sampai dengan akhir bulan Agustus 2025.

3.3.3.3. Perpres 61 2024 dan Perpres 17 2025 : Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Salah satu subsektor pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah Subsektor Peternakan. Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang

memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Selain itu, ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani.

Kendala :

1. Konsistensi jumlah pemotongan ternak saat musim Idul Adha sebelumnya tidak dimasukkan ke pendataan, kemudian ada instruksi dari pusat untuk memasukan data pemotongan Idul Adha ke data bulan Juni sebagai hasil rekonsiliasi dengan data yang ada di Ditjen PKH Kementan.
2. Pendataan Survei PPI-TPI sering terlambat dari PSDKP
3. Sulitnya respon dari perusahaan yang menjadi sampel

Solusi

1. Melakukan perbaikan data bulan Juni dengan menambahkan data pemotongan saat Idul Adha;
2. Agar dapat melakukan *follow up* lebih sering lagi kepada pihak Satuan PSDKP Palembang ketika sudah memasuki masa pendataan;
3. Melakukan kunjungan ulang/revisit bersama ketua Tim Statistik Pertanian dari BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Rekomendasi :

1. Setiap petugas yang terlibat harus berdedikasi dan berloyalitas tinggi agar diperoleh data yang berkualitas;
2. Setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan Laporan LPTB 2025 harus dilaksanakan secara tepat dan benar agar tidak menjadi masalah atau kendala pada tahapan berikutnya;
3. Petugas yang terlibat harus memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga pendataan lapangan LPTB Tahun 2025 ini bisa berjalan lancar;

3.4 Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2025

3.4.1. Prestasi

Badan Pusat Statistik Kota Palembang menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang atas capaian kinerja dalam Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat Satuan Kerja Mitra KPPN Palembang Semester II Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja BPS Kota Palembang dalam mengelola pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sepanjang Semester II Tahun Anggaran 2025.

Penilaian IKPA mencakup berbagai indikator strategis, antara lain:

- Kualitas perencanaan dan revisi anggaran
- Ketepatan waktu penyampaian dan penyelesaian tagihan
- Pengelolaan belanja dan deviasi halaman III DIPA
- Penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara
- Pengelolaan UP/TUP dan akurasi data kontrak
- Capaian output serta kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan

Capaian ini mencerminkan sinergi dan koordinasi yang baik antara jajaran pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, serta seluruh tim kerja di lingkungan BPS Kota Palembang dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan berintegritas.

Gambar 36. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Mitra KPPN Palembang semester II Tahun 2025



BPS Kota Palembang menerima penghargaan dari Pengurus Bersama Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (PB IKA LKS) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya sebagai narasumber dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) Angkatan XXIV se-Kota Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15–18 Desember 2025 di Aula Persada 06, Kantor Camat Ilir Timur I.

Keterlibatan BPS Kota Palembang dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap pengembangan kapasitas dan karakter kepemimpinan generasi muda. Melalui materi yang disampaikan, peserta memperoleh wawasan mengenai pentingnya data dan statistik dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta peran generasi muda dalam mendukung pembangunan berbasis data.

Penghargaan yang diberikan menjadi bentuk pengakuan atas peran aktif BPS Kota Palembang dalam kegiatan edukatif dan pembinaan kepemimpinan di tingkat pelajar, sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan berbagai elemen masyarakat dalam meningkatkan literasi statistik dan kualitas sumber daya manusia di Kota Palembang.

Gambar 37. Penghargaan dari Pengurus Bersama Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (PB IKA LKS)



Selain penghargaan dari PB IKA LKS, BPS Kota Palembang juga menerima penghargaan dari Wali Kota Palembang atas partisipasinya dalam penyampaian Laporan 9 Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025 melalui Aplikasi Kendali Ekonomi (Si-Grow).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif BPS dalam menyediakan, mengolah, dan menyajikan data serta indikator ekonomi yang akurat

dan tepat waktu guna mendukung monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui aplikasi Si-Grow, pelaporan dilakukan secara terintegrasi sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam memantau capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran.

Partisipasi BPS Kota Palembang dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis data (*evidence-based policy*), sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan Pemerintah Kota Palembang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 38. Penghargaan dari Walikota



Sedangkan dari sisi internal, prestasi yang diperoleh BPS Kota Palembang antara lain :

1. Pengguna terbaik Aplikasi Back Office Selindo (BOS) Triwulan III Tahun 2025 wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Penghargaan ini diberikan atas kinerja unggul BPS Kota Palembang dalam mengoperasikan aplikasi BOS, mulai dari pengelolaan data, pemutakhiran informasi, hingga penyelesaian tugas administratif secara tepat waktu dan akurat. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan SDM BPS Kota Palembang dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses kerja internal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan statistik.

Gambar 39. Penghargaan mengoperasikan aplikasi BOS



2. Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota dengan kolaborasi Eksternal Terbaik BPS Provinsi Sumatera Selatan Award Tahun 2025

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan BPS Kota Palembang dalam menjalin kerja sama dan sinergi yang efektif dengan berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini mencakup koordinasi dalam pengumpulan data, penyebaran informasi statistik, serta kegiatan edukatif dan sosialisasi, sehingga mendukung tercapainya kualitas data yang akurat, tepat waktu, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

Gambar 40. Penghargaan Kolaborasi Eksternal Terbaik



3. BPS Kota Palembang dengan kinerja terbaik dalam kegiatan tim statistik harga tahun 2025

Gambar 41. Penghargaan Kinerja Terbaik dalam kegiatan tim statistik harga tahun 2025



4. Kinerja Terbaik 2 Dalam Kegiatan Tim Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata (KTIP) Tahun Anggaran 2025

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja tim dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data statistik di bidang keuangan, teknologi, informasi, dan pariwisata secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar operasional. Pencapaian ini menunjukkan profesionalisme SDM BPS Kota Palembang serta efektivitas koordinasi tim dalam mendukung penyediaan data berkualitas yang menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Gambar 42. Penghargaan Kinerja Terbaik 2 Dalam Kegiatan Tim Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata (KTIP) Tahun Anggaran 2025



5. Kinerja Terbaik 1 dalam Kegiatan Pertambangan, Energi dan Konstruksi (PEK) Provinsi Sumsel Tahun 2025

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan tim dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data statistik di sektor pertambangan, energi, dan konstruksi secara akurat, tepat waktu, dan sesuai prosedur.

Gambar 43. Penghargaan Kinerja Terbaik 1 dalam Kegiatan Pertambangan, Energi dan Konstruksi (PEK) Provinsi Sumsel Tahun 2025



6. Pengguna Terbaik Aplikasi Back Office Selindo (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 44. Pengguna Terbaik Aplikasi Back Office Selindo (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan



3.4.2. Inovasi

BPS Kota Palembang telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan dan transformasi melalui berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi operasional. Inovasi utama yang telah diterapkan di BPS Kota Palembang, sebagai berikut :

1. Sistem Administrasi Terpadu (SATU)

Sistem Administrasi Terpadu (SATU) yang dimiliki oleh BPS Kota Palembang adalah platform digital inovatif yang dirancang untuk mempermudah akses informasi serta menyederhanakan administrasi di lingkungan BPS Kota Palembang. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Subbagian Umum, guna meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan administrasi. Beberapa fitur yang tersedia dalam Sistem SATU antara lain:

- RKAKL/POK, Pengguna dapat mengakses dan memantau data terkait rencana anggaran dan program yang diatur dalam RKAKL/POK.
- LRA/RPD (Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Penggunaan Dana): Sistem ini memungkinkan pengelolaan dan pelaporan anggaran serta realisasi penggunaan dana yang lebih terstruktur dan efisien.
- SPI (Sistem Pengendalian Internal), Setiap pegawai di Subbagian Umum dapat mengunggah seluruh data terkait SPI untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Matrik DL (Daftar Laporan), Pegawai dapat memonitor dan mengelola berbagai laporan yang diperlukan dalam aktivitas administrasi di BPS Kota Palembang.
- Matriks Beban Kerja, Sistem ini juga memungkinkan pengelolaan dan pemantauan beban kerja setiap pegawai untuk memastikan efisiensi dalam pembagian tugas.
- Dokumentasi Kegiatan, Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang dapat didokumentasikan dan diakses dalam aplikasi ini untuk kebutuhan arsip dan evaluasi.
- Nota Dinas, Sistem ini mempermudah pembuatan, pengelolaan, dan

- pelacakan nota dinas yang diterbitkan di lingkungan BPS.
- Nomor Surat BOS, Pengelolaan nomor surat untuk kegiatan yang terkait dengan Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dapat dilakukan secara terintegrasi dalam sistem ini.
 - Nomor SK (Surat Keputusan), Setiap Surat Keputusan yang dikeluarkan dalam organisasi dapat didokumentasikan dan dikelola dengan lebih efisien melalui SATU.
 - Kartu Kendali Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Aplikasi ini mempermudah pengelolaan dan pemantauan pemeliharaan kendaraan dinas, memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.
 - Tautan untuk Aplikasi Terkait, SATU juga menyediakan tautan langsung untuk membuka aplikasi lain yang digunakan dalam pengelolaan data, seperti Monev Bappenas, Smart, Si Monev BPS, dan MUSI, yang memudahkan integrasi dan akses antar platform.
 - Form Rencana Aksi, Sistem ini juga menyediakan formulir rencana aksi yang berisi semua pendukung dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
 - Pengajuan WFH (Work From Home), Pegawai dapat mengajukan izin untuk bekerja dari rumah secara mudah melalui aplikasi ini.
 - Whistle Blower, Fitur ini memungkinkan pegawai untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan BPS dengan cara yang aman dan terjamin kerahasiaannya.
 - Konsultasi Statistik, Aplikasi ini juga menyediakan layanan konsultasi terkait statistik bagi pegawai dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang tepat dalam penggunaan data dan informasi statistik.

Gambar 45. Aplikasi SATU (Sistem Admintrasi Terpadu)



Dengan adanya Sistem Administrasi Terpadu (SATU), BPS Kota Palembang berharap dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh proses administrasi dan operasional yang berlangsung di lingkungan BPS. Sistem ini juga mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan menggunakan teknologi yang terintegrasi dan mudah diakses.

2. Pojok Statistik

Pojok Statistik di Universitas Bina Darma Palembang merupakan salah satu inisiatif kolaboratif antara BPS Kota Palembang dan universitas tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta aksesibilitas informasi statistik di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Kegiatan pojok statistik dilaksanakan di Universitas Bina Dharma Palembang dengan MOU Nomor : 121/Moumniv-BDN111/202 tanggal 22 Agustus 2024.

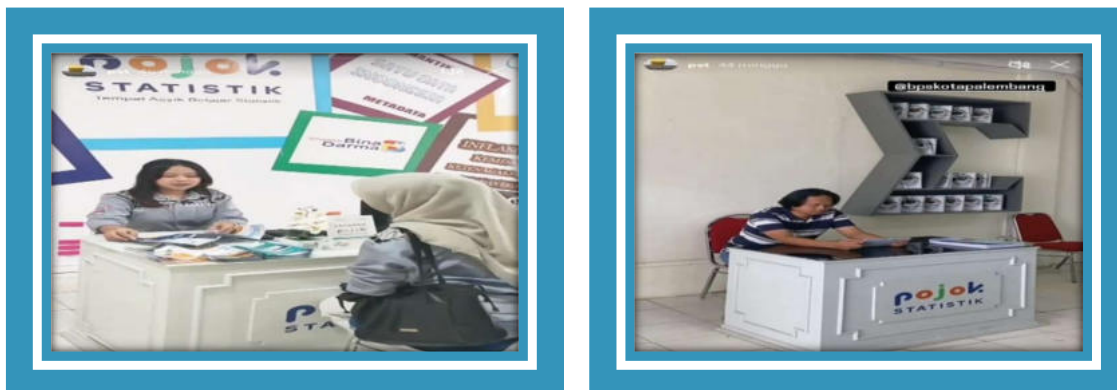
Pojok Statistik ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai publikasi, laporan, dan data statistik terbaru yang relevan dengan berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan demografi, yang dihasilkan oleh BPS Kota Palembang. Dalam upaya memperkenalkan Pojok Statistik kepada masyarakat luas, Universitas Bina Darma telah meluncurkan akun Instagram khusus untuk Pojok Statistik. Melalui platform ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait berbagai data statistik yang tersedia, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya statistik dalam pembangunan dan penelitian.

Gambar 46. Instagram Pojok Statistik Universitas Bina Dharma Palembang



Melalui Pojok Statistik di Universitas Bina Dharma, mahasiswa dapat mengakses data dan informasi yang berguna untuk penelitian, tugas akademik, atau sekadar memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya data statistik dalam konteks pembangunan daerah. Pojok Statistik juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan lebih jauh konsep-konsep statistik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tempat ini menjadi ajang bagi civitas akademika untuk berinteraksi langsung dengan data yang diperoleh dari BPS dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana statistik digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Gambar 47. Pojok Statistik di Bina Dharma Palembang





3. WA BOT

Inovasi ini sebelumnya telah dijalankan oleh BPS Kota Palembang, namun sempat dihentikan. Pada tahun 2025, aplikasi ini kembali diaktifkan, menandai pemanfaatannya kembali untuk mendukung kegiatan operasional dan pengolahan data BPS Kota Palembang secara lebih efektif dan efisien. WhatsApp pelayanan ini merupakan layanan otomatis berbalas yang dapat diakses langsung oleh pengguna data. Inovasi yang dijalankan merupakan WhatsApp (WA) Pelayanan yang menggunakan WA bisnis atau WA bot, sehingga pengguna layanan dapat langsung mendapatkan jawaban tanpa menunggu admin untuk menjawab. Terdapat 5 (lima) menu utama dalam WA pelayanan yang dapat diakses secara umum, yaitu:

a. Whistle Blower (Layanan Pengaduan)

Layanan pengaduan adalah sarana yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palembang untuk menerima dan mengelola laporan pelanggaran (pengaduan) terutama yang berindikasi adanya kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan dan kinerja oleh pegawai BPS Kota Palembang. Bagi pengguna data yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Kota Palembang, dapat menyampaikan pada sistem ini untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Materi pengaduan yang ditindaklanjuti pada sistem ini adalah laporan terkait pelanggaran berupa:

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Penyalahgunaan wewenang

- Disiplin pegawai
- Standar Pelayanan
- Hambatan Pelayanan

BPS Kota Palembang menghargai informasi yang dilaporkan dan fokus kami adalah kepada materi informasi yang disampaikan. Pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri karena kami akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI pelapor sebagai whistleblower.

Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- WHAT (perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui)
- WHERE (dimana perbuatan tersebut dilakukan)
- WHEN (Kapan perbuatan tersebut dilakukan)
- WHO (siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut)
- HOW (bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb))

Setelah memenuhi unsur tersebut di atas, laporan yang disampaikan sebaiknya dilampiri dengan bukti atas kegiatan pelanggaran tersebut. Bukti dapat berupa file, gambar, foto, atau video baik yang berkaitan langsung dengan pelanggaran maupun bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi pelanggaran.

b. Informasi Statistik Terkini

Informasi statistik terkini memuat data statistik terkini dari indikator utama pembangunan, yaitu data inflasi, PDRB, Kemiskinan, Gini Rasio, Ketenagakerjaan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data-data tersebut disajikan secara time series dan cross sectional.

c. Konsultasi Statistik

Layanan Konsultasi Statistik ditujukan bagi pengguna data yang ingin menggunakan data statistik BPS. Jenis layanan yang bisa pengguna dapatkan, yaitu:

1. Permintaan tabel data series; dan
2. Permintaan publikasi data statistik

Dalam mengajukan permintaan data harap menjabarkan dengan jelas variabel data yang diinginkan, serta mencakup tahun dan wilayah data yang diinginkan. Publikasi data sekunder hasil olah BPS Kota Palembang tersedia dan dapat diunduh di website <https://palembangkota.bps.go.id/>

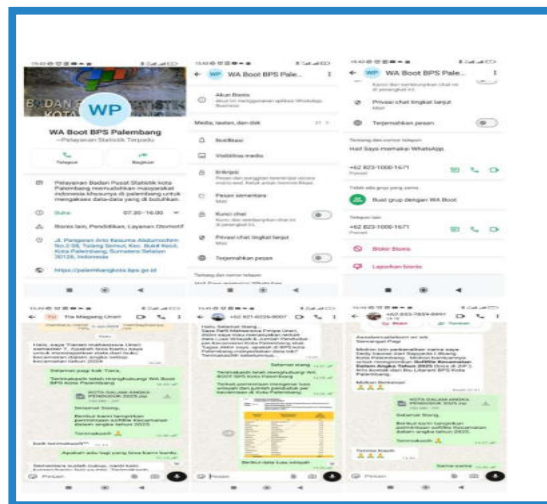
d. Permintaan Mikro Data

Permintaan mikro data merupakan pelayanan berbayar. Layanan ini dapat diakses secara gratis jika data yang diminta kurang dari 5 MB. Pengguna data yang ingin mengakses layanan ini akan langsung diarahkan ke website silastik.bps.go.id

e. Lokasi Office

Lokasi merupakan informasi tambahan bagi pengguna data yang ingin datang langsung ke pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Palembang. adapun lokasi tersebut berada di Jl.PAK Abdul Rohim No.2 Talang Semut Palembang.

Gambar 48. Screen Shoot Aplikasi WA BOT



4. Inovasi PLA-INSTA (Palembang Indikator Strategis Terkini dan Aktual)

Inovasi PAL-INSTA (Palembang Indikator Strategis Terkini dan Aktual) merupakan inisiatif BPS Kota Palembang untuk menyampaikan indikator strategis daerah melalui media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp. Inovasi ini menargetkan masyarakat umum, terutama generasi muda dan pengguna aktif media sosial di Kota Palembang.

Tujuan:

- Menyajikan data strategis Kota Palembang secara visual, singkat, dan menarik.
- Meningkatkan literasi statistik masyarakat melalui media yang mudah diakses.
- Memperluas jangkauan publikasi data BPS dengan pendekatan kekinian.

Bentuk kegiatan inovasi PAL-INSTA meliputi pembuatan konten indikator strategis seperti inflasi, IPM, kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, yang dipublikasikan secara berkala melalui akun resmi Instagram BPS Kota Palembang. Konten disajikan dengan desain visual yang konsisten, informatif, dan menampilkan ikon lokal seperti Jembatan Ampera untuk memperkuat identitas daerah.

Keunggulan inovasi ini terletak pada visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, distribusi informasi yang cepat dan luas, pemanfaatan platform media sosial yang sudah familiar bagi masyarakat, serta efisiensi dari segi biaya dan waktu, sehingga mendukung penyampaian data strategis Kota Palembang secara efektif dan partisipatif. PAL-INSTA diharapkan menjadi strategi komunikasi data yang efektif di era digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami pembangunan Kota Palembang melalui data statistik.

Gambar 49. Screenshot PAL-INSTA di Facebook



5. Inovasi SEMPURNA (Seleksi Pegawai Unggul dan Berintegritas)

BPS memiliki tugas menyediakan data statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir, dan relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan data yang cepat dan beragam menjadi tantangan bagi BPS, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Untuk memperkuat kinerja pegawai serta menanamkan nilai core value ASN

BerAKHLAK, BPS Kota Palembang menginisiasi inovasi pemberian penghargaan internal.

Inovasi tersebut bernama SEMPURNA (Seleksi Pegawai Unggul dan Berintegritas), yaitu program penghargaan bulanan bagi pegawai berprestasi. Setiap bulan dipilih satu pegawai terbaik yang menyandang predikat “Si Pegawai Unggul dan Berintegritas”.

Tujuan inovasi ini adalah memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, serta mendorong produktivitas dan integritas pegawai di lingkungan BPS Kota Palembang. Program penghargaan SEMPURNA dilaksanakan setiap bulan, dengan proses pemilihan pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan berikutnya. Tahapan dimulai dengan pengisian kertas kerja penilaian oleh Tim Evaluasi terhadap kinerja pegawai.

Selanjutnya, dipilih tiga pegawai dengan nilai tertinggi untuk masuk tahap berikutnya. Ketiga kandidat tersebut kemudian mengikuti proses voting yang melibatkan seluruh pegawai, dengan penilaian berdasarkan aspek core values ASN BerAKHLAK.

Pegawai yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai SEMPURNA (Si Pegawai Unggul dan Berintegritas). Penerima penghargaan mendapatkan sertifikat dan hadiah, serta diumumkan melalui media sosial BPS Kota Palembang sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi seluruh pegawai.

Gambar 50. Dokumentasi dan Sertifikat Sempurna



6. Kolaborasi (Kota Palembang Berbagi Knowledge dan Informasi)

Inovasi KOLABORASI merupakan program internal BPS Kota Palembang yang bertujuan mendorong pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan antarpegawai di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembelajaran berkelanjutan serta kebutuhan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, suportif, dan adaptif.

Kegiatan dilaksanakan setiap hari Senin setelah rapat mingguan, dengan dua pegawai secara bergantian menyampaikan materi selama maksimal 20 menit termasuk sesi tanya jawab. Seluruh pegawai BPS Kota Palembang menjadi sasaran kegiatan ini.

Keunggulan inovasi ini antara lain memberikan ruang berbagi pengetahuan bagi seluruh pegawai, melatih kemampuan berbicara di depan publik, meningkatkan kepercayaan diri, serta efisien dari segi biaya dan waktu. Melalui KOLABORASI, diharapkan tercipta pegawai yang lebih kompeten, berwawasan luas, serta lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif.

Gambar 51. : Kegiatan Kolaborasi BPS Kota Palembang



7. Inovasi One-Fo

ONE-FO merupakan inovasi BPS Kota Palembang yang mendorong setiap pegawai untuk membuat minimal satu infografis terkait statistik Kota Palembang. Program ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyebaran data statistik yang lebih visual, ringkas, dan mudah dipahami di era digital.

Tujuan program ini adalah meningkatkan partisipasi dan kreativitas pegawai, memperbanyak konten statistik yang menarik dan informatif, meningkatkan literasi statistik masyarakat, serta menumbuhkan budaya kerja inovatif dan kolaboratif. Infografis yang dibuat berdasarkan data sektoral, hasil survei, atau statistik strategis lainnya akan dipublikasikan melalui media sosial, website, atau media lainnya.

Melalui ONE-FO, diharapkan diseminasi data semakin luas, kompetensi pegawai dalam komunikasi data meningkat, serta citra BPS sebagai institusi yang adaptif dan inovatif semakin kuat.

Gambar 52. Screenshot One-Fo di Website



8. Kopi Manis (Koordinasi Pagi Menambah Harmonis)

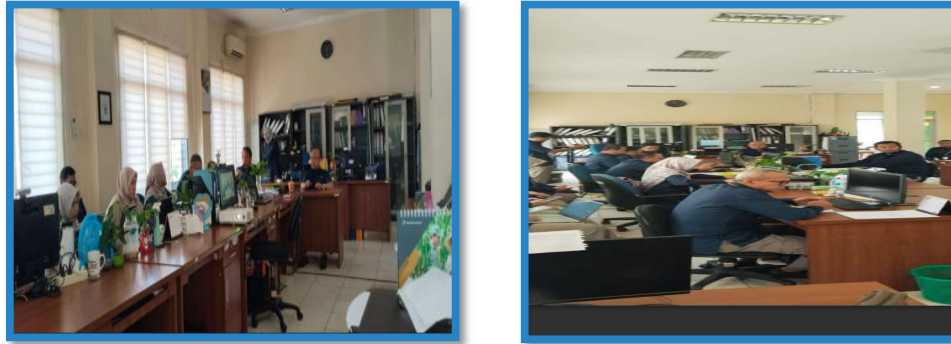
Merupakan kegiatan rapat rutin yang telah dijalankan oleh BPS Kota Palembang dan dilaksanakan setiap hari Senin. Rapat ini diikuti oleh seluruh pegawai serta dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Palembang sebagai forum koordinasi utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam KOPI MANIS dibahas berbagai hal strategis, seperti perencanaan dan penyampaian target kegiatan, penyusunan strategi atas rencana kerja, pemecahan permasalahan yang dihadapi, penyampaian informasi penting, serta evaluasi realisasi capaian kegiatan dari masing-masing tim.

Melalui kegiatan ini, informasi mengenai kegiatan setiap tim dapat diketahui secara menyeluruh, target kerja dapat direncanakan dan disepakati bersama, serta capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, KOPI MANIS menjadi sarana efektif untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan

akuntabilitas, dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Gambar 53. Dokumentasi Kopi Manis BPS Kota Palembang



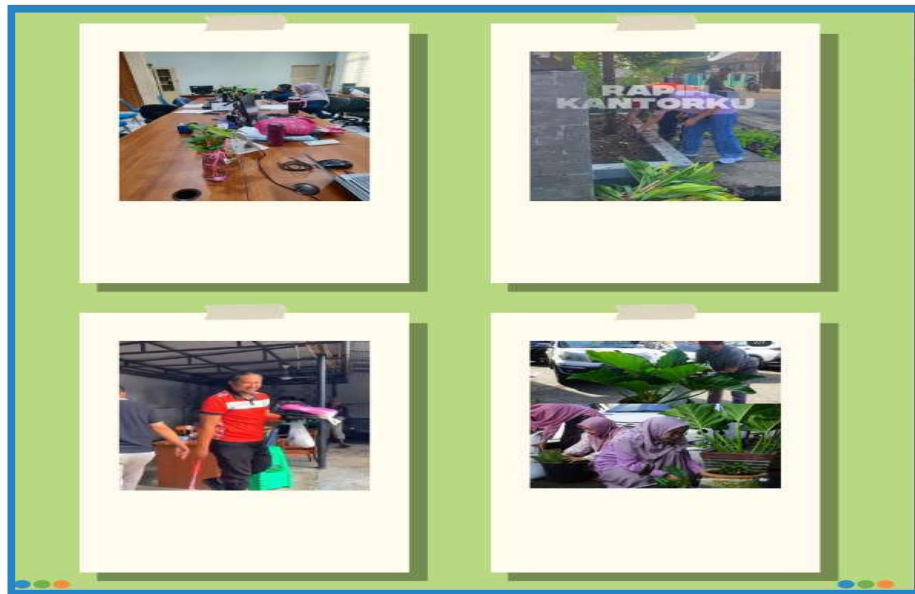
9. Inovasi “Rapih Kantorku” (Rapi, Bersih, Hijau Kantorku)

Rapih Kantorku merupakan inovasi BPS Kota Palembang yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan hijau guna mendukung produktivitas pegawai. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya suasana kantor yang tertata, asri, dan efisien dalam penggunaan energi.

Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang rapi dan sehat, meningkatkan kualitas udara dan estetika ruang kantor melalui penghijauan, mengurangi stres, serta menumbuhkan kesadaran pegawai dalam efisiensi penggunaan listrik.

Kegiatan yang dilakukan meliputi kerja bakti bersama dua kali dalam sebulan, penanaman dan perawatan tanaman di lingkungan kantor (termasuk satu tanaman di setiap meja pegawai), menjaga kerapian meja kerja dan dokumen, serta memastikan perangkat elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Program ini melibatkan seluruh pegawai BPS Kota Palembang, termasuk PPPK. Melalui Rapih Kantorku, diharapkan tercipta suasana kerja yang menyenangkan, sehat secara jasmani dan rohani, mempererat kebersamaan antarpegawai, serta meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan.

Gambar 54. Dokumentasi Rapih Kantorku



10. Inovasi ASN PRO (ASN Sehat, Senang, dan Produktif)

ASN PRO merupakan inovasi BPS Kota Palembang yang bertujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sehat, senang, dan produktif guna mendukung profesionalisme serta peningkatan kinerja. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai agar mampu bekerja secara optimal dan terhindar dari burnout di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin dinamis.

Tujuan ASN PRO adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai, menjaga suasana hati dan semangat kerja, mengurangi kejenuhan, serta mendorong produktivitas melalui kegiatan yang membangkitkan semangat dan kebersamaan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi senam bersama, renang di Sriwijaya Sport Center Palembang, bulu tangkis, billiard, dan karaoke bersama. Program ini melibatkan seluruh pegawai BPS Kota Palembang termasuk PPPK. Meskipun baru berjalan beberapa kali, ASN PRO telah memberikan dampak positif terhadap kekompakan, suasana kerja, dan kesejahteraan pegawai. Ke depan, kegiatan ini diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Gambar 55. Dokumentasi ASN Pro



11. Inovasi **JUS MANGGIS (Jumat Semangat Berbagi Bersama)**

JUS MANGGIS merupakan inovasi BPS Kota Palembang berupa kegiatan berbagi makanan kepada masyarakat sekitar yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi di lingkungan kantor sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sedekah pegawai BPS Kota Palembang yang dikumpulkan melalui kotak amal atau transfer ke rekening PIC yang ditunjuk, kemudian diwujudkan dalam bentuk pembagian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan inovasi ini adalah menumbuhkan semangat berbagi, mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekitar, serta membangun rasa kebersamaan dan kerukunan. Sasaran kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai BPS Kota Palembang sebagai partisipan, dengan penerima manfaat masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Keunggulan program ini adalah mendorong budaya berbagi di lingkungan kerja, memberikan bantuan nyata kepada masyarakat kurang mampu, serta menjadi role model dalam membangun nilai kekeluargaan dan kepedulian sosial. Melalui JUS

MANGGIS, diharapkan tumbuh kesadaran berkelanjutan untuk saling membantu dan berbagi kepada sesama.

Gambar 56. Dokumentasi Jus Manggis



12. Muter Pagi (Mood Booster Pagi-pagi)

Muter Pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai pekerjaan di lingkungan BPS Kota Palembang. Kegiatan ini diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan penyampaian *quote of the day* yang disampaikan secara bergantian oleh pegawai sesuai jadwal, dan diakhiri dengan penyampaian yel-yel kebanggaan BPS Kota Palembang. Seluruh pegawai BPS Kota Palembang mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang positif dan penuh semangat.

Pelaksanaan Muter Pagi bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, mengurangi persentase keterlambatan jam kerja (KJK), memastikan kelengkapan tim kerja setiap hari, serta memastikan grooming pegawai telah sesuai dengan standar seragam dan kelengkapannya, seperti penggunaan name tag. Melalui kegiatan ini, pegawai tidak hanya memperoleh motivasi dari *quote of the day* dan yel-yel yang disuarakan bersama, tetapi juga mendapatkan pengalaman dalam berbicara di depan publik sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi.

Motivasi kerja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, Muter Pagi diharapkan mampu menjadi inovasi yang membakar semangat pegawai sejak awal hari kerja, sekaligus menjadi sarana penguatan disiplin dan kebersamaan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, Muter Pagi diharapkan dapat

meningkatkan kinerja pegawai serta mendorong peningkatan kinerja organisasi BPS Kota Palembang secara keseluruhan.

Gambar 57. Dokumentasi Muter Pagi



3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Seluruh capaian kinerja BPS Kota Palembang pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan pengelolaan anggaran yang terencana, terukur, dan berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas statistik.

Pada Tahun Anggaran 2025, BPS Kota Palembang memperoleh total pagu anggaran sebesar Rp 11.515.620.000,-. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat anggaran yang masih terblokir sebesar Rp 246.608.000,-, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional menjadi Rp 11.269.012.000,-. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian perencanaan kegiatan tanpa mengurangi target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari total pagu efektif tersebut, realisasi belanja sebesar Rp 11.170.357.544,- atau mencapai 99,11 persen. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran telah berjalan secara optimal. Persentase realisasi yang tinggi mencerminkan beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang presisi, dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selaras dengan target kinerja dan kebutuhan riil kegiatan.
2. Monitoring dan evaluasi berkala, sehingga setiap potensi deviasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
3. Pengendalian belanja yang disiplin, termasuk optimalisasi penggunaan sumber daya serta efisiensi pada komponen belanja operasional.
4. Koordinasi internal yang kuat, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan sisa anggaran yang signifikan.

Efisiensi anggaran pada tahun 2025 menjadi prioritas strategis, terutama dalam menghadapi keterbatasan pagu efektif akibat pemblokiran sebagian anggaran. Strategi efisiensi dilakukan melalui:

- Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengolahan data.
- Rasionalisasi perjalanan dinas dan belanja pendukung tanpa mengurangi kualitas output.
- Penjadwalan ulang kegiatan yang bersifat fleksibel dengan tetap menjaga ketepatan waktu rilis statistik.
- Peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui penguatan koordinasi dan perencanaan detail setiap tahapan kegiatan statistik.

Meskipun terdapat selisih antara pagu total dan pagu efektif yang tersedia, BPS Kota Palembang tetap mampu mempertahankan kualitas layanan statistik. Integritas data, ketepatan metodologi, serta ketepatan waktu rilis publikasi statistik tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak semata-mata berfokus pada tingginya tingkat penyerapan, tetapi juga pada keberhasilan pencapaian output dan outcome yang mendukung kebutuhan data bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian realisasi sebesar 99,11 persen menjadi indikator kuat bahwa manajemen keuangan BPS Kota Palembang pada tahun 2025 telah berjalan secara efisien, adaptif, dan akuntabel, serta mampu menopang seluruh program kerja secara berkelanjutan di tengah keterbatasan pagu efektif yang tersedia.

Untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya finansial terhadap

pencapaian target organisasi, digunakan rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Realisasi Anggaran}}$$

Kriteria Penilaian:

- **Efisien (> 1):** Output kinerja yang dihasilkan lebih besar atau setara dengan persentase anggaran yang digunakan.
- **Tidak Efisien (< 1):** Penyerapan anggaran lebih besar dibandingkan hasil kinerja yang dicapai.

Upaya efisiensi anggaran sepanjang tahun 2025 dilaksanakan secara sistematis melalui pengendalian belanja operasional dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi kualitas output kegiatan statistik. Pendekatan ini dilakukan dengan memperketat skala prioritas pada belanja barang dan jasa, meningkatkan pengawasan internal, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi jarak jauh guna menekan biaya perjalanan dinas. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas fiskal organisasi sekaligus memastikan seluruh target kinerja akhir tahun tetap tercapai secara tepat guna, tepat waktu, dan akuntabel.

Secara rinci, langkah-langkah efisiensi yang dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi Pendataan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan metode **CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)** terus didorong secara maksimal dalam berbagai kegiatan survei dan pendataan. Langkah ini memberikan beberapa manfaat strategis:

- Mengurangi penggunaan kuesioner kertas dan biaya pencetakan.
- Meminimalkan biaya entri data karena proses input dilakukan secara langsung saat wawancara.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan (human error) melalui validasi otomatis dalam aplikasi.
- Mempercepat proses pengolahan dan rilis data.
- Menghemat biaya distribusi dan pengiriman dokumen fisik.

Selain itu, penggunaan sistem digital juga meningkatkan efisiensi waktu petugas lapangan serta memperkuat sistem monitoring real-time oleh pengawas kegiatan.

2. Kebijakan Publikasi Paperless

Seluruh publikasi dan diseminasi statistik diarahkan ke format digital (softcopy), baik melalui website, media sosial, maupun distribusi elektronik kepada pemangku kepentingan.

Dampak efisiensi dari kebijakan ini antara lain:

- Pengurangan signifikan biaya pencetakan dan penggandaan dokumen.
- Penekanan belanja ATK dan computer supplies.
- Pengurangan biaya pengiriman dokumen fisik.
- Dukungan terhadap prinsip ramah lingkungan (green office).

Publikasi digital juga memperluas jangkauan akses data dan meningkatkan kecepatan distribusi informasi statistik kepada pengguna.

3. Efisiensi Pembinaan Statistik Sektoral

Anggaran untuk kegiatan pembinaan statistik sektoral diefisiensi sebesar 50 persen. Meskipun dilakukan pengurangan anggaran, kualitas pembinaan tetap dijaga melalui perencanaan materi yang lebih fokus dan penggunaan media pembelajaran digital.

4. Penyesuaian Biaya Transportasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan harga satuan transportasi lokal tidak dimaksimalkan hingga batas tertinggi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025.

Upaya ini dilakukan dengan:

- Mengutamakan moda transportasi yang lebih ekonomis.
- Pengaturan jadwal kegiatan agar lebih efisien dalam satu rute perjalanan.
- Optimalisasi penugasan berbasis wilayah untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu.

Langkah ini membantu mengendalikan belanja perjalanan dinas tanpa menghambat pelaksanaan kegiatan lapangan.

5. Efisiensi Konsumsi Kegiatan

Biaya konsumsi dan snack untuk rapat internal maupun kegiatan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) tidak menggunakan harga satuan maksimal sesuai SBM 2025. Efisiensi dilakukan melalui:

- Penyesuaian jenis konsumsi sesuai kebutuhan.
- Pengendalian jumlah peserta sesuai urgensi kegiatan.
- Optimalisasi rapat daring untuk mengurangi frekuensi pertemuan tatap muka.

Kebijakan ini tetap menjaga kelancaran kegiatan tanpa pemborosan anggaran.

6. Penghematan Energi Listrik (Energy Saving Policy)

BPS Kota Palembang menerapkan imbauan penghematan energi sebagai bagian dari efisiensi operasional, dengan langkah-langkah:

- Mematikan lampu dan AC pada ruangan yang tidak digunakan.
- Memastikan seluruh perangkat komputer, printer, dan peralatan elektronik dimatikan setelah jam kerja.
- Mengoptimalkan penggunaan pencahayaan alami pada siang hari.
- Pengaturan suhu AC sesuai standar efisiensi energi.

Selain mengurangi biaya listrik, kebijakan ini juga mendukung budaya kerja yang lebih sadar lingkungan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi efisiensi tahun 2025 dilaksanakan melalui kombinasi kebijakan pengendalian belanja, digitalisasi proses bisnis, rasionalisasi kegiatan, serta penguatan budaya hemat di lingkungan kerja. Pendekatan ini tidak hanya berhasil menjaga stabilitas fiskal organisasi, tetapi juga memastikan bahwa kualitas data statistik, ketepatan waktu rilis, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap terjaga dengan baik.

Tabel 39. Tabel Efisiensi Per Sasaran Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (000 Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (000 Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas				100	344.420	343.451	99,72	1,00
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 2. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas				100	519.518	515.422	99,21	1.01
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persen	100	100	100				

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (000 Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (000 Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
Sasaran 3. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas				100	46.867	46.413	99,03	1.01
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 4. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas				100	120.580	112.881	93,61	1.07
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 5. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan,				100	35.782	33.832	94,55	1.06

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (000 Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (000 Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
dan Kehutanan yang Berkualitas								
Persentase publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 6. Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Industri yang Berkualitas				100	233.540	225.139	96,40	1.04
Persentase publikasi/laporan Statistik Industri yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 7. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Distribusi yang Berkualitas				100	1.555.432	1.552.689	99,82	1.00
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persen	100	100	100				

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (000 Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (000 Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
Sasaran 8. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Harga yang Berkualitas				100	336.058	335.523	99,84	1.00
Persentase Publikasi/laporan Statistik Harga yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 9. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas				100	437.690	432.697	98,86	1,01
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 10. Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas				100	66.879	66.847	99,92	1.00
Persentase Publikasi/Laporan	Persen	100	100	100				

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (000 Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (000 Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
Neraca Produksi yang Berkualitas								
Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	Persen	100	100	100				
Sasaran 11. Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah				118,23	15.625	14.855	95,07	1.24
Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar	Persen	80	94,58	118,23				
Sasaran 13. Terwujudnya Kemudahan Akses Data				120	15.020	12.402	82,57	1.45

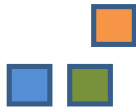
Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (000 Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (000 Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
BPS								
Indeks Pelayanan Publik - Penilaian mandiri	Poin	3,33	4.26	120				
Sasaran 14. Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota				106,74	7.541.601	7.478.201	99,16	1.08
Nilai SAKIP oleh Inspektorat	Poin	74,16	74,60	100.59				
Indeks Implementasi BerAKHLAK	Poin	64,84	73,20	112,89				
Total					11.269.012	11.170.357	99,11	1,041



BAB IV

PENUTUP





BAB IV. PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Laporan kinerja tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang, sekaligus menjadi dasar dalam penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Evaluasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hasil evaluasi kinerja selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan teknis guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Dalam upaya mencapai kinerja yang optimal, BPS Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun administratif, seperti dinamika kebutuhan data yang semakin kompleks, peningkatan standar kualitas pelayanan publik, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BPS Kota Palembang bersinergi dengan Tim Evaluasi SAKIP melalui pelaksanaan rapat evaluasi yang dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kota Palembang. Forum evaluasi ini menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan langkah perbaikan, serta memastikan bahwa seluruh indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 103,23 persen, yang berarti melampaui target 100 persen. Bahkan terdapat empat indikator kinerja yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan, yaitu Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar, Indeks Pelayanan Publik (Penilaian Mandiri), Nilai SAKIP oleh Inspektorat, serta Indeks Implementasi BerAKHLAK. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam aspek pembinaan statistik sektoral, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan

akuntabilitas kinerja, serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam budaya kerja organisasi.

Namun demikian, capaian kinerja tersebut masih sedikit berada di bawah rata-rata capaian kinerja kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan, dengan rata-rata sebesar 104,79 persen. Selisih ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja BPS Kota Palembang sudah sangat baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat sejajar atau melampaui rata-rata provinsi. Ke depan, penguatan perencanaan kinerja, peningkatan inovasi layanan statistik, serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi internal diharapkan mampu mendorong capaian yang lebih tinggi dan berdaya saing di tingkat provinsi.

4.2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan capaian kinerja BPS Kota Palembang secara umum sudah sangat baik namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, maka perlu disusun beberapa rekomendasi strategis sebagai langkah perbaikan berkelanjutan guna mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal dan berdaya saing di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi dan Kolaborasi dengan Pemerintahan daerah mengenai statistik sektoral daerah kota Palembang
2. Sebagai tindak lanjut atas masih adanya responden yang belum mengisi kuesioner Survei Kebutuhan Data (SKD), perlu dilakukan upaya penagihan pengisian kuesioner melalui pengiriman pengingat secara berkala kepada responden yang bersangkutan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan tingkat respons secara berkelanjutan serta pemberian pendampingan apabila terdapat kendala teknis dalam proses pengisian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi responden serta menjamin kelengkapan dan kualitas data yang dihimpun.
3. Membuat Laporan Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK
4. Pengisian proksi direncanakan dilakukan setiap bulan secara berkala oleh masing-masing Ketua Tim, sehingga proses verifikasi data lebih cepat,

- beban kerja di akhir periode berkurang, dan pengumpulan bukti dukung menjadi lebih mudah dan terstruktur
5. Dalam rangka meningkatkan Indeks Implementasi BerAKHLAK pada tahun 2026, BPS Kota Palembang direkomendasikan untuk mengembangkan dan melaksanakan inovasi *LUR (Logical Brain, Uniteq Squad, Relevant Quiz)* sebagai sarana penguatan budaya kerja, peningkatan kapasitas berpikir logis, kerja tim, serta pemahaman pegawai terhadap tugas dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.
 6. Dalam rangka meningkatkan kualitas diseminasi data dan informasi statistik kepada pengguna, penyusunan publikasi ke depan perlu didukung dengan penambahan ragam bentuk publikasi dan laporan, tidak hanya terbatas pada publikasi, tetapi juga melalui pengembangan media visual seperti infografis serta penyusunan dokumen pendukung berupa berita resmi statistic (BRS)

Dengan melaksanakan strategi-strategi tersebut, diharapkan BPS Kota Palembang dapat terus meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan layanan statistik yang berkualitas, responsif, dan relevan, serta menciptakan dampak positif bagi perencanaan pembangunan daerah dan kepuasan publik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Subeno, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala BPS Kota Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, S.ST, M.Si
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, S.ST, M.Si
NIP. 197607311997121001

Palembang, 31 Januari 2025
Pihak Pertama

Edi Subeno, S.E, M.Si
NIP. 196909151992111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	100 Persen
2	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	100 Persen
3	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	100 Persen
4	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	100 Persen
5	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	100 Persen
6	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Industri yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	100 Persen
7	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	100 Persen
8	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Harga yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas	100 Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	100 Persen
10	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	100 Persen
11		Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	100 Persen
12		Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	100 Persen
13	Terwujudnya Penguntun Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektor Kememerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektor sesuai standar	80 Persen
14	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	Indeks Pelayanan Publik - Perilaku Mandiri	3,33 Poin
15	Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	74,16 Poin
16		Indeks Implementasi BerAKHLAK	64,84 Poin

Program/Kegiatan	Anggaran
1) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 5.036.591.000,-
2) Dukungan Manajemen	Rp. 7.558.773.000,-
Jumlah	Rp.12.595.364.000,-

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan



Moh. Wahyu Palomo, S.Si, S.ST, M.Si
NIP. 197607311997121001

Palembang, 31 Januari 2025
Kepala BPS Kota Palembang



Egi Subeno, S.E, M.Si
NIP. 196909151992111001

Lampiran 2. Reviu Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Subeno, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala BPS Kota Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, S.ST, M.Si
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, S.ST, M.Si
NIP. 197607311997121001

Palembang, 3 November 2025
Pihak Pertama



Edi Subeno, S.E, M.Si
NIP. 196909151992111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	100 Persen
2	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	100 Persen
3	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	100 Persen
4	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	100 Persen
5	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Berkualitas	100 Persen
6	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Industri yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Industri yang Berkualitas	100 Persen
7	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Distribusi yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Berkualitas	100 Persen
8	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>insight</i> Statistik Harga yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Harga yang Berkualitas	100 Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	100 Persen
10	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Lintas Sektor yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang Berkualitas	100 Persen
11		Persentase Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	100 Persen
12		Persentase Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang Berkualitas	100 Persen
13	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar	80 Persen
14	Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS	Indeks Pelayanan Publik - Penilaian Mandiri	3.33 Poin
15	Tersedianya Dukungan Manajemen pada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	74.16 Poin
16		Indeks Implementasi BerAKHLAK	64.84 Poin

Progam/Kegiatan	Anggaran
1) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 3.974.019.000,-
2) Dukungan Manajemen	Rp. 7.541.601.000,-
Jumlah	Rp.11.515.620.000,-

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan  Moh. Wahyu Yulianto, S.Si, S.ST, M.Si NIP. 197607311997121001	Palembang, 3 November 2025 Kepala BPS Kota Palembang  Edi Subeno, S.E, M.Si NIP. 196909151992111001
---	---

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
SLTA	7
D3	2
D4-S1	17
S2	20
Total	46

Lampiran 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

PNS			PPPK		
Golongan	Jumlah (orang)	%	Golongan	Jumlah (orang)	%
IV	6	13,05	IX	2	4,31
III	34	73,91			
II	1	2,17	V	3	5,17
Jumlah	41	88,80	Jumlah	13	11,20

Lampiran 5. Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2025

Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
Pejabat Struktural	2	2	4,34	0	0,00
Pejabat Fungsional	32	14	30,43	18	39,13
Staf	12	6	13,04	6	13,04
Jumlah	46	24	47,83	24	52,17

Lampiran 6. Daftar OPD yang menjadi target Pembinaan Statistik Sektorial tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan Kota Palembang
2	Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Lampiran 7. Daftar K/L/Instansi/OPD Pengguna Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan (Hasil SKD 2025)

No	K/L/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Perdagangan Kota Palembang
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang
3	Inspektorat Kota Palembang
4	Dinas Perikanan
5	Dinas Pariwisata Kota Palembang
6	DPPKB Kota Palembang
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang
9	Dinas Kesehatan Kota Palembang
10	Dinas Perindustrian
11	RSUD Palembang BARI
12	Dinas Tenaga Kerja

Lampiran 8. Daftar Prestasi/Penghargaan BPS Kota Palembang Tahun 2025

No	Nama Prestasi/Penghargaan	Bulan perolehan prestasi/penghargaan	Pemberi penghargaan	Jenis penghargaan
1	Pengguna terbaik Aplikasi Back Office Selindo (BOS) Triwulan III Tahun 2025 wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Oktober	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Internal
2	Satuan Kerja BPS Kabupaten/Kota dengan kolaborasi Eksternal Terbaik BPS Provinsi Sumatera Selatan Award Tahun 2025	Desember	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Internal
3	BPS Kota Palembang dengan kinerja terbaik dalam kegiatan tim statistik harga tahun 2025	Desember	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Internal
4	Kinerja Terbaik 2 Dalam Kegiatan Tim Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata (KTIP) Tahun Anggaran 2025	Desember	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Internal
5	Kinerja Terbaik 1 dalam Kegiatan Pertambangan, Energi dan Konstruksi (PEK) Provinsi Sumsel Tahun 2025	Desember	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Internal
6	Penyampaian Laporan 9 Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025 melalui Aplikasi Kendali Ekonomi (Si-Grow).	Januari	Pemerintah Kota Palembang	Eksternal
7	Narasumber dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) Angkatan XXIV se-Kota Palembang	Desember	Pengurus Bersama Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (PB IKA LKS)	Eksternal

Lampiran 9. Daftar Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2025

No	Nama inovasi	Manfaat inovasi	Tahun Inovasi Mulai Diterapkan	Penerima Manfaat Inovasi	Apakah inovasi tersebut telah direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain?	Jika "Ya", sebutkan K/L/satker/unit kerja yang mereplikasi
1	SATU	1. Mempercepat proses administrasi internal 2. Mengurangi penggunaan dokumen fisik (paperless) 3. Meningkatkan keterbacaan dan keamanan data 4. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data 5. Meningkatkan kualitas pelayanan internal BPS Kota Palembang	Tahun 2022	1. Internal unit kerja/satker, 2. BPS secara keseluruhan,	Tidak	
2	Pojok Statistik	Meningkatkan literasi statistik serta pemanfaatan data statistik resmi di lingkungan Universitas Bina Darma Palembang.	Tahun 2024	1. Universitas Bina Dharma Palembang 4. Masyarakat umum	Tidak	
3	WA BOT	1. Akses terhadap produk-produk BPS menjadi lebih mudah. 2. Bentuk pelayanan statistik yang lebih user friendly.	Tahun 2022	1. Masyarakat Umum	Tidak	
4	PAL-INSTA (Palembang Indikator Strategis Terkini dan Aktual)	Menyajikan data strategis Kota Palembang secara visual, singkat, dan menarik.	Tahun 2025	1. K/L/Pemda, 2. Masyarakat umum	Tidak	

No	Nama inovasi	Manfaat inovasi	Tahun Inovasi Mulai Diterapkan	Penerima Manfaat Inovasi	Apakah inovasi tersebut telah direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain?	Jika "Ya", sebutkan K/L/satker/unit kerja yang mereplikasi
5	SEMPURNA (Seleksi Pegawai Unggul dan Berintegritas)	Memberikan apresiasi kepada pegawai berprestasi, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, serta mendorong produktivitas dan integritas pegawai di lingkungan BPS Kota Palembang	Tahun 2025	1. Internal unit kerja/satker,	Tidak	
6	Kolaborasi (Kota Palembang Berbagi Knowledge dan Informasi)	Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan keterampilan antar pegawai BPS Kota Palembang	Tahun 2025	1. Internal unit kerja/satker,	Tidak	
7	One-Fo	1.Meningkatkan diseminasi data statistik kepada publik. 2.Menumbuhkan kreativitas dan kompetensi pegawai dalam desain dan komunikasi data.	Tahun 2024	1. Internal unit kerja/satker, 2. BPS secara keseluruhan, 3. K/L/Pemda, 4. Masyarakat umum	Tidak	
8	Kopi Manis (Koordinasi Pagi Menambah Harmonis)	1.Informasi mengenai kegiatan masing-masing tim dapat diketahui 2.Merencanakan /penyampaian target dari tim 3,Mengevaluasi realisasi capaian kegiatan tiap tim	Tahun 2021	Internal unit kerja/satker,	Tidak	
9	Inovasi "Rapih Kantorku" (Rapi, Bersih, Hijau Kantorku)	Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan hijau guna mendukung produktivitas pegawai.	Tahun 2025	Internal unit kerja/satker,	Tidak	

No	Nama inovasi	Manfaat inovasi	Tahun Inovasi Mulai Diterapkan	Penerima Manfaat Inovasi	Apakah inovasi tersebut telah direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain?	Jika "Ya", sebutkan K/L/satker/unit kerja yang mereplikasi
10	ASN PRO (ASN Sehat, Senang, dan Produktif)	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang sehat, senang, dan produktif guna mendukung profesionalisme serta peningkatan kinerja	Tahun 2025	Internal unit kerja/satker,	Tidak	
11	JUS MANGGIS (Jumat Semangat Berbagi Bersama)	Menumbuhkan semangat berbagi, pemererat silaturahmi dengan masyarakat sekitar, serta membangun rasa kebersamaan dan kerukunan	Tahun 2023	Masyarakat Umum	Tidak	
12	Muter Pagi (Mood Booster Pagi-pagi)	Meningkatkan motivasi kerja pegawai, mengurangi persentase keterlambatan jam kerja (KJK), memastikan kelengkapan tim kerja setiap hari, serta memastikan grooming pegawai telah sesuai dengan standar seragam dan kelengkapannya, seperti penggunaan name tag.	Tahun 2025	1. Internal unit kerja/satker,	Tidak	

Lampiran 10. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang
TA 2025

Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Capain Kinerja
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas	344.420.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas	519.518.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas	46.867.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Yang Berkualitas	120.580.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Berkualitas	35.782.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Industri Yang Berkualitas	233.540.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Distribusi Yang Berkualitas	1.555.432.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Harga Yang Berkualitas	336.058.000	100
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata Yang Berkualitas	437.690.000	100

Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Capain Kinerja
Terwujudnya Penyediaan Data Dan Insight Statistik Lintas Sektor Yang Berkualitas	66.879.000	100
Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah	15.625.000	118,23
Terwujudnya Kemudahan Akses Data Bps	15.020.000	120
Terwujudnya Dukungan Manajemen Pada Bps Provinsi Dan Bps Kabupaten/Kota	7.541.601.000	106,74
Total	11.269.012.000	103,23

Lampiran 11. Perubahan SP DIPA- 054.01.2.428211/2025 BPS Kota Palembang 2025

Nomor Urut Revisi	Jenis Kewenangan	Tanggal Terbit Revisi	Dasar Surat Revisi	Surat Pengesahan Revisi	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Penjelasan Terkait Revisi
Awal	DJA	2 Desember 2024	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-812/02100/PR.400/2024. Tanggal : 20 Desember 2024, Hal: Rasionalisasi Anggaran TA.2025		12.595.364.000	12.595.364.000	Pelaksanaan anggaran TA 2025 dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan penghematan belanja perjalanan dari Kementerian Keuangan serta pemenuhan anggaran kegiatan teknis lainnya.
1	DJA	21 Februari 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-76/02000/PR.400/2025. Tanggal : 4 Februari 2025, Hal: Revisi Anggaran dalam rangka Efisiensi Anggaran BPS TA.2025	Surat DJA Nomor: S-86/AG/AG.4/2025 Tanggal 21 Februari 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-1 Anggaran TA 2025 BPS	12.595.364.000	12.573.144.000	Terkait efisiensi anggaran BPS TA 2025 seluruh satker BPS menyampaikan usulan revisi yang telah mendapat persetujuan mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi terhadap efisiensi anggaran BPS.
2	DJA	18 Maret 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-115/02000/PR.440/2025. Tanggal : 27 Februari 2025, Hal: Revisi DIPA Triwulan I TA.2025	Surat DJA Nomor: S-159/AG/AG.4/2025 Tanggal 18 Maret 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-2 Anggaran TA 2025 BPS	12.573.144.000	12.576.450.000	Revisi penambahan anggaran Kegiatan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan efisiensi anggaran tahap 2 (blokir sisa anggaran sesuai dashit dengan detail "efisiensi anggaran")
3	Kanwil DJPB	14 April 2025	Surat Kepala BPS Kota Palembang Nomor: B-128/16710/PR.450/04/2025. Tanggal 11 April 2025. Perihal : Usulan Revisi Anggaran	Surat Kanwil DJPB Nomor: S-462/WPB.07/2025, Tanggal 14 April 2025, Hal: Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 Satker 054-428227	12.576.450.000	12.576.450.000	Revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA Triwulan II dan revisi persamaan administrasi (POK).
4	DJA	30 April 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-180/02000/PR.440/2025. Tanggal : 15 April 2025, Hal: Revisi DIPA Triwulan II TA.2025	Surat DJA Nomor: S-235/AG/AG.4/2025 Tanggal 30 April 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-3 Anggaran TA 2025 BPS	12.576.450.000	12.576.450.000	Revisi penyesuaian anggaran triwulan II dan ada di beberapa KRO buka blokir (2902, 2906, 2908, 2910)
5	DJA	23 Juni 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-297/02000/PR.400/2025. Tanggal : 10 Juni 2025, Hal: Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Efisiensi Anggaran BPS TA 2025 melalui Aplikasi SAKTI Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-331/02000/PR.400/2025. Tanggal : 18 Juni 2025, Hal: Tindak Lanjut Tahap 2 Usulan Relaksasi Efisiensi Anggaran BPS TA 2025 melalui Aplikasi SAKTI	Surat DJA Nomor: S-325/AG/AG.4/2025 Tanggal 23 Juni 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-5 Anggaran TA 2025 BPS	12.576.450.000	12.351.310.000	Revisi relaksasi efisiensi anggaran sesuai dasar hitung dari pusat (pembukaan blokir efisiensi anggaran pada aplikasi SAKTI) Terkait surat tindak lanjut relaksasi tahap 1, melakukan menyesuaikan kembali anggaran sesuai dengan angka persetujuan relaksasi efisiensi anggaran

Nomor Urut Revisi	Jenis Kewenangan	Tanggal Terbit Revisi	Dasar Surat Revisi	Surat Pengesahan Revisi	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Penjelasan Terkait Revisi
6	DJA	16 Juli 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-302/02100/PR.440/2025. Tanggal : 2 Juli 2025, Hal: Revisi DIPA Triwulan III TA 2025	Surat DJA Nomor: S-371/AG.4/2025 Tanggal 16 Juli 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-6 Anggaran TA 2025 BPS	12.351.310.000	11.394.208.000	Menghapus anggaran dan menghapus blokir di KRO (2898, 2899, 2903, 2904, 2905, 2906) sesuai dasar hitung
7	DJA	5 September 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-506/02000/PR.440/2025. Tanggal : 14 Agustus 2025, Hal: Revisi DIPA Agustus TA 2025	Surat DJA Nomor: S-82/AG.4/2025 Tanggal 5 September 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-7 Anggaran TA 2025 BPS	11.394.208.000	11.441.995.000	Penambahan anggaran belanja modal pada KRO 2901.CAN.004 dan penyesuaian anggaran pada dasar hitung
8	Kanwil DJPB	15 Oktober 2025	Surat Kepala BPS Kota Palembang Nomor: B-417/16710/PR.450/2025. Tanggal 13 Oktober 2025. Perihal : Usulan Revisi Anggaran	Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-1997/WPB.02/2025, Tanggal 14 Oktober 2025, Hal: Pengesahan Revisi Anggaran Ke-8 2025 Satker 054-428227 TA 2025	11.441.995.000	11.441.995.000	Revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA Triwulan IV dan revisi administrasi persamaan POK
9	DJA	3 November 2025	Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-621/02000/PR.440/2025. Tanggal : 13 Oktober 2025, Hal: Revisi DIPA Oktober TA 2025	Surat DJA Nomor: S-104/AG.4/2025 Tanggal 3 November 2025, Hal : Pengesahan Revisi ke-8 Anggaran TA 2025 BPS	11.441.995.000	11.515.620.000	Penyesuaian anggaran sesuai dasar hitung, revisi kebutuhan belanja pegawai per satker s.d Desember 2025, optimalisasi belanja modal dan realokasi belanja operasional sesuai kebutuhan.
10	Pemutakhiran KPA	13 November 2025	Surat Kepala BPS Kota Palembang Nomor: B-460/16710/PR.450/11/2025. Tanggal 13 November 2025. Perihal : Usulan Revisi Anggaran	-	11.515.620.000	11.515.620.000	Revisi Pergeseran anggaran belanja pegawai 2886.EBA.994.001 antar akun gaji tidak melekat dan revisi pemutakhiran POK
11	Pemutakhiran KPA	12 Desember 2025	Surat Kepala BPS Kota Palembang Nomor: B-519/16710/PR.450/12/2025. Tanggal 11 Desember 2025. Perihal : Usulan Revisi Anggaran	-	11.515.620.000	11.515.620.000	Revisi Pergeseran anggaran belanja pegawai 2886.EBA.994.001 antar akun gaji tidak melekat dan revisi pemutakhiran POK



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*Badan Pusat Statistik
Kota Palembang*

